

**LAPORAN PENELITIAN  
UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL**

**LAPORAN AKHIR**

**Judul Penelitian:**

**PENYUSUNAN MODEL *SOCIAL EARLY WARNING*  
*SYSTEM* UNTUK MENGANTISIPASI KONFLIK  
SOSIAL DI MASYARAKAT**



Ketua Peneliti:  
Karnaji, S.Sos., M.Si

Anggota Tim Peneliti:  
Drs. Septi Ariadi, MA  
Dr. Soebagyo Adam, Drs., MS  
Siti Mas'udah, S.Sos., M.Si

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2009,  
Sesuai Dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang  
Kegiatan Penelitian Strategis Nasional  
Nomor: 276/H3/KR/2009, Tanggal 16 Februari 2009

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
OKTOBER 2009**

LAPORAN PENELITIAN  
UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL

FFB  
FF-2  
LP. 197/10  
Pen

LAPORAN AKHIR

Judul Penelitian:

PENYUSUNAN MODEL *SOCIAL EARLY WARNING*  
*SYSTEM* UNTUK MENGANTISIPASI KONFLIK  
SOSIAL DI MASYARAKAT



Ketua Peneliti:  
Karnaji, S.Sos., M.Si

Anggota Tim Peneliti:  
Drs. Septi Ariadi, MA  
Dr. Soebagyo Adam, Drs., MS  
Siti Mas'udah, S.Sos., M.Si

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2009,  
Sesuai Dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang  
Kegiatan Penelitian Strategis Nasional  
Nomor: 276/H3/KR/2009, Tanggal 16 Februari 2009

UNIVERSITAS AIRLANGGA  
OKTOBER 2009



## Lembar Pengesahan Laporan Akhir

1. Judul Penelitian		<b>Penyusunan Model <i>Social Early Warning System</i> Untuk Mengantisipasi Konflik Sosial di Masyarakat</b>
2. Ketua Peneliti		
a. Nama Lengkap	:	Karnaji, S.Sos., M.Si
b. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
c. NIP	:	132 162 037
d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
e. Jabatan Struktural	:	Kepala Bidang Akademik & Kemahasiswaan
f. Fakultas/Jurusan	:	FISIP/Sosiologi
g. Perguruan Tinggi	:	Universitas Airlangga
i. Tim Peneliti	:	

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Fak/Departemen	Perguruan Tinggi
1.	Drs. Septi Ariadi, MA	Perencanaan Pembangunan	FISIP/Sosiologi	Unair
2.	Siti Masudah, S.Sos., M.Si	Sosiologi Hukum	FISIP/Sosiologi	Unair
3.	Dr. Soebagyo Adam, Drs., MS	Kependudukan	FISIP/Sosiologi	Unair

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian		
a. Jangka Waktu Penelitian	:	1 tahun
b. Biaya total yang diusulkan	:	Rp 100.000.000,-
c. Biaya yang disetujui tahun 2009	:	Rp 62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Mengetahui  
Dekan FISIP Unair



**Drs. I. Basri Susilo, MA**  
NIP 130 937 977

Surabaya, 30 Nopember 2009  
Ketua Peneliti

**Karnaji, S.Sos, M.Si**  
NIP 132 162 037

Menyetujui:

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Airlangga



**Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA., drh.**  
NIP 131 837 004

## KATA PENGANTAR

Studi ini pada dasarnya bermaksud mengkaji (1) faktor dan hal-hal apa sajakah yang acapkali menjadi potensi *latent* memicu terjadinya konflik social di masyarakat; (2) Pranata sosial apa sajakah di tingkat lokal yang fungsional dalam mendukung upaya pengembangan keserasian sosial di masyarakat; (3) Strategi macam apakah yang efektif dan realistis dikembangkan dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan di masyarakat.

Secara garis besar, tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah:

(1) Memetakan potensi *latent* yang dapat memicu pergesekan sosial, dan sekaligus mengidentifikasi potensi pranata lokal yang terbukti fungsional dalam menciptakan keserasian sosial di masyarakat. (2) Merumuskan arah kebijakan dan program prioritas untuk membangun keserasian sosial bagi masyarakat di Propinsi Jawa Timur. (3) Merumuskan model *social early warning system* untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Proses penelitian ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Karena itu patut kiranya disebut dan diberi ucapan terimakasih, kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
3. Informan yang memberi data dalam penelitian ini.
4. Para mahasiswa sosiologi yang dengan tekun dan bertanggungjawab membantu mengumpulkan data lapangan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna dan memberikan sumbangan sekaligus memperkaya kajian-kajian tentang konflik. Kami berharap hasil kajian dan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Akhir kata, segala saran dan kritik tetap kami tunggu demi perbaikan laporan ini.

Surabaya,    Oktober 2009

Tim Pelaksana

## **SUMMARY**

### **The Establishment of Social Early Warning System Model to Anticipate Social Conflict in A community**

**Oleh**

**Karnaji, S.Sos., M.Si, Drs. Septi Ariadi, MA, Dr. Soebagyo Adam, Drs., MS,  
Siti Mas'udah, S.Sos.,**

**Lecturers in the Departement of Sociology, Faculty of Social and Political  
Sciences  
Airlangga University**

#### **1. The Problems and the Aims of the Study**

**The problems that will be examined in this research:**

- 1. What factors that often became the potential latent trigger for the occurrence of social conflict in the East Java Province communities?**
- 2. What social structures in the local level that was functional in supporting the efforts to develop social compatibility in East Java Province communities?**
- 3. What are the effective and realistic strategies to develop, to create unity in the communities?**
- 4. What kind of social early warning system model that must be developed to anticipate the occurrence of social conflicts in the East Java Province communities?**

#### **The aims of the study**

- 1. to map the latent potential that could trigger social friction, and at the same time identified the potential for the functional local institution that is proven in creating social compatibility in the communities in the East Java Province.**
- 2. to formulate the policy direction and the priority program to develop social compatibility for the communities in the East Java Province.**

3. to formulate the social early warning system model to anticipate the occurrence of social conflict in the East Java Province communities

## 2. Science and Technology Innovations

- A. This research could become the Science and Technology Innovations that is linked with conflict studies.
- B. This research is conducted in 4 (four) Regencies-- Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan and Malang

## 3. The Contribution for Development

This Study is important to carry out, in order to find the early prevention model so that potential social conflict that emerge in a community could be stifled. This study is urgent to be carried out because: (1) social conflicts that was already manifested tended to cause big loss and difficult to restore the situation, and (2) democracy that is developed on doubts and potential conflicts may produce counter-productive results.

The results of this study may become the model to prevent conflicts in order to prevent destructive conflict, and as the mechanism that develop a firm realistic social compatibility relations.

The principle of the foundation of the mechanism program of the social early warning system development was to know how the Government of the East Java Province in a proactive manner made an effort to detect, monitor, analyse and handle each seed of conflict as early as possible and as quickly as possible. In the development of the social early warning system program, several matters that should receive attention were: (1) to determine who was suitable to become the connector and the detector of possible occurrence of social unrest in the community. The detector is not always the person who was trained in a military or security type apparatus; (2) offer the community to form social channel for overcoming social unrest. The form of this social channel could be informal, semi informal or formal; (3) data collection and registration of the monitoring and the possibility of social unrest occurrence. This data collection activity was important to carry out not only as complete filing efforts, but also most importantly to learn from previous cases for overcoming solving the next cases; (4) early handling effort is the effort at the lowest level, where cases could be handled personally at the very

beginning it was detected in the local community and (5) the follow up of early detection of the case that has been developed. In various cases, social unrest in the community evidently developed wildly like the snowball: from time to time it became increasingly bigger and caused difficulties to handle in the village or local community level.

#### **4. Scientific Publication**

This research will be published in a nationally accredited journal, the "Masyarakat, Kebudayaan dan Politik".

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>SUMMARY</b>	.....	ii-iv
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	v-vi
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	1
1. Latar Belakang	.....	1
2. Perumusan Masalah	.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	.....	6
1. Diferensiasi dan Stratifikasi Sosial	.....	6
2. Tiga Faktor	.....	7
3. Struktural Fungsional dan Konflik	.....	8
4. Ancaman Konflik Dalam Masyarakat	.....	12
5. Sumber Konflik	.....	13
6. Konflik Primordial	.....	15
7. Membangun Kehidupan Multikulturalism	.....	17
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT</b>	.....	19
1. Tujuan	.....	19
2. Manfaat	.....	19
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	.....	20
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	.....	22
1. Sumber, Pemicu dan Eksistensi Konflik: Temuan Lapangan	.....	22
1.1 Kasus Konflik Tanah di Kabupaten Malang Selatan	.....	23
1.1.1 Intensitas dan Area Konflik	.....	23
1.1.2. Sejarah Sengketa Tanah	.....	25
1.1.3. Kekuatan Sosial Yang Turut Mendukung Munculnya Konflik...	.....	28
1.1.4. Sumber Konflik	.....	35
1.1.5. Faktor Pemicu Konflik	.....	38
1.1.6. Kalkulasi Konflik	.....	39
1.2. Kasus Konflik Agama di Situbondo	.....	40
1.2.1. Peta Persoalan dan Eksistensi Konflik	.....	43
1.2.2. Proses Terjadinya Konflik	.....	44
1.2.3. Pihak - Pihak Yang Terlibat Konflik	.....	46
1.2.4. Partisipasi Konflik	.....	47



1.2.5. Latar Belakang Konflik .....	49
1.2.6. Sejarah Terjadinya Konflik .....	49
1.2.7. Manajemen Konflik.....	55
1.2.8. Pihak yang Berperan .....	57
1.3. Kasus Konflik di Kabupaten Banyuwangi.....	59
1.3.1. Bentuk dan Intensitas Konflik .....	59
1.3.2. Proses dan Sejarah Terjadinya Konflik.....	60
1.3.3. Sebab dan Partisipasi Konflik.....	62
1.3.4. Konstruksi Konflik.....	69
1.3.5. Kerugian Sosial .....	70
1.3.6. Peredam konflik.....	71
1.4. Kasus Konflik di Kabupaten Pasuruan.....	71
1.4.1. Konflik/Sengketa Tanah: .....	72
1.4.2. Sengketa tanah antara warga masyarakat.....	74
1.4.3. Sengketa tanah antara warga masyarakat dengan PIER.....	76
1.4.4. Konflik Antar Warga Masyarakat .....	77
2. Potensi Konflik Dan Problema Kesenjangan Sosial Di Jawa Timur: Analisis dan Interpretasi Teoritik.....	81
3. Konflik dan Gerakan Sosial.....	95
4. Membangun Kehidupan Multikulturalism: Kearifan Lokal.....	100
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>105</b>
1. Kesimpulan .....	105
2. Program Social Early Warning System.....	107
3. Isu Prioritas dan Program <i>Social Early Warning System</i> .....	110
4. Saran .....	111
Daftar Pustaka.....	113
Interview Guide .....	115
Biodata Peneliti.....	119

# DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
1	Perbedaan Asumsi dan Pandangan Teori Fungsional dan Teori Konflik Tentang Perubahan Sosial.....	10
2	Isu Prioritas dan Program <i>Social Early Warning System</i> Dalam Rangka Mengantisipasi Ancaman Keresahan Sosial di Propinsi Jawa Timur.....	110

# BAB 1

## PENDAHULUAN

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

### 1. Latar Belakang

Kota, desa atau wilayah mana pun di Jawa Timur pada dasarnya selalu dihuni oleh beragam penduduk dan golongan, serta beraneka-ragam kelas dan status sosialnya. Tidak peduli tua-muda, kaya-miskin, sarjana atau pengangguran, dan dari etnis mana pun, semua niscaya adalah bagian dari warga negara Indonesia dan Provinsi Jawa Timur pada khususnya yang justru membuat kehidupan masyarakat menjadi makin berwarna. Pendek kata, masyarakat yang sedang tumbuh dan berubah, maka ia akan berkembang dengan sifatnya yang multi-pluralis.

Di Provinsi Jawa Timur, keaneragaman penduduk bukan saja dapat dilihat dari terjadinya variasi permukiman dan munculnya berbagai dialek, tetapi juga bisa dilihat dari berkembangnya berbagai perkampungan budaya dan etnis yang khas: di sana ada daerah Pecinan, kampung Arab, kampung Madura dan lain-lain —di mana satu sama lain saling tersegregasi (terpisah)—, namun entah karena apa semuanya dapat berjalan dengan serasi. Tetapi, di berbagai wilayah yang lain tertentu, katakanlah seperti Sampit, Palangka Raya, Ambon, Maluku, dan berbagai daerah lain, telah terbukti bahwa hubungan antar anggota masyarakat yang berbeda etnis terjalin sangat rapuh. Alih-alih antar satu dan yang lain bersedia saling menyapa dengan tulus, bahkan yang terjadi adalah sebuah pertikaian dan konflik berdarah, yang membawa korban ratusan atau bahkan ribuan nyawa tewas sia-sia.

Kenapa di wilayah tertentu konflik antar etnis atau konflik horisontal nyaris tak pernah meletup secara berarti? Daya tahan apakah yang dimiliki sebuah daerah dan komunitas seperti di Provinsi Jawa Timur hingga daerah provinsi nomor dua terbesar di Indonesia ini relatif mampu tumbuh relatif serasi, dan bahkan seolah begitu kenyal terhadap berbagai provokasi politik dan sosial? Meski riak-riak kecil konflik tetap terjadi dan potensi konflik juga siap meletup setiap saat, tetapi dibandingkan sejumlah daerah lain kondisi sosial-politik Provinsi Jawa Timur boleh dikata relatif harmonis.

Beberapa waktu yang lalu, di sejumlah daerah di Indonesia, kita tentu sudah mengetahui bagaimana bentrokan berdarah antara penduduk asli Dayak dan pendatang yang berasal dari etnis Madura terus bergulir: tidak hanya terjadi di Sampit, tetapi telah merambah ke wilayah di sekitarnya. Ratusan jiwa melayang sia-sia —sebagian dalam kondisi sangat mengenaskan, kepalanya dipenggal dan kemudian diarak keliling kota di bawah tatapan ribuan mata yang nanar memerah. Seperti mengulang kembali sejarah pertikaian antar etnis yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat, Ambon, atau yang lain, bentrokan dan aksi berdarah yang terjadi di Sampit seolah menjadi episode ke sekian kalinya yang berpola sama.

Dua kelompok etnis yang telah lama bersitegang dan hidup dalam suasana yang penuh dengan syakwasangka, akhirnya kembali terlibat dalam aksi pembantaian etnis yang kejam dan brutal. Kasus kerusuhan Sampit, bukan hanya menimbulkan gelombang pengungsi dan bencana kemanusiaan yang menohok masa depan anak-anak, tetapi juga makin memanaskan bara api yang sudah bertahun-tahun mengendap. Berbeda dengan kasus amuk massa yang terjadi akibat dipicu kesenjangan ekonomi atau pertikaian politik yang sifatnya struktural, konflik terbuka yang terjadi antara etnis Madura dengan etnis Dayak atau melayu sesungguhnya adalah konflik kultural yang dipicu oleh perseteruan (*jeud*) yang harus dilacak jauh ke belakang —yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam aksi amuk massa yang dipicu oleh faktor kesenjangan sosial-ekonomi, pertikaian niscaya akan segera mengendur apabila sumber-sumber produksi yang ada telah terbagikan secara adil atau pada saat telah terbangun hubungan sosial yang bersifat simbiosis mutualisme, yakni pola hubungan yang saling menguntungkan secara ekonomis, tanpa harus didahului dengan proses akulturasi budaya. Tetapi, lain soal jika konflik yang timbul berakar dari adanya dendam kusumat dan perseteruan lama sebagaimana layaknya bara api.

Banyak studi membuktikan bahwa perseteruan nyaris tidak pernah dapat terselesaikan secara tuntas, sekali pun mungkin antar etnis yang berbeda itu sebagian di antaranya telah terjadi asimilasi dan hubungan personal yang akrab. Seperti dituturkan oleh sebagian pengungsi dari Sampit, bahwa sebagian di antara etnis Madura sebenarnya tak sedikit yang telah menikah dengan penduduk lokal atau paling-tidak telah bertahun-



tahun hidup bertetangga dan menjalin kontak-kontak personal. Tetapi, ketika kerusuhan meledak, korban dan sasaran aksi amuk massa biasanya tidak pernah pandang bulu.

Secara teoritis, pada tingkat individu, konflik antar etnis memang terkadang dapat dieleminasi dengan adanya proses interaksi sosial yang intens dan mekanisme *cross cutting affiliation*. Tetapi, pada tingkat kelompok niscaya yang namanya syakwasangka dan dendam akan tetap membara. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin seseorang bisa melupakan dendam dan kebencian yang telah berakar di benaknya jika dulu-dulunya orang tua atau sanak-keluarga pernah terbunuh oleh kelompok etnis lain? Seorang anak yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan ayah-ibunya atau kakak-kakak dibantai dengan kejam, niscaya pengalaman itu akan terus mengendap menjadi bayangan hitam yang melahirkan mimpi-mimpi buruk setiap waktu.

Perseteruan —seperti dikatakan Paul Spencer— pada dasarnya adalah dampak dari terjadinya suatu kematian yang membangkitkan perasaan sakit hati dan dendam berdarah dari suatu kelompok terhadap kelompok lain (Kuper & Kuper, 2000: 358). Perseteruan tidak akan pernah hilang dengan tuntas, karena yang namanya dendam di mana pun tentunya sulit dihapuskan begitu saja. Perseteruan, lanjut Spencer, umumnya hanya dapat diredam (sementara waktu) melalui aksi kekerasan, dan pertumpahan darah biasanya dipercaya sebagai bentuk penyelesaian yang paling rasional, sedangkan bentuk penyelesaian yang lain ibaratnya hanyalah semacam gencatan senjata. Dengan kata lain, jika dalam kurun waktu tertentu konflik antar etnis belum meledak, maka itu semua hanyalah jeda sosial yang fungsinya sekadar menunda konflik terbuka yang sesungguhnya.

Di masa lalu, konflik antar etnis relatif jarang meletup keluar karena memang regulasi yang dilakukan negara mampu menetralsir konflik yang membara di tingkat bawah. Tetapi, sejak reformasi bergulir liar dan peran pihak ketiga tidak lagi dominan seperti di masa lalu, ditambah dengan terjadinya eskalasi kekerasan di berbagai wilayah, maka perseteruan antar etnis dan luka lama yang telah puluhan tahun mengendap pun kembali terkoyak.

Perseteruan antara dua etnis yang sama-sama menyimpan dendam, seolah seperti luka yang kembali disiram cuka. Kasus satu-dua warga Madura yang bersenggolan di pasar dengan etnis Dayak atau Melayu kemudian saling tinju, perkelahian antara sopir

yang berasal dari pendatang dengan penduduk lokal, dan semacamnya semuanya pada dasarnya hanyalah berfungsi sebagai faktor pemercepat (*precipitating factors*). Aksi amuk massa yang dilakukan etnis Dayak, dengan demikian bukan muncul akibat godaan psikologis dari suasana kerumunan atau gerakan massa yang spontan, melainkan ekspresi dari rasa geram yang terpendam selama bertahun-tahun, dan kemudian meledak menjadi aksi pembantaian massal.

Dalam situasi normal, tentu sulit dibayangkan ada orang dengan wajar bersinar-sinar dan sorak-sorai yang gempita menenteng kepala orang yang masih berlumuran darah. Tetapi, ketika emosi dan insting purbawi manusia telah naik ke ubun-ubun, maka membunuh sesama kemudian tak ubahnya seperti ritus yang dipercaya menjadi saluran bagi mengalimya tekanan psikologis dan dendam kesumat yang mengendap di benak mereka. Bagi seseorang yang telah ditelikung oleh dendam, membunuh musuh pada akhirnya justru dianggap menjadi bagian dari mekanisme *survival* mereka —yang dinilai benar dan perlu terus dikembangkan sebagai sarana untuk melindungi dan mempertahankan kelangsungan kehidupan diri dan keluarganya.

Apakah dua kelompok masyarakat yang berbeda budaya dan etnis tidak mungkin dapat dipersatukan dan hidup secara berdampingan? Meski di sebagian komunitas, perseteruan antar etnis riskan terjerumus dalam konflik yang berdarah, tetapi ternyata di beberapa komunitas yang lain perbedaan yang ada tidak selalu harus berbuntut dengan konflik yang terbuka. Sekadar contoh: lihat saja bagaimana interaksi sosial antar kelompok masyarakat yang berlangsung di kawasan Utara Kota Surabaya. Meskipun di sana kita tahu berbagai kelompok etnis hidup dan mencari nafkah bersama dengan caranya masing-masing. Penduduk kota yang berasal dari etnis Cina, Madura, Arab, Jawa, dan lain-lain, secara fisik bermukim di perkampungan yang berbeda dan secara kultural memiliki adat-istiadat yang berbeda secara diametral. Tetapi, karena satu dengan yang lain diikat oleh kepentingan yang sama dan pola hubungan sosial yang sifatnya fungsional, maka perbedaan kemudian terbukti dapat diredam.

Studi sebagaimana dilaporkan bukan saja bermaksud mengkaji problema yang muncul di seputar keserasian sosial yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, tetapi sekaligus juga bermaksud merumuskan kebijakan dan menyusun program-program untuk mengembangkan keserasian sosial dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan di

Indonesia dan Provinsi Jawa Timur pada khususnya. Bagi wilayah dan masyarakat Indonesia, keserasian sosial dibutuhkan selain untuk menghindari terjadinya berbagai friksi dan konflik yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan, tetapi juga penting untuk terus dikembangkan sebagai modal sosial untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang mana hal itu merupakan salah satu prasyarat dan daya tarik bagi investasi pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat.

## 2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dicoba dikaji dalam kegiatan ini adalah:

1. Faktor dan hal-hal apa sajakah yang acapkali menjadi potensi *latent* memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat di Provinsi Jawa Timur?
2. Pranata sosial apa sajakah di tingkat lokal yang fungsional dalam mendukung upaya pengembangan keserasian sosial di masyarakat di Provinsi Jawa Timur?
3. Strategi macam apakah yang efektif dan realistis dikembangkan dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan di masyarakat?
4. Model *social early warning system* seperti apakah yang perlu dikembangkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat Provinsi Jawa Timur? (\*)

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Berbagai kajian telah membuktikan bahwa sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, dan ideologi serta disekat oleh batas-batas kelas yang *rigid*, niscaya akan mengidap potensi konflik yang besar jika semua perbedaan dan kesenjangan yang ada tidak dikelola dengan baik (Susetawan, 2000; Sihbudi & Nurhasim (eds.), 2001). Tidak mustahil terjadi, sebuah masyarakat yang diwarnai sejumlah perbedaan, tiba-tiba dikejutkan oleh konflik yang terbuka meski hanya dipicu oleh sebab-sebab yang sepele.

Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat yang pluralistik di wilayah mana pun, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur, sedikit-banyak akan dihadapkan pada sejumlah dilema: membiarkan perbedaan itu mencuat atau menekan perbedaan yang ada, dengan cara mencoba menutup-nutupinya dengan berbagai bentuk rekayasa sosial yang seolah-olah harmoni adalah satu-satunya kunci untuk membangun masa depan. Apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk mengelola perbedaan agar tidak tergelincir menjadi pemicu terjadinya disintegrasi dan konflik yang terbuka?

#### **1. Diferensiasi dan Stratifikasi Sosial**

Secara teoritis, kita tahu bahwa di masyarakat manapun, struktur sosial yang ada umumnya ditandai dua cirinya yang khas. Secara vertikal, struktur sosial masyarakat ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antar kelas sosial dan polarisasi sosial yang cukup tajam. Secara horisontal, masyarakat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, profesi, ras, adat serta perbedaan kedaerahan (Nasikun, 1984:30).

Perbedaan masyarakat secara vertikal —sebagaimana dikemukakan Nasikun— disebut stratifikasi sosial, sedangkan perbedaan masyarakat secara horisontal disebut diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial muncul karena ketimpangan distribusi dan kelangkaan barang berharga yang dibutuhkan masyarakat, seperti uang, kekuasaan,



pendidikan, ketrampilan dan sebagainya. Sementara itu, deferensiasi sosial muncul karena pembagian kerja, perbedaan agama, ras (pengelompokan individu atas dasar ciri fisik), etnis (pengelompokan individu atas dasar ciri persamaan kebudayaan, seperti bahasa, adat, sejarah, sikap, wilayah), atau perbedaan jenis kelamin.

Di dalam stratifikasi sosial, hubungan antar kelas dalam banyak hal cenderung tidak seimbang —dimana ada pihak tertentu yang lebih dominan dan berkuasa daripada pihak yang lain. Sementara itu, di dalam deferensiasi sosial yang dipersoalkan bukanlah apakah antara berbagai kelompok (bukan antara berbagai kelas) itu seimbang atau tidak, melainkan yang lebih ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya bersifat pluralistik dan di dalam terdapat sejumlah perbedaan.

Secara normatif, di dalam deferensiasi sosial, memang hak dan kewajiban antara kelompok yang satu dengan yang lain relatif sama di mata hukum. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa di dalam kenyataan yang terjadi deferensiasi sosial umumnya selalu tumpang-tindih dengan stratifikasi sosial.

Hubungan antara kelompok dalam diferensiasi sosial —entah itu atas dasar perbedaan profesi, ras, etnis, agama, atau jenis kelamin— selalu tidak pernah netral dari dimensi-dimensi stratifikasi sosial. Hak dan kewajiban seorang buruh dan majikan, misalnya, di mata hukum secara normatif sama. Tetapi, karena antara keduanya dari segi kekuasaan dan ekonomi jauh berbeda, maka pola hubungannya pun menjadi tidak seimbang. Seorang majikan, jelas posisinya akan lebih dominan dan berhak memerintah para buruhnya. Sebaliknya, para buruh akan selalu bersikap hormat kepada majikan yang membayarnya. Memperoleh upah yang layak, misalnya, secara hukum adalah hak kaum buruh. Namun, karena para buruh itu menyadari bahwa mencari pekerjaan itu susah dan tidak memiliki alternatif untuk bekerja di sektor lain, maka sering kita temui banyak kaum buruh relatif bersikap pasrah begitu saja —kendati diberi upah di bawah KUM (Ketentuan Upah Minimum).

## 2. Tiga Faktor

Sepanjang perbedaan antarkelompok dan antarkelas tetap fungsional dan sifatnya saling mengisi, dan masih dalam batas-batas yang tidak melanggar asas keadilan, ketidakpuasan dan perselisihan di dalam masyarakat sebetulnya kecil kemungkinan bakal

tersulut. Tetapi, ketika perbedaan dan perbenturan kepentingan mulai muncul serta ditambah lagi dengan makin menguatnya ikatan-ikatan primordial antara masing-masing kelompok, tak pelak konflik antara kelompok di dalam deferensiasi sosial akan mulai timbul dan bahkan bukan tidak mungkin akan meledak menjadi konflik terbuka yang keras.

Secara teoritis, sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang menyebabkan integrasi sosial dan kerjasama antar kelompok dalam deferensiasi sosial pecah, sehingga terjadi disorganisasi sosial. Ketiga faktor itu adalah: Pertama, faktor politik. Hubungan antar kelompok yang semula rukun suatu saat bisa berubah menjadi penuh konflik ketika di dalamnya diberi muatan politik atau dimanipulasi untuk kepentingan elit-elit politik. Kedua, faktor ekonomi. Perbedaan antar kelompok bisa berubah menjadi permusuhan atau minimal sikap antipati ketika perbedaan antara masing-masing kelompok itu bersejajaran dengan kesenjangan kelas ekonomi. Ketiga, faktor sosial-budaya. Yang dimaksud faktor sosial-budaya di sini terutama yang adanya ikatan primordialisme antara kelompok satu dengan yang lain atas dasar solidaritas etnis, ras, kelas atau sentimen kedaerahan.

### 3. Struktural Fungsional dan Konflik

Faktor apakah sebetulnya yang menjadi penyebab munculnya integrasi dan konflik dalam masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, dalam kajian sosiologis ada dua perspektif yang populer. Pertama, adalah pendekatan struktural fungsional. Pendekatan struktural fungsional menganggap bahwa masyarakat pada dasarnya, terintegrasi di atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, suatu *General Agreements* yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Perspektif ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Oleh karena sifatnya yang demikian maka aliran pemikiran tersebut disebut sebagai *Integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach*, atau dengan lebih populer disebut sebagai *structural-functional approach*. (selanjutnya disebut pendekatan struktural fungsional atau fungsionalisme-struktural). Teori-teori yang mendasarkan diri pada sudut pendekatan tersebut, biasa dikenal pula sebagai

*integration theories, order theories, equilibrium theories*, atau lebih dikenal sebagai teori-teori fungsional struktural.

Pendekatan struktural fungsional, sebagaimana dikatakan Nasikun (1984) pada dasarnya memiliki sejumlah anggapan dasar mereka sebagai berikut:

1. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang paling berhubungan satu sama lain.
2. Dengan demikian hubungan mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik.
3. Sekalipun interaksi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi didalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal.
4. Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi didalam jangka yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu.
5. Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner. Perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya mengenai bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan.
6. Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan: penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (*ekstra sistemik change*); pertumbuhan melalui proses deferensiasi struktural dan fungsional; serta pertemuan-pertemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.
7. Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah consensus diantara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai

kemasyarakatan tertentu. Di dalam setiap masyarakat, demikian pandangan menurut pandangan *fungsiionalisme struktural*, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu terhadap mana sebagian besar anggota masyarakat menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang mutlak benar. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri.

Pendekatan struktural fungsional, kendati berkembang menjadi salah satu perspektif yang sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan teori-teori sosiologi hingga saat ini. Akan tetapi, bukan berarti perspektif ini bebas dari kritik. Pendekatan struktural fungsional, dikritik karena dianggap terlalu menekankan anggapan-anggapan dasarnya pada peranan unsur-unsur normatif dari tingkah laku sosial, khususnya pada proses-proses dengan mana hasrat-hasrat perseorangan diatur secara normatif untuk menjamin terpeliharanya stabilitas sosial.

Tabel 1  
Perbedaan Asumsi dan Pandangan  
Teori Fungsional dan Teori Konflik Tentang Perubahan Sosial

Aspek	Teori Fungsional	Teori Konflik
Setiap masyarakat	Relatif bersifat bebas	Terus-menerus berubah
Setiap komponen masyarakat menunjang	Kestabilan masyarakat	Perubahan masyarakat
Setiap masyarakat biasanya	Relatif terintegrasi	Berada dalam ketegangan dan konflik
Kestabilan sosial tergantung pada	Kesepakatan atau konsensus di kalangan anggota	Tekanan terhadap yang satu oleh yang lainnya

David Lockwood, misalnya menyatakan bahwa setiap situasi sosial senantiasa mengandung didalam dirinya dua hal yakni: tata tertib sosial yang bersifat normatif dan substratum yang melahirkan konflik-konflik. Tata tertib dan konflik adalah dua kenyataan yang melekat bersama-sama di dalam setiap sistem sosial. Tumbuhnya tata tertib sosial atau sistem nilai yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat, sama sekali tidak berarti lenyapnya konflik di dalam masyarakat. Sebaliknya, tumbuhnya tata tertib sosial justru mencerminkan adanya konflik yang bersifat potensial di dalam



setiap masyarakat. Oleh karena itu apabila kita berbicara tentang stabilitas atau instabilitas dari suatu sistem sosial, maka yang kita maksudkan sesungguhnya tidaklah lebih daripada menyatakan derajat keberhasilan atau kegagalan dari suatu tertib normatif di dalam mengatur kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Berbeda dengan pendekatan *fungsiionalisme struktural*, maka pandangan pendekatan struktural konflik umumnya berpangkal pada anggapan-anggapan dasar sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat senantiasa berada didalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain perubahan sosial merupakan gejala yang melekat didalam setiap masyarakat.
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik didalam dirinya, atau dengan perkataan lain konflik adalah merupakan gejala yang melekat didalam setiap masyarakat.
3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintergrasi dan perubahan-perubahan sosial.
4. Setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain.

Perubahan sosial, oleh para penganut pendekatan konflik tidak saja dipandang sebagai gejala yang melekat didalam kehidupan setiap masyarakat, akan tetapi lebih daripada itu malahan dianggap "bersumber" di dalam faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat itu sendiri —suatu hal yang kurang diperhatikan oleh para penganut *pendekatan fungsiionalisme struktural*. Perubahan sosial yang demikian terutama timbul dari kenyataan akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam setiap masyarakat. Kontradiksi intern tersebut bersumber di dalam kenyataan bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas (*authority*) secara tidak merata, suatu hal yang senantiasa mengakibatkan timbulnya dua macam kategori sosial di dalam setiap masyarakat, yakni: mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas.

Pembagian otoritas yang bersifat dikotomis serupa itu oleh para penganut pendekatan konflik dianggap menjadi sumber timbulnya konflik-konflik sosial didalam

setiap masyarakat. Mengapa? Oleh karena pembagian otoritas yang demikian, di dalam dirinya sendiri menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlainan satu sama lain. Pembagian otoritas yang demikian mengakibatkan mereka yang menduduki posisi sebagai pemegang otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas memiliki kepentingan-kepentingan, yang baik secara substansial maupun arahnya, berlawanan satu sama lain.

#### **4. Ancaman Konflik Dalam Masyarakat**

Dilihat dari sisi definisi, konflik dapat diartikan sebagai interaksi antara paling tidak dua individu atau kelompok yang memiliki tujuan berbeda (Nicholson, 1972). Perbedaan ini secara umum merupakan ultima dari perbedaan pikiran, perkataan, dan perbuatan (Chang, 2002:34). Konflik juga banyak dipahami sebagai suatu situasi di mana terjadi persaingan untuk memenuhi tujuan yang tidak selaras dari kelompok-kelompok yang tidak selaras kelompok-kelompok yang berbeda (Miall, et al., 1999:21). Melalui penelusuran definisi tersebut di atas dapat terjadi kapan saja ketika benturan pikiran, perkataan, dan perbuatan tidak menemukan jalan keluar oleh individu atau kelompok yang tengah berinteraksi.

Pernyataannya yang muncul sekarang ialah, apakah makna dari perbedaan pikiran, perkataan, dan perbuatan tersebut di atas? Sosiologi Dahrendrof (1957: 206-207) melihat konflik sebagai dua pemaknaan yang bergumul. Makna yang pertama, (peristiwa) konflik merupakan akibat dari proses integrasi di dalam masyarakat yang tidak tuntas. Dalam konteks ini konflik merupakan sebuah *symptom* (gejala penyakit) yang dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam intensitas yang tinggi, konflik semacam ini dapat membuat sebuah negara kesatuan hancur berkeping-keping. Makna kedua, konflik dapat pula dipahami sebagai sebuah proses alamiah dalam rangka sebuah proyek rekonstruksi sosial. Dalam hal ini, konflik dapat dilihat secara fungsional sebagai suatu strategi untuk menghilangkan unsur-unsur disintegrasi di dalam masyarakat yang tidak terintegrasi secara sempurna.

Dengan demikian, secara sosiologis konflik sesungguhnya dapat dipahami dalam wajah Janus (yang berbeda). Pertama, konflik dapat dianggap sebagai sebuah patologi sosial akibat kegagalan sebuah proses integrasi suatu masyarakat atau komunitas. Dalam

kerangka ini, konflik biasanya dipahami sebagai sesuatu yang destruktif, dan oleh karena itu mungkin harus dihindarkan. Interpretasi semacam ini mengandung nuansa pesimistis dalam melihat konflik sebagai suatu fenomena. Kedua, konflik dilihat dari segi fungsionalnya, yakni sebagai sebuah mekanisme untuk menyempurnakan proses integrasi sosial. Dalam pemahaman semacam ini, konflik dilihat dari sudut yang lebih optimis, yakni sebagai sebuah cara untuk menghilangkan berbagai elemen dis integrasi dalam rangka untuk membentuk suatu komunitas yang solid. Dalam artian ini konflik tidak perlu dihindari melainkan sebaliknya harus dikelola dan kemudian dicarikan solusinya.

Dalam kaitan tersebut di atas, Conn (dalam Agustino, 2004) menyatakan bahwa konflik pada hakikatnya terdiri dari dua jenis. Pertama, konflik negatif (*destruktif*) yakni segala bentuk konflik yang bersifat disfungsional di mana aktor-aktor yang terlibat secara membabi buta berusaha saling menghancurkan. Dalam konflik negatif atau destruktif masing-masing pihak biasanya menutup berbagai kemungkinan negoisasi sehingga prospek resolusinya menjadi hampir mustahil. Kedua, konflik positif (*konstruktif*), yakni setiap bentuk konflik yang apabila di kelola secara kreatif dapat menghasilkan suatu konsensus untuk mengembangkan dialog dalam rangka menegakkan perdamaian (*dialogical democracy*). Dengan demikian konflik positif atau konstruktif dapat membantu memperkuat hubungan antar kelompok atau masyarakat terutama dalam upaya untuk mencari pijakkan nilai-nilai dan norma-norma yang diterima bersama.

## 5. Sumber Konflik

Kajian yang dilakukan Leo Agustino (2004) menemukan beberapa aspek yang perlu dilihat lebih jauh dalam mengkaji terjadinya konflik di tingkat masyarakat lokal. Pertama, tekanan yang makin keras terhadap peran negara sebagai sebuah kekuatan yang berdaulat atas wilayah dan warganya. Walaupun hingga akhir abad ke-20 negara sebagai sebuah instuisi masih eksis, namun berbagai tekanan oleh kekuatan-kekuatan baik dari dalam maupun dari luar telah meletakkan negara pada posisi yang defensif. Dari dalam, berbagai kekuatan faksional (berdasarkan ikatan-ikatan etnis, wilayah, agama, dan lain-lain) terus-menerus berupaya merongrong posisi negara sebagaimana terjadi di Timor Timur, Aceh, Papua, dan Maluku Selatan. Dari luar, fenomena globalisasi (sistem internasional) membuat garis batas negara makin berkurang relevansinya dari waktu



kewaktu. Akibat lebih lanjut dari proses ini adalah makin rentannya perikatan negara-bangsa dalam konteks nasionalisme, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Smith (1986: 150) bahwa: "tugas utama setiap negara dewasa ini adalah menciptakan stabilitas di tengah-tengah tarikan arus etnisitas yang makin intensif. Namun patut disayangkan bahwa tidak banyak negara yang sanggup melaksanakan tugas ini dengan baik". Rapuhnya posisi negara makin tampak jelas manakala rezim-rezim penguasa dibangun atas dasar legitimasi yang rendah sebagaimana tampak pada sejumlah negara berkembang di mana pemerintahannya tidak memiliki kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan memadai. Dalam banyak kasus, konflik mudah terjadi pada rezim-rezim kleptokratis (rentan terhadap korupsi), yang dibangun melalui pendekatan otoritariansme.

Kedua, posisi negara yang makin terancam oleh mobilisasi kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap situasi dan kondisi tertentu; sebagaimana yang dikatakan oleh Marx (1980) bahwa ketidakpuasan seringkali menjadi sumber konflik. Berbagai studi telah dilakukan untuk mencoba memahami bagaimana kelompok-kelompok yang tidak puas berusaha untuk mengartikulasi keluhan-keluhan mereka dan melakukan mobilisasi untuk menentang para pemegang otoritas dalam persoalan-persoalan tertentu. Gurr (1993) menyatakan bahwa kelompok-kelompok di dalam suatu negara (kelompok etnis, sekte militan, separatis, dan lain-lain) dapat secara bertahap menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi tertentu, mulai dari protes secara damai, protes dengan diikuti pengrusakan, pembangkangan, hingga kepada pemberontakan bersenjata (revolusi bersenjata).

Kemampuan negara untuk mengelola dan menyelesaikan jenis konflik akibat ketidakpuasan pada kondisi tertentu sangat tergantung pada kemampuan negara dalam memberikan respons yang tepat. Respons akomodatif biasanya diperlukan pada saat konflik masih pada tahap awal (protes secara damai dan demonstrasi) untuk mencegah terjadinya eskalasi. Respons represif barangkali juga diperlukan ketika protes telah menjurus ke arah pemberontakan yang dapat membahayakan stabilitas suatu negara. Namun demikian, upaya yang sangat ideal –sebagaimana yang dikatakan oleh Azar (1990) –adalah *built-in mechanism of conflict resolution*, yakni sebuah upaya yang melibatkan pihak-pihak yang tidak terlibat konflik untuk membiasakan saling



membicarakan perbedaan dalam suatu dialog dengan didampingi oleh pihak ketiga yang sungguh-sungguh netral.

Ketiga, konflik di tingkat lokal dapat juga dipicu oleh ambisi-ambisi pribadi para pemimpin kelompok di dalam suatu negara dengan cara mengeksploitasi suasana pluralitas demi kepentingan pribadi/kelompoknya melalui penggalangan dukungan massa. Konflik yang melanda berbagai kawasan di Balkan maupun Afrika (sebagai contoh kongkret) tidak lepas dari peran para pemimpin yang mengeksploitasi perbedaan dalam rangka memperoleh dukungan massa guna kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Di Balkan misalnya, peran pemimpin Yugoslavia, Slobodan Milosevic dan Franjo Tudjman, dalam membakar semangat primordial/etnisitas orang-orang Serbia untuk membentuk kelompok-kelompok paramiliter dalam menekan gerakan separatis Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Kosovo sangat besar di dalam memperbesar skala/intensitas konflik di kawasan tersebut. Sementara itu di Afrika, sentimen-sentimen primordial yang sengaja disebarkan oleh para pemimpin seperti FW. De Klerk (Afrika Selatan), Laurent Kabila (Zaire), Foday Sankoh (Sierra Leone), Robert Mugabe (Zimbabwe), dan lain-lain ikut memperumit konflik yang tengah berkecamuk (Snyder, 2000). Bentuk eksploitasi kaum elite terhadap massa yang plural dapat terdiri atas beraneka macam bentuk, seperti misalnya, diskriminasi yang mengistimewakan kaum mayoritas dan menindas kaum minoritas mendefinisikan partisipasi politik berdasarkan pembagian etnis atau agama tertentu; menyebarkan kebencian terhadap golongan tertentu secara terbuka di media massa; atau bahkan dengan cara membentuk satuan-satuan pembantaian seperti misalnya kelompok-kelompok inter-ahamwe di Rwanda ketika "menghabisi" suku Hutu (Miall, et.al., 1990:90). Maka tidak dapat diragukan bahwa ambisi pribadi elite ikut berperan dalam memicu berbagai konflik yang mengakibatkan beban penderitaan bagi jutaan umat manusia.

## **6. Konflik Primordial**

Di luar dari apa yang telah dipaparkan di atas, konflik dalam berbagai kasus juga dapat terjadi dan meletup akibat pola primordial, seperti ras, etnis, agama, dan bahasa. Leo Agustino (2004) menjelaskan dengan rinci tentang pola terjadinya konflik primordial. Pertama, konflik primordial yang terkait hubungan darah, yaitu suatu komunitas yang

diikat oleh hubungan biologis/darah (kekeluargaan dan/atau kekerabatan) di mana setiap individu di dalamnya mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu keluarga besar perikatan semacam ini lebih mudah ditemui di masyarakat Afrika dan Asia. Berbagai konflik lokal di kawasan tersebut seringkali dipicu oleh hubungan darah.

Kedua, konflik primordial yang dihubungkan dengan persoalan ras, suatu komunitas yang dipersatukan oleh kesamaan etno-biologis yang ditampilkan dalam ciri-ciri fisik yang sama, seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk wajah, dan lain-lain. Berdiasporanya kelompok ras tertentu –Cina di Indonesia dan Malaysia, India dan Yahudi di Inggris, serta Afrika di Amerika Serikat –(yang) menempatkan mereka sebagai kelompok minoritas di negara-negara tertentu seringkali memicu berbagai konflik rasial.

Ketiga, konflik primordial yang terkait dengan hubungan agama: persoalan agama merupakan sumber konflik yang cukup krusial di berbagai kawasan dunia. Partisi antara India Pakistan pada dekade 1950-an merupakan contoh paling jelas dari konflik agama terjadi di berbagai kawasan di Asia, seperti India (Hindu vs. Muslim atau Hindu vs. Shikh), Filipina (pemerintah vs. separatis Moro), dan Indonesia (Kristen vs. Muslim).

Keempat, konflik primordial yang di hubungkan dengan wilayah. Ikatan yang didasarkan atas kesamaan wilayah seringkali merupakan salah satu sumber konflik-baik dalam masyarakat pluralis maupun dalam masyarakat yang homogen. Fanatisme kedaerahan yang dimiliki kelompok tertentu biasanya berkembang menjadi semangat kedaerahan (nasionalisme lokal) yang sempit dengan diwarnai oleh setereotype terhadap para pendatang dari daerah lain dalam masyarakat pluralis seperti Indonesia dan India, misalnya, semangat kedaerahan seringkali memicu konflik regional (intra state conflict).

Kelima, konflik primordial yang dihubungkan dengan ikatan adat- istiadat. Suatu komunitas dapat juga diikat berdasarkan persamaan kebiasaan dan norma-norma yang dianut. Di dalam praktik kehidupan sehari-hari konflik adat-istiadat seringkali terjadi menyertai konflik etnis dan wilayah wilayah karena pihak-pihak yang terlibat di dalamnya biasanya mempersoalkan perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan adat/budaya. Dalam suatu masyarakat yang terdiri dari mayoritas dan minoritas, kaum mayoritas biasanya mendominasi norma dan nilai yang berlaku sehingga membuat “kebiasaan” kaum minoritas menjadi ter subordinasi. Walaupun kita jarang menemukan peperangan

yang dipicu hanya oleh persoalan adat-istiadat tetapi faktor ikatan adat-istiadat dapat membuat suatu konflik menjadi dahsyat dan lebih rumit.

Keenam, konflik primordial yang dihubungkan dengan ikatan bahasa walaupun bahasa seringkali berfungsi sebagai sumber pengikat persatuan suatu komunitas tetapi bahasa dapat juga berperan sebagai sumber konflik seperti yang terjadi di Afrika dan Asia Selatan (India, Pakistan, dan Sri Lanka). pemaksaan kelompok etnis tertentu sebagai bahasa nasional biasanya menimbulkan ketidakpuasan dari kelompok etnis lain yang tidak jarang berkembang menjadi konflik kekerasan.

## 7. Membangun Kehidupan Multikulturalism

Deferensiasi dan stratifikasi sosial di satu sisi memang mudah tergelincir dan dimanipulasi hingga melahirkan disorganisasi sosial. Tetapi, di sisi yang bersamaan adanya deferensiasi sosial sebenarnya juga tidak berarti akan selalu berubah menjadi konflik bilamana masyarakat pandai-pandai mengatur dan menjaganya.

Studi yang dilakukan Nasikun (1984) —seorang pakar sosiologi dari Universitas Gajah Mada— menemukan ada dua faktor yang menyebabkan konflik di dalam masyarakat yang pluralistis tidak meletup menjadi konflik yang terbuka, yakni: *cross-cutting affiliations* dan *cross-cutting loyalties*.

Menurut Nasikun, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi oleh karena berbagai-bagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (*cross-cutting affiliations*). Mengapa? Oleh karena dengan demikian setiap konflik yang terjadi di antara kelompok sosial dengan kelompok sosial lain segera akan dinetralisir oleh adanya loyalitas ganda (*cross-cutting loyalties*) dari para anggota masyarakat terhadap berbagai-bagai kelompok sosial.

Konflik antar suku-bangsa, misalnya akan segera direduksi oleh bertemunya loyalitas agama atau daerah. Perselisihan antara golongan yang berbeda etnis, dalam banyak kasus bisa diredam atau bahkan dihilangkan bila pihak-pihak yang berselisih memiliki persamaan dalam agama yang dianut atau berasal dari wilayah yang sama.

Di Indonesia, sejarah telah banyak membuktikan bahwa karena struktur dan loyalitas masyarakat Indonesia yang bersifat silang-menyilang telah menjadi landasan mengapa masyarakat Indonesia tetap relatif stabil dari masa ke masa, kendati beberapa

kali kita sering diuji dengan berbagai kerusuhan dan cobaan. Tanpa adanya keanggotaan dan loyalitas yang bersifat silang-menyilang, niscaya adanya deferensiasi sosial akan menjadi benih yang cepat atau lambat bisa mengganggu integrasi nasional yang telah dengan susah-payah kita bina selama ini.

Ibarat Malin Kundang, sikap yang tidak mengakui multikultural dan perbedaan sesungguhnya tak ubahnya seperti anak yang mendurhakai kelahirannya sendiri. Kekeragaman sosial, kehidupan harmoni dan kerukunan pada dasarnya adalah sebuah mosaik yang disusun dari perca-perca perbedaan. Oleh sebab itu, seorang anak yang sejak dini dididik untuk menyadari perbedaan, niscaya yang terjadi bukanlah konflik-konflik yang *manifest* atau pertengkaran, tetapi justru yang akan lahir adalah rasa toleransi dan kesadaran untuk menerima bahwa dalam kehidupan nyata selalu ada wilayah yang mesti dibagi dengan pihak lain.

Menurut Harold Coward (1999), klaim-klaim kebenaran (*truth claim*) dan klaim keselamatan (*salvation claim*), ditambah doktrin agama yang sempit, niscaya akan mengental menjadi ideologi —yang dalam banyak hal justru mendorong tumbuhnya sikap fanatisme yang berlebihan. Sementara itu, kesadaran akan pluralisme, dan kesediaan untuk berbagi ruang dengan pihak lain, niscaya akan melahirkan rasa toleransi yang pada dasarnya merupakan kunci untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara (\*).

## **BAB 3**

### **TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **1. Tujuan**

Tujuan kegiatan ini pada dasarnya adalah:

1. Memetakan potensi *latent* yang dapat memicu gesekan sosial, dan sekaligus mengidentifikasi potensi pranata lokal yang terbukti fungsional dalam menciptakan keserasian sosial di masyarakat di Provinsi Jawa Timur.
2. Merumuskan arah kebijakan dan program prioritas untuk membangun keserasian sosial bagi masyarakat di Provinsi Jawa Timur.
3. Merumuskan model *social early warning system* untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat Provinsi Jawa Timur.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Pasca reformasi, salah satu persoalan yang menghantui dan sempat mengancam disintegrasi bangsa adalah terjadinya kerusuhan dan konflik sosial yang melanda ke berbagai wilayah. Konflik sosial yang timbul, bukan saja dipicu karena kecemburuan sosial atau konflik yang berbasis perbedaan material, tetapi juga konflik yang sifatnya horisontal.

Studi ini penting dilakukan, dalam rangka menemukan model pencegahan dini agar konflik sosial yang potensial muncul di masyarakat dapat diredam dan tidak eksplosif. Studi ini mendesak dilakukan karena: (1) konflik sosial yang terlanjur manifest cenderung menimbulkan kerugian yang besar dan sulit untuk dikembalikan seperti semula, dan (2) karena demokrasi yang dibangun di atas syakwasangka dan potensi konflik yang memanas dikhawatirkan akan melahirkan hasil yang kontra-produktif.

Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi model yang dikembangkan untuk mengelola potensi konflik agar tidak berkembang destruktif, dan sekaligus sebagai mekanisme yang realitis untuk mengembangkan hubungan keserasian sosial yang benar-benar kokoh (\*).

## **BAB IV**

### **Metode Penelitian**

Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk memetakan kondisi keserasian sosial, dan sekaligus menyusun model *social early warnign system* untuk mencegah terjadinya konflik yang eksplosif dan sekaligus meningkatkan keserasian sosial dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan di Provinsi Jawa Timur.

Lokasi studi ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu Provinsi yang menjadi barometer bagi dinamika kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat di Indonesia, studi ini memiliki arti penting sebagai peta awal sekaligus acuan untuk menyusun kebijakan dan program pengembangan keserasian sosial di berbagai kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Agar bisa diperoleh hasil yang benar-benar maksimal, secara rinci, langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah:

Pertama, melakukan *review* terhadap berbagai kajian dan penelitian tentang keserasian sosial, pergesekan dan konflik, khususnya yang terjadi di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur pada khususnya. *Review* ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor teoritik yang mempengaruhi dinamika sosial dan kondisi keserasian sosial di masyarakat.

Kedua, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data terbaru tentang kondisi keserasian sosial di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur. Dalam penelitian ini, data sekunder tentang keserasian sosial ini telah dicoba dilacak melalui media massa. Selain itu, dalam kegiatan ini, pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan cara melacak data dari Bakesbanglinmas, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil pelacakan di media massa, studi ini telah berhasil mengidentifikasi beberapa problema dan bentuk konflik yang sempat mencuat di media massa, yaitu konflik antara kekuatan komersial dan penduduk lokal yang terjadi di Pasuruan berkaitan dengan kegiatan industrialisasi dan konflik tanah yang terjadi Kabupaten Malang. Selain itu konflik berdasarkan ideologis/agama sempat pecah di kabupaten Situbondo. Sementara konflik horisontal seperti persoalan dukun santet sempat pecah di kabupaten Banyuwangi. Konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah ini, sempat menjadi itu



yang berkepanjangan dan menyita perhatian media massa. Oleh sebab itu, dalam studi ini konflik-konflik tersebut akan dianalisis tersendiri dan menjadi bagian dari data yang memperkaya temuan data dari hasil pelacakan langsung ke lapangan.

Ketiga, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data primer yang digali langsung dari sejumlah informan yang ditemui di berbagai kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Untuk memperoleh gambaran tentang potensi pranata lokal yang memiliki peran dalam menciptakan dan menjaga keserasian sosial, studi ini secara *purposive* telah menetapkan 4 kabupaten/kota sebagai lokasi penelitian, yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Wawancara dipandu *interview guide* yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Data yang digali, lebih banyak berupa data kualitatif yang mendalam untuk memetakan situasi problematik yang timbul dan akar historis dari berbagai persoalan keserasian sosial yang timbul di masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Wawancara mendalam dilakukan kepada sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa, serta berbagai pihak yang terkait. Di masing-masing kota/kabupaten, jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 15 informan. Wawancara mendalam ini penting dilakukan untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi akar masalah dari berbagai konflik sosial yang terjadi di masyarakat di sekitar mereka.

Seluruh data yang dikumpulkan, setelah dilakukan pemilahan menurut aspek yang telah dirinci, telah dicoba dianalisis lebih lanjut dengan cara membandingkan dengan kajian lain yang selama ini sudah dilakukan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Sepanjang memungkinkan, data telah dicoba ditampilkan dalam bentuk matriks untuk mempermudah pembaca memahami masalah yang dipaparkan.

Di akhir laporan, selain dirumuskan kembali temuan-temuan pokok hasil studi dan isu prioritas di seputar persoalan keserasian sosial di masyarakat, juga dicoba dikemukakan sejumlah kebijakan dan model *social early wrning system* yang diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun program intervensi untuk meningkatkan keserasian sosial di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur di tahun-tahun mendatang (\*).

# **BAB V**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sumber, Pemicu Dan Eksistensi Konflik: Temuan Lapangan**

Dalam bagian ini dipaparkan temuan-temuan lapangan tentang dinamika sosial yang berbentuk konflik baik latent maupun manifest yang terjadi di lokasi penelitian yaitu di kabupaten Malang, Situbondo, Pasuruan dan Banyuwangi. Konflik yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya masalah sosial, ekonomi, budaya maupun agama.

Kasus konflik yang berlatar belakang agama sempat mencuat di Situbondo. Kasus ini mencuat dipicu oleh seseorang yang dianggap menghina agama Islam. Karena masyarakat sudah emosi dan tak terkendali maka terjadi pengerusakan bahkan pembakaran gereja-gereja yang berada di Situbondo. Dalam kasus ini tidak hanya membawa korban harta yang tidak sedikit tetapi juga nyawa, salah satunya penghuni rumah (pendeta) yang menyatu dengan gereja.

Kasus konflik yang berlatar ekonomi (perebutan tanah) di Jawa Timur sebenarnya banyak terjadi tidak hanya di wilayah Kabupaten Malang. Salah satu kasus tanah yang sempat menjadi berita nasional adalah Jenggawah di Jember. Di luar itu masih banyak kasus-kasus tanah yang terjadi. Konflik tanah ini dipicu oleh sengketa mengenai penguasaan maupun pemilikan tanah antara masyarakat dengan pihak Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut, pihak PTPN dan KPH. Pihak masyarakat merasa memiliki hak baik menguasai maupun memiliki atas dasar historis sementara pihak lain yang bersengketa juga memiliki bukti formal atas penguasaan tanah.

Dalam bab ini akan diuraikan temuan-temuan lapangan di berbagai daerah yang dijadikan obyek penelitian ini. Obyek penelitian dilakukan di kabupaten Malang, Situbondo, Banyuwangi dan Pasuruan.

## 1.1. Kasus Konflik Tanah di Kabupaten Malang Selatan.

Sengketa tanah di kabupaten Malang dengan pihak tentara terjadi di 4 (empat) tempat. Dua tempat yaitu di Lanud Abd. Saleh dan ke Sumberpucung dengan pihak Angkatan Udara. Dua tempat yaitu di desa Ringin Kembar dan Harjokuncaran masing-masing di kecamatan Sumbermanjing bersengketa dengan pihak Angkatan Darat. Satu tempat di Desa Dukuh Jubel kecamatan Bantur bersengketa dengan Angkatan Laut.

Sementara sengketa tanah dengan pihak perusahaan ada lima kasus, empat kasus dengan perkebunan negara (PTPN) dan satu kasus dengan perkebunan swasta. Sengketa tanah dengan perkebunan negara (PTPN) terjadi di desa Tirtoyudo, kecamatan Tirtoyudo, desa Simojayan, kecamatan Ampelgading, desa Kepatihan kecamatan Dampit. Sedangkan kasus sengketa tanah dengan pihak perusahaan swasta yaitu perkebunan Sumber Manggis terjadi di desa Jogomulyan kecamatan Tirtoyudo.

Kasus sengketa tanah dengan pihak Perhutani (Kesatuan Pemangku Hutan-KPH) terjadi di 6 (empat) tempat, yaitu desa Junggo, Tulungrejo dan Sumber Brantas kecamatan Bumiaji, Desa Kalipare kecamatan Kalipare, desa Taman Satriyan dan Wonoayu kecamatan Wajak.

Dalam laporan ini tidak semua sengketa tanah yang terjadi di kabupaten Malang diteliti tetapi hanya beberapa kasus yang terjadi di wilayah Selatan, yaitu, kecamatan Tirtoyudo.

### 1.1.1. Intensitas dan Area Konflik

Konflik tanah di daerah Malang Selatan pada dasarnya merupakan persoalan yang telah lama ada. Namun baru muncul kepermukaan dengan perlawanan yang terbuka baru terlihat sejak tanggal 25 Desember tahun 1997. Perlawanan warga desa Simojayan yang diwujudkan dengan membabati tanaman kako, kopi, cengkeh dan sengon diawali di Afdeling Petungombo di desa Simojayan kecamatan Ampelgading. Di desa ini lahan yang dibabat warga desa mencapai 240 hektar.

Aksi perlawanan desa Simojayan ini mengilhami desa-desa lainnya yang sebelumnya telah memiliki persengketaan dengan pihak perkebunan. Aksi warga ini seakan mendapatkan tenaga baru ketika era reformasi merebak. Aksi reformasi yang terus bergulir seakan menjadi justifikasi bahwa apa yang dilakukan warga desa dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga

melakukan pembabatan dalam upaya memperoleh hak-hak garap tanah yang telah lepas sejak lama

Konflik secara terbuka dan cenderung saling berhadapan langsung berawal dari aksi warga desa Simojayan. Aksi secara terbuka dengan membat pohon yang ada di areal perkebunan seperti kakao atau kopi ternyata mengilhami desa-desa lainnya yang memiliki persoalan yang sama, yaitu sengketa tanah dengan pihak perkebunan maupun tentara.

Pada tanggal 14 Juni 1998 warga desa sekitar perkebunan Kalibakar, yaitu tepatnya di desa Tlogosari kecamatan Tirtoyudo dengan membabi buta membat tanaman kakao, kopi, cengkeh dan pohon kelapa. Selama 3 (tiga) hari aksi warga itu telah membat seluas 198,76 hektar (lihat lampiran 24).

Selang dua bulan berikutnya, tepatnya tanggal 23-25 Agustus 1998, terjadi pembabatan serupa di kawasan Banongan, Kepatihan dan Tirtoyudo kecamatan Tirtoyudo. Akibat aksi warga tak kurang puluhan hektar tanaman kakao tumbang ditebas senjata warga

Pada tanggal 17 Oktober 1999 jam 01.00 WIB, warga desa Jogomulyan melakukan aksi yang sama dengan melakukan pembabatan pohon kakao dan karet. Pada hari itu sekitar 1.000 petani secara serentak melakukan pembabatan yang mengakibatkan lahan seluas 500 hektar lahan milik PT. Sumber Manggis ludes. Aksi warga tidak sampai disitu, selain membat habis tanaman kakao dan karet warga kemudian membakar pabrik pengolahan hasil bumi tersebut. Kemudian mereka beramai-ramai mengambil inventaris pabrik seperti pupuk, kayu dan beberapa mesin dipreteli kemudian di bawa pulang.

Kendati sama-sama konflik masalah tanah, dalam perkembangannya mengalami perbedaan. Ada yang menempuh jalan frontal dengan cara merebut lahan yang disengketakan kemudian membaginya kepada penduduk seperti di desa Simojayan. Tetapi ada yang terus melakukan perjuangan dengan cara mengadu ke berbagai pihak. Misalnya ke DPRD, DPR atau pihak-pihak lain yang diperkirakan dapat membantu penyelesaian sengketa tanah yang dihadapi penduduk. Seperti misalnya kasus tanah yang terdapat di Harjokuncaran. Warga desa ini terus melakukan upaya baik ke menteri

maupun ke Presiden mereka lakukan untuk memperoleh kepastian pengembalian tanah yang dikuasai Angkatan Darat.

### **1.1.2. Sejarah Sengketa Tanah**

Sejarah tanah di sini menguraikan riwayat status tanah yang dirangkum dari berbagai sumber. Terutama sumber-sumber yang selama ini telah memperjuangkan tanah yang diyakini memiliki hak atas tanah yang disengketakan. Sumber primer masalah riwayat ini berasal dari tokoh-tokoh masyarakat yang telah menjadi saksi hidup sejarah penguasaan tanah yang belakangan secara de facto banyak dikuasai warga masyarakat.

Pada jaman penjajahan Kolonial Belanda, lahan perkebunan di Desa Kepatihan (perkebunan Kalibakar) dikelola oleh Belanda, merupakan perkebunan karet dan kopi seluas ± 685 ha - dengan penduduk desa dan sekitarnya sebagai tenaga kerja kasar yang diupah murah. Perkebunan ini dikenal sebagai perkebunan Banjarsari(: sekarang Kepatihan).

Ketika Belanda tidak lagi berkuasa. Jepang mengambil alih mengelola tanah ini. Atas perintah Jepang, rakyat membongkar kebun karet dan kopi dan menggantinya dengan tanaman rami dan jarak yang hasilnya wajib diserahkan kepada Jepang, serta tanaman jagung, singkong dan kopi yang hasilnya boleh dinikmati rakyat setelah sebagian dari hasilnya disetor ke Jepang.

Pada tahun 1944 Jepang sudah tidak lagi meminta setoran kepada rakyat dari hasil pertanian. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, rakyat Desa Kepatihan dan sekitarnya berhasil merebut perkebunan eks. Belanda dari tangan Jepang. Seluruh area perkebunan yang telah dikuasai kemudian ditanami tanaman pangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh masyarakat.

Selama 1947 - 1948, rakyat menghimpun kekuatan untuk melawan Belanda yang ingin menguasai kembali perkebunan beserta seluruh aset-asetnya. Pada masa ini, para pimpinan tentara dan sipil daerah membentuk desa-desa perkebunan menjadi desa-desa darurat sebanyak 20 desa, lengkap dengan struktur pemerintahan kepala desa dan batas-batas desa.

Pada tahun 1947, Pramudiardjo terpilih sebagai kepala desa Kepatihan dan Sukri sebagai cariknya. Masyarakat masih menanam area perkebunan. Pada awal 1945, para Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga

pejuang membantu agar Belanda tidak menguasai kembali perkebunan dengan melakukan politik bumi hangus terhadap aset-aset peninggalan Belanda, seperti : perumahan, pabrik, kantor-kantor dan lainnya.

Pada akhir tahun 1949, perang Belanda - Indonesia berakhir. Setelah itu diadakan Konferensi Meja Bundar yang mengagendakan perjanjian Renville dan Linggarjati. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan bahwa milik Belanda yang ada di Indonesia yang kontraknya belum habis tetap dikelola Belanda, terutama di perkebunan kopi. kepetulan di Desa Kapatihan kontrak Belanda kurang 3 tahun.

Pada tahun 1949 Belanda tetap ingin menguasai kembali perkebunan dengan alasan meneruskan kontrak. Namun para pejuang dan rakyat menolak dan tanah tetap dikelola oleh masyarakat.

Pada tahun 1950 Kepala desa Pramudiardjo mengadakan rapat penduduk. Ia menekankan kepada rakyat agar tanah yang dikuasai diserahkan kembali kepada Belanda -yang merasa kontrak mengelola perkebunan belum habis. Selanjutnya Belanda berjanji akan menyerahkan kembali tanah kepada masyarakat yang menggarap tanah tersebut. Bagi petani penggarap yang bersedia menyerahkan tanah kepada Belanda diberikan uang sebesar Rp. 1,00 dan kain kaspur sepanjang 3 meter. Masyarakat terpaksa menyerahkan tanah karena takut dimana bila tidak menyerahkan akan diancam oleh kepala desa.

Pada tahun 1952 Belanda mulai menggarap lahan perkebunan dengan tanaman kopi dan karet, dan masyarakat menjadi tenaga kasarnya. Sementara untuk hasil sepenuhnya menjadi milik Belanda. Namun ada sebagian kecil masyarakat yang tidak mau menggarap lahan untuk Belanda, dan sampai sekarang tetap menjadi hak milik yang bersangkutan.

(Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, diketahui bahwa tanah rakyat yang berlokasi di Desa Kapatihan, Desa Tirtoyudo, Desa Simojayan dan Desa Telogosari Dukuh Tumpak Lengkong, Desa Sumber Tangkil merupakan perkebunan kopi seluas 1.600 ha yang dikontrak oleh Belanda pada tahun 1951. Selanjutnya dikuasai oleh PTP XXIII Kalibakar (sekarang PTPN XXII), yang lokasinya ada di tengah-tengah pemukiman penduduk desa tersebut di atas)

Pada tahun ini, Belanda datang lagi ke Kapatihan dengan maksud tanah kebun kopi yang digarap rakyat dan tanah untuk bengkok pamong desa dicabut kembali. dengan



kata-kata yang disampaikan langsung dan didengar oleh rakyat Kepatihan : "...Belanda hanya akan mengelola selama 3 (tiga) tahun, sesudah itu akan dikembalikan lagi kepada rakyat." Kata-kata itu diungkapkan oleh: Tuan Roben, Krak dan Polser.

Menginjak tahun 1952 Belanda tetap mengerjakan lahan perkebunan dan hasilnya sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Masyarakat tetap sebagai tenaga penggarap. Pola semacam ini hingga sampai tahun 1957. Pada tahun 1958 , yaitu ketika selesai kontrak dari Belanda, kebun tidak kembali kepada rakyat tetapi justru dikuasai oleh PTP tanpa persetujuan dengan rakyat terlebih dahulu.

Pada tahun 1960 dikeluarkannya UU Landeform Nomor 59 tahun 1060 PP 224 tahun 1961. Peraturan Pemerintah tahun 1960 pasal 1 berbunyi :

"Tanah yang dikuasai oleh pemerintah yang digarap oleh rakyat sebelum tahun 1960 adalah : (1) Tanah bekas ondememing/bekas tanah perkebunan, (2) Tanah bekas kehutanan dapat direstribusikan kepada penggarap."PTP menguasai lahan dengan ditanami coklat, kelapa, cengkeh, pisang, kayu manis dan tanaman-tanaman lainnya dan masyarakat dengan terpaksa tidak ada yang berani meminta karena takut dianggap pengacau, melanggar aturan negara. Namun sebenarnya masyarakat tetap tidak terima dan ingin menguasai kembali tanahnya.

Tahun 1967 tiap-tiap tritunggal Kecamatan Ampelgading mengadakan rapat penduduk di desa-desa, memberikan penjelasan dan penegasan bahwa rakyat harus ikut membantu keamanan perkebunan Kalibakar. Siapa yang mempersoalkan dan merusak tanaman di perkebunan akan dianggap sebagai PKI. Sehingga warga yang mau menuntut pemerintah dan untuk menarik kembali tanah kebun kopi yang dikuasai PTP menjadi takut.

Upaya-upaya sering dilakukan oleh masyarakat melalui prosedur tetapi belum pernah mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu masyarakat tidak tahu bagaimana cara-cara untuk mengurusnya.

Tahun 1970, masyarakat Desa Kepatihan berusaha menarik kembali tanah kebun kopi yang luasnya ± 685 ha yang digarap rakyat mulai jaman Jepang sampai tahun 1951 yang dikontrak oleh Belanda. Tetapi masyarakat merasa takut bila mengingat akan pemberian cap PKI bila meneruskan upayanya.

Baru pada tahun 1992, tanpa pemberitahuan kepada warga masyarakat dan petani penggarap, secara sepihak PTP XXIII (PTPN XII) telah mengajukan sertifikat HGU kepada BPN – tanpa persetujuan petani penggarap dan kepala desa. Padahal menurut ketentuan perundang-undangan, seharusnya pihak PTP memberi tahu terlebih dahulu kepada petani penggarap karena mereka adalah penggarap pertama pada tahun 1945.

Pada tahun 1997, PT Perkebunan Nusantara XII Persero memberikan lahan tidur untuk digarap oleh rakyat dan ditanami jagung serta singkong. Ini dikarenakan PTPN XII Persero sudah tidak mampu lagi untuk meningkatkan hasil komoditinya dan tidak mampu lagi membiayai perusahaannya, yang mengarah kepada kebangkrutan.

Pada bulan Agustus tahun 1998, tanaman PTPN XII telah dikuasai kembali oleh masyarakat dan petani penggarap. Masyarakat pun tidak mau lagi dan keberatan untuk diajak kerja sama sebagai mitra kerja PTP karena petani merasa mempunyai hak untuk dapat mengajukan hak milik.

### 1.1.3. Kekuatan Sosial Yang Turut Mendukung Munculnya Konflik

Kekuatan sosial yang dominan dari penduduk adalah mereka-mereka yang sejak lama memperjuangkan kepentingan warga desa untuk memperoleh kembali hak garap yang sudah lama diambil pihak lain. Kelompok warga desa yang tergolong kritis ini tidak saja bergaul dengan sesama penduduk desa setempat, tetapi telah membentuk dan bergaul dengan penduduk di luar Malang tetapi mengalami nasib hampir sama yaitu memperjuangkan masalah tanah. Misalnya mereka bergabung dengan PAPANJATI (Paguyupan Tani Jawa Timur).

Organisasi ini berdiri pada tanggal 3 September 1998, setelah memperingati hari UUPA dengan cara berdemonstrasi di DPRD Tingkat I Jawa Timur. Keanggotaan PAPANJATI umumnya berasal dari para petani yang sedang menghadapi masalah sengketa tanah baik dengan swasta maupun pemerintah.

Dalam perkembangannya PAPANJATI telah tersebar di 11 kabupaten, yaitu Kediri Blitar, Malang, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bangkalan, Sumenep, Lumajang dan Sampang. Beberapa daerah yang terjadi sengketa tanah antara lain Curah Nongko Kabupaten Jember, Wonoagung kecamatan Ampel Gading, desa Tlogosari kecamatan Tirtoyudo, desa Tirtoyudo kecamatan Tirtoyudo, desa kepatihan

kecamatan Tirtoyudo, desa Bumiredjo kecamatan Dampit, daerah-daerah ini terdapat di kabupaten Malang. Kemudian dusun Gambar desa Sumber sari kecamatan Nglegok Blitar. Daerah Pandanwangi Pasuruan, Rangkas Pawon Kediri, Jengawah Jember dan beberapa daerah lainnya.

Karena menghadapi sengketa tanah itu petani berusaha untuk menuntut hak-haknya kembali. Pada saat itulah salah satu upaya yang dilakukan adalah minta bantuyuan kepada LBH. Respon LBH sebagai lembaga bantuan hukum membela *kawula alit* sangat positif. Bantuan yang diberikan tidak hanya litigacy atau pembelaan hukum di pengadilan tetapi juga upaya pemberdayaan masyarakat berupa rangsangan tumuhnya kesadaran kritis. Salah satu bentuk kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran itu adalah sekolah rakyat. Aktifitasnya adalah berdiskusi diantara petani sendiri tentang segala persoalan yang dihadapi. Termasuk merencanakan aksi demo kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Tak segan-segan PAPANJATI menghadap presiden untuk menuntut haknya.

Untuk memperkuat dalam kelompok tani, aktifitas yang bermuatan bagaimana cara mengorganisasikan diri sehingga memiliki posisi tawar yang kuat juga dilakukan. Pelatihan-pelatihan ini biasanya dilakukan LBH dengan materi kewarganegaraan, pengorganisasian dan cara-cara strategis terutama mengetahui posisi haknya dalam kerangka hukumnya. Mengetahui celah-celah hukum yang berkaitan dengan pertanahan sehingga mengetahui secara benar apakah hukum itu telah benar atau masih memiliki cacat.

Bantuan LBH bagi warga di rasakan sangat mendukung dan menambah kekuatan bagi petani sendiri. disamping pengetahuan akan hukum semakin luas, petani memiliki jaringan diantara kaum tani sendiri. Ketika jaringan ini terbentuk persalahan yang dihadapi petani tidak selalu diselesaikan LBH tetapi petani berusaha menyelesaikannya sendiri.

LBH biasanya kan membantu hal-hal yang tidak bisa dilakukan petani dan di sisi lain petani sendiri meminta bantuannya. Karena itu selain upaya penyadaran hukum kritis pada umumnya LBH menempatkan posisi pada penyediaan berupa fasilitas misalnya tempat diskusi atau pendamping melakukan aksi. Perannya hanya sebatas pendamping, upaya penyelesaian dilakukan petani sendiri.

Strategi ini dilakukan dengan alasan, petani belajar menyelesaikan masalah sendiri sehingga kemampuan untuk menuntut hak-hak muncul dan tumbuh dari kalangannya sendiri. Ini strategi yang diharapkan LBH sehingga setiap permasalahan tidak harus diselesaikan oleh pihak lain. Tujuan akhirnya petani memiliki kemandirian sehingga tidak tergantung pada pihak lain.

Menurut anggota PAPANJATI, keberadaan LBH sangat membantu menumbuhkan kesadaran dan keberanian untuk menuntut hak-haknya. Bahkan keberhasilan perjuangan menuntut haknya di beberapa daerah seperti sebagian di jember telah menjadi pendorong amat kuat petani di daerah lain untuk menuntut haknya.

Kegiatan PAPANJATI berkembang tidak hanya menuntut haknya semata tetapi juga mengkritisi kebijakan birokrasi yang berkaitan dengan rakyat. Misalnya mengkritisi surat gubernur yang meminta aparat keamanan Kapolda dan Pangdam untuk melakukan pengamanan di perusahaan perkebunan. Karena akibat surat itu terjadi penangkapan di pihak petani di wilayah Rangkas Pawon Kediri. Hasil dari perjuangan melalui demonstrasi di DPRD Jatim dan Kantor Gubernur adalah sikap lunak untuk menyelesaikan dan mengeluarkan petani yang ditangkap.

Kelompok ini yang cukup memiliki andil besar dalam perjuangan warga di daerah Malang Selatan. Sebelum era reformasi memang kekuatan militer merupakan salah satu kekuatan yang berpengaruh di Malang Selatan khususnya di desa Harjokuncaran. Di desa ini memang konflik tanah terjadi antara warga desa setempat dengan Angkatan Darat. Di daerah ini pula terjadi pengaplingan tanah yang diperuntukkan bagi perwira tinggi dan menengah. Terhadap fakta seperti ini warga desa tidak dapat berbuat banyak untuk menghalangi apalagi mencegah. Tragisnya lagi kaplingan untuk perwira tersebut dibiarkan bahkan ada yang dijualbelikan. Ada juga yang ditempat tanah kapling itu didirikan bangunan tetapi tidak dihuni. Fakta ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan warga sekitarnya. Di satu sisi banyak warga desa tidak memiliki lahan garapan tetapi disisi lain ada tanah di sekitarnya dibiarkan tanpa dikelola dan dimanfaatkan.

Kekuatan sosial yang dominan dari penduduk adalah mereka-mereka yang sejak lama memperjuangkan kepentingan warga desa untuk memperoleh kembali hak garap yang sudah lama diambil pihak lain. Kelompok warga desa yang tergolong kritis ini

tidak saja bergaul dengan sesama penduduk desa setempat, tetapi telah membentuk dan bergaul dengan penduduk di luar Malang tetapi mengalami nasib hampir sama yaitu memperjuangkan masalah tanah. Misalnya mereka bergabung dengan PAPANJATI (Paguyupan Tani Jawa Timur).

Organisasi ini berdiri pada tanggal 3 September 1998, setelah memperingati hari UUPA dengan cara berdemonstrasi di DPRD Tingkat I Jawa Timur. Keanggotaan PAPANJATI umumnya berasal dari para petani yang sedang menghadapi masalah sengketa tanah baik dengan swasta maupun pemerintah.

Dalam perkembangannya PAPANJATI telah tersebar di 11 kabupaten, yaitu Kediri Blitar, Malang, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bangkalan, Sumenep, Lumajang dan Sampang. Beberapa daerah yang terjadi sengketa tanah antara lain Curah Nongko Kabupaten Jember, Wonoagung kecamatan Ampel Gading, desa Tlogosari kecamatan Tirtoyudo, desa Tirtoyudo kecamatan Tirtoyudo, desa kepatihan kecamatan Tirtoyudo, desa Bumiredjo kecamatan Dampit, daerah-daerah ini terdapat di kabupaten Malang. Kemudian dusun Gambar desa Sumber sari kecamatan Nglegok Blitar, Daerah Pandanwangi Pasuruan, Rangkas Pawon Kediri, Jengawah Jember dan beberapa daerah lainnya.

Karena menghadapi sengketa tanah itu petani berusaha untuk menuntut hak-haknya kembali. Pada saat itulah salah satu upaya yang dilakukan adalah minta bantuan kepada LBH. Respon LBH sebagai lembaga bantuan hukum membela *kawula alit* sangat positif. Bantuan yang diberikan tidak hanya litigasi atau pembelaan hukum di pengadilan tetapi juga upaya pemberdayaan masyarakat berupa rangsangan tumbuhnya kesadaran kritis. Salah satu bentuk kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran itu adalah sekolah rakyat. Aktifitasnya adalah berdiskusi diantara petani sendiri tentang segala persoalan yang dihadapi. Termasuk merencanakan aksi demo kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Tak segan-segan PAPANJATI menghadap presiden untuk menuntut haknya.

Untuk memperkuat dalam kelompok tani, aktifitas yang bermuatan bagaimana cara mengorganisasikan diri sehingga memiliki posisi tawar yang kuat juga dilakukan. Pelatihan-pelatihan ini biasanya dilakukan LBH dengan materi kewarganegaraan, pengorganisasian dan cara-cara strategis terutama mengetahui posisi haknya dalam

kerangka hukumnya. Mengetahui celah-celah hukum yang berkaitan dengan pertanahan sehingga mengetahui secara benar apakah hukum itu telah benar atau masih memiliki cacat.

Bantuan LBH bagi warga di rasakan sangat mendukung dan menambah kekuatan bagi petani sendiri. disamping pengetahuan akan hukum semakin luas, petani memiliki jaringan diantara kaum tani sendiri. Ketika jaringan ini terbentuk permasalahan yang dihadapi petani tidak selalu diselesaikan LBH tetapi petani berusaha menyelesaikannya sendiri.

LBH biasanya kan membantu hal-hal yang tidak bisa dilakukan petani dan di sisi lain petani sendiri meminta bantuannya. Karena itu selain upaya penyadaran hukum kritis pada umumnya LBH menempatkan posisi pada penyediaan berupa fasilitas misalnya tempat diskusi atau pendamping melakukan aksi. Perannya hanya sebatas pendamping, upaya penyelesaian dilakukan petani sendiri.

Strategi ini dilakukan dengan alasan, petani belajar menyelesaikan masalah sendiri sehingga kemampuan untuk menuntut hak-hak muncul dan tumbuh dari kalangan sendiri. Ini strategi yang diharapkan LBH sehingga setiap permasalahan tidak harus diselesaikan oleh pihak lain. Tujuan akhirnya petani memiliki kemandirian sehingga tidak tergantung pada pihak lain.

Menurut anggota PAPANJATI, keberadaan LBH sangat membantu menumbuhkan kesadaran dan keberanian untuk menuntut hak-haknya. Bahkan keberhasilan perjuangan menuntut haknya di beberapa daerah sepertisebagian di jember telah menjadi pendorong amat kuat petani di daerah lain untuk menuntut haknya.

Kegiatan PAPANJATI berkembang tidak hanya menuntut haknya semata tetapi juga mengkritisi kebijakan birokrasi yang berkaitan dengan rakyat. Misalnya mengkritisi surat gubernur yang meminta aparat kemanan Kapolda dan Pangdam untuk melakukan pengamanan di perusahaan perkebunan. Karena akibat surat itu terjadi penangkapan dipihak petani di wilayah Rangkas Pawon Kediri. Hasil dari perjuangan melalui demonstrasi di DPRD Jatim dan Kantor Gubernur adalah sikap lunak untuk menyelesaikan dan mengeluarkan petani yang ditangkap.

Kelompok ini yang cukup memiliki andil besar dalam perjuangan warga di daerah Malang Selatan. Sebelum era reformasi memang kekuatan militer merupakan salah satu



kekuatan yang berpengaruh di Malang Selatan khususnya di desa Harjokuncaran. Di desa ini memang konflik tanah terjadi antara warega desa setempat dengan Angkatan Darat. Di daerah ini pula terjadi pengaplingan tanah yang diperuntukkan bagi perwira tinggi dan menengah. Terhadap fakta seperti ini warga desa tidak dapat berbuat banyak untuk menghalangi apalagi mencegah. Tragisnya lagi kaplingan untuk perwira tersebut dibiarkan bahkan ada yang dijualbelikan. Ada juga yang ditempat tanah kapling itu didirikan bangunan tetapi tidak dihuni. Fakta ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan warga sekitarnya. Di satu sisi banyak warga desa tidak memiliki lahan garapan tetapi disisi lain ada tanah di sekitarnya dibiarkan tanpa dikelola dan dimanfaatkan.

Kekuatan sosial yang dominan dari penduduk adalah mereka-mereka yang sejak lama memperjuangkan kepentingan warga desa untuk memperoleh kembali hak garap yang sudah lama diambil pihak lain. Kelompok warga desa yang tergolong kritis ini tidak saja bergaui dengan sesama penduduk desa setempat, tetapi telah membentuk dan bergaul dengan penduduk di luar Malang tetapi mengalami nasib hampir sama yaitu memperjuangkan masalah tanah. Misalnya mereka bergabung dengan PAPANJATI (Paguyupan Tani Jawa Timur).

Organisai ini berdiri pada tanggal 3 September 1998, setelah memperingati hari UUPA dengan cara berdemonstrasi di DPRD Tingkat I Jawa Timur. Keanggotaan PAPANJATI umumnya berasal dari para petani yang sedang menghadapi masalah sengketa tanah baik dengan swasta maupun pemerintah.

Dalam perkembangannya PAPANJATI telah tersebar di 11 kabupaten, yaitu Kediri Blitar, Malang, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bangkalan, Sumenep, Lumajang dan Sampang. Beberapa daerah yang terjadi sengketa tanah antara lain Curah Nongko Kabupaten Jember, Wonoagung kecamatan Ampel Gading, desa Tlogosari kecamatan Tirtoyudo, desa Tirtoyudo kecamatan Tirtoyudo, desa kepatihan kecamatan Tirtoyudo, desa Bumiredjo kecamatan Dampit, daerah-daerah ini terdapat di kabupaten Malang. Kemudian dusun Gambar desa Sumber sari kecamatan Nglegok Blitar, Daerah Pandanwangi Pasuruan, Rangkas Pawon Kediri, Jengawah Jember dan beberapa daerah lainnya.

Karena menghadapi sengketa tanah itu petani berusaha untuk menuntut hak-haknya kembali. Pada saat itulah salah satu upaya yang dilakukan adalah minta bantuan kepada LBH. Respon LBH sebagai lembaga bantuan hukum membela *kawula alit* sangat positif. Bantuan yang diberikan tidak hanya litigasi atau pembelaan hukum di pengadilan tetapi juga upaya pemberdayaan masyarakat berupa rangsangan tumbuhnya kesadaran kritis. Salah satu bentuk kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran itu adalah sekolah rakyat. Aktifitasnya adalah berdiskusi diantara petani sendiri tentang segala persoalan yang dihadapi. Termasuk merencanakan aksi demo kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Tak segan-segan PAPANJATI menghadap presiden untuk menuntut haknya.

Untuk memperkuat dalam kelompok tani, aktifitas yang bermuatan bagaimana cara mengorganisasikan diri sehingga memiliki posisi tawar yang kuat juga dilakukan. Pelatihan-pelatihan ini biasanya dilakukan LBH dengan materi kewarganegaraan, pengorganisasian dan cara-cara strategis terutama mengetahui posisi haknya dalam kerangka hukumnya. Mengetahui celah-celah hukum yang berkaitan dengan pertanahan sehingga mengetahui secara benar apakah hukum itu telah benar atau masih memiliki cacat.

Bantuan LBH bagi warga di rasakan sangat mendukung dan menambah kekuatan bagi petani sendiri. disamping pengetahuan akan hukum semakin luas, petani memiliki jaringan diantara kaum tani sendiri. Ketika jaringan ini terbentuk persalahan yang dihadapi petani tidak selalu diselesaikan LBH tetapi petani berusaha menyelesaikannya sendiri.

LBH biasanya kan membantu hal-hal yang tidak bisa dilakukan petani dan di sisi lain petani sendiri meminta bantuannya. Karena itu selain upaya penyadaran hukum kritis pada umumnya LBH menempatkan posisi pada penyediaan berupa fasilitas misalnya tempat diskusi atau pendamping melakukan aksi. Perannya hanya sebatas pendamping, upaya penyelesaian dilakukan petani sendiri.

Strategi ini dilakukan dengan alasan, petani belajar menyelesaikan masalah sendiri sehingga kemampuan untuk menuntut hak-hak muncul dan tumbuh dari kalangannya sendiri. Ini strategi yang diharapkan LBH sehingga setiap permasalahan

tidak harus diselesaikan oleh pihak lain. Tujuan akhirnya petani memiliki kemandirian sehingga tidak tergantung pada pihak lain.

Menurut anggota PAPANJATI, keberadaan LBH sangat membantu menumbuhkan kesadaran dan keberanian untuk menuntut hak-haknya. Bahkan keberhasilan perjuangan menuntut haknya di beberapa daerah seperti sebagian di jember telah menjadi pendorong amat kuat petani di daerah lain untuk menuntut haknya.

Kegiatan PAPANJATI berkembang tidak hanya menuntut haknya semata tetapi juga mengkritisi kebijakan birokrasi yang berkaitan dengan rakyat. Misalnya mengkritisi surat gubernur yang meminta aparat keamanan Kapolda dan Pangdam untuk melakukan pengamanan di perusahaan perkebunan. Karena akibat surat itu terjadi penangkapan dipihak petani di wilayah Rangkas Pawon Kediri. Hasil dari perjuangan melalui demonstrasi di DPRD Jatim dan Kantor Gubernur adalah sikap lunak untuk menyelesaikan dan mengeluarkan petani yang ditangkap.

Kelompok ini yang cukup memiliki andil besar dalam perjuangan warga di daerah Malang Selatan. Sebelum era reformasi memang kekuatan militer merupakan salah satu kekuatan yang berpengaruh di Malang Selatan khususnya di desa Harjokuncaran. Di desa ini memang konflik tanah terjadi antara warga desa setempat dengan Angkatan Darat. Di daerah ini pula terjadi pengaplingan tanah yang diperuntukkan bagi perwira tinggi dan menengah. Terhadap fakta seperti ini warga desa tidak dapat berbuat banyak untuk menghalangi apalagi mencegah. Tragisnya lagi kaplingan untuk perwira tersebut dibiarkan bahkan ada yang dijualbelikan. Ada juga yang ditempat tanah kapling itu didirikan bangunan tetapi tidak dihuni. Fakta ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan warga sekitarnya. Di satu sisi banyak warga desa tidak memiliki lahan garapan tetapi disisi lain ada tanah di sekitarnya dibiarkan tanpa dikelola dan dimanfaatkan.

#### 1.1.4. Sumber Konflik

Sumber konflik di daerah Malang Selatan ini adalah masalah pertanahan yang dikelola perkebunan baik swasta seperti PT Sumber Manggis dan BUMN seperti PTPN XII Kalibakar. Di luar itu pihak Angkatan Darat juga menguasai tanah perkebunan yang di desa Harjokuncaran. Sumber konfliknya adalah warga desa-desa di daerah

perkebunan merasa berhak atas tanah yang dikuasai pihak lain yang memiliki HGU sebagai dasar penguasaannya. Tetapi di lain pihak HGU yang dimiliki penguasa tanah perkebunan itu masih dianggap cacat hukum. Sementara di sisi lain secara historis tanah-tanah yang sekarang dikuasai pihak perkebunan maupun AD adalah hak warga sesuai dengan rentetan sejarah tanah itu sendiri.

Pemicu konflik pertanahan adalah perjuangan panjang warga desa untuk memperoleh kembali hak atas tanah belum membuahkan hasil. Perjuangan panjang yang tidak hanya telah meminta korban tidak hanya harta benda tetapi juga nyawa belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Di lain pihak perlakuan pihak penguasa tanah di wilayah konflik terhadap warga desa seringkali memunculkan ketidaksenangan.

Perilaku aparat perkebunan terhadap warga desa sekitar dianggap keterlaluan. Misalnya pihak perkebunan (mandor) memperlakukan pekerja terutama dari warga sekitar persisi jaman penjajahan. Para mandor memang berpakaian ala Belanda, dengan topi lebar dilipat sebelah, sepatu sebatas *dengkul*, serta di pinggang terselip samurai panjang. Perlakuan para mandor tidak hanya terbatas pada pakaian tetapi juga perilaku sehari-hari. Para pekerja ketika menghadap para mandor harus berjalan dengan cara berjongkok.

Ketika para mandor mengabsen pekerja dan pekerja telat pada waktu dipanggil maka dianggap tidak masuk kerja. Tetapi ketika mandor itu melaporkan ke perusahaan pekerja yang dianggap tidak masuk tadi tetap masuk. Karena itu upah atau gajinya akan diambil oleh mandor tersebut.

Perlakuan pihak perkebunan PTPN XII Kalibakar terhadap warga desa (Simojayan) juga dianggap keterlaluan. Warga desa yang mencari rumput di pagar perkebunan juga dilarang. Ketika ada warga desa yang ketahuan dan tertangkap mengambil *rambanan* (ranting pohon yang masih hijau untuk makanan ternak) untuk makanan kambing atau ternak lainnya maka alamat akan celaka. Harga yang harus dibayar warga desa yang tertangkap mengambil *rambanan* sekitar perkebunan amat mahal. Sampai-sampai muncul ungkapan, "*biaya yang harus dibayar untuk melepaskan warga desa yang tertangkap seringkali lebih mahal dari harga ternak itu sendiri*".

Pada umumnya warga desa yang tertangkap akan diserahkan kepada polisi. Nah di kepolisian ini biasanya proses bargaining terjadi. Suasana waktu sebelum reformasi

umumnya warga desa takut kepada aparat keamanan termasuk polisi. Karena itu ketika ada warga tertangkap mengambil *rambanan* di pagar perkebunan maka pihak polisi biasanya akan melakukan tawar-menawar agar warga yang tertangkap segera dilepas. Polisi biasanya bilang “*piye iki genteng kantor bocor, utawa kantor butuh semen kanggo renovasi*” (*bagaimana ini genteng kantor bocor, atau kantor butuh semen untuk merenovasi*). Ungkapan semacam ini sudah dipahami pihak polisi meminta tebusan untuk mengeluarkan warga desa yang tertangkap. Jumlah yang diminta sampai ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan rupiah.

Di luar perlakuan pihak perkebunan yang menggunakan tangan pihak aparat keamanan seperti polisi, masih banyak perlakuan yang dirasa kurang manusiawi bahkan menyakitkan hati. Ketika ada warga desa yang mengambil ranting pohon di wilayah penguasaan perkebunan maka akan muncul ungkapan-ungkapan dari para mandor yang memanasakan telinga serta menyakitkan hati. Misalnya akan muncul ungkapan: “*iki kebone mbahmu tah, kok punge (ranting) wit-witan neng kene dijupuki (ini kebunnya nenek Anda, ranting pepohonan diambil)*”.

Pola konflik yang terjadi di daerah Malang Selatan adalah konflik memperebutkan tanah garapan yang telah lama diambil dan dikusai pihak lain. Pihak-pihak yang terlibat konflik opada awalnya adalah warga desa sekitar perkebunan dengan PTPN XII Kalibakar, PT Sumber Manggis dan Angkatan Darat (Yayasan Bhirawa Anoraga). Tetapi dalam perkembangannya banyak pihak yang turut di dalamnya dan membawa kepentingan masing-masing. Misalnya Kosgoro yang berkepentingan dengan perolehan suara Golkar, Komitra (Komite untuk Warga Miskin dan Penyelamat Tanah Negara) Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang.

Dalam konflik tanah salah satu yang menjadi *strategic voice* adalah LBH Surabaya Pos Malang. Lembaga ini berada di pihak warga desa yang menuntut hak tanahnya. Upaya advokasi dan pendampingan terhadap warga telah banyak dilakukan. Di samping itu LBH telah vbanyak bersuara keras menanggapi statement dan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan warga desa.

Karena itu seringkali LBH juga dijadikan kambing hitam yang berada di belakang warga desa. Warga desa sendiri juga sering dijadikan pihak yang menjadi dan dijadikan

korban. Misalnya banyak diantara warga desa yang diteror atau diintimidasi atau bahkan terkena peluru. Di wilayah Harjokuncaran bahkan sejumlah orang yang tergolong tokoh di masyarakat setempat hilang hingga sekarang tak ketahuan rimbanya.

### **1.1.5. Faktor Pemicu Konflik**

Kemunculan perlawanan warga desa terhadap pihak perkebunan sebenarnya telah lama terjadi. Hanya saja bentuk perlawanan yang dilakukan tidak secara terbuka atau dapat disebut terselubung. Misalnya untuk melakukan perlawanan kepada pihak PTPN XII, tahun 1992 warga desa menanami tanah seluas 25 hektar yang HGU-nya dimiliki PTPN XII dengan tanaman jagung. Pihak PTPN tetap meminta warga untuk mengosongkan lahan tersebut setelah panen jagung. Masa panen jagung selama 3 bulan. Maka setelah 3 bulan warga tidak boleh menanami lagi. Tetapi sebelum jagung dipanen, warga menanami dengan tanaman ketela pohon, yang usianya selama 10 bulan. Maka semakin lama tanah itu sulit untuk dikosongkan. Pada waktu itu pihak PTPN juga telah menghitung ketika niat pengosongan lahan itu dipaksakan. Dapat dipastikan warga akan melakukan perlawanan dan akan berbuat nekat.

Sebelum ketela pohon di panen warga desa menanami jenis tanaman yang lebih lama usianya, yaitu pisang dan kopi. Akhirnya pihak PTPN kesulitan mengosongkan tanah yang ditanami warga. Akibat warga desa yang melakukan perlawanan seperti ini yang di motori sekdes Simojayan, tak pelak teror dan intimidasi terus mengalir. Terutama dialami sekdes Simojayan. Salah satu bentuk teror adalah menempatkan pasukan disekitar rumah sekdes dengan persenjataan lengkap.

Kalau kemudian perlawanan meletus tahun 1997, merupakan akumulasi kekesalan, sakit hati dan penderitaan serta kegetiran hidup yang telah lama dialami dan akhirnya sampai titik nadir yang tidak dapat lagi diredam.. Permintaan kepada pihak perkebunan secara baik-baik untuk memperhatikan warga di sekitar lokasi perkebunan tak pernah didengar. Misalnya di desa Jogomulyan yang bersengketa dengan PT Sumber Manggis, warga desa sejak tahun 1970 meminta tanah bengkok untuk pamong desa dan lapangan: olah raga tak pernah dipenuhi. Akibat kekesal itu maka selain tanaman perkebunan dibabat habis, warga juga membakar dan menjarah pabriknya.



Aksi warga desa Simojayan kecamatan Ampelgading yang melakukan perlawanan secara terbuka ternyata mengilhami desa-desa lainnya untuk menirunya. Kurang lebih setengah tahun kemudian tepatnya 20 Mei 1998 Soeharto jatuh, yang dikenal sebagai tonggak Reformasi. Maka semua ketidakadilan harus "direformasi". Termasuk penguasaan oleh PTPN atau PT Sumber Manggis menurut warga desa sekitarnya harus direformasi. Maka perjuangan warga yang sebelumnya dianggap melanggar hukum lambat laun gemanya meredup. Sebaliknya warga desa seperti mendapat angin baru dan membenarkan bahwa apa yang dilakukannya adalah ada benarnya.

### 1.1.6. Kalkulasi Konflik

Seperti telah disinggung wacana isu yang dijadikan sandaran konflik diproduksi oleh tokoh-tokoh warga desa yang telah lama melakukan pembelaan untuk mendapatkan kembali hak tanah. Jauh sebelum ada pihak lain yang membantu warga yang sedang berkonflik, sejumlah tokoh desa telah merangkak berusaha melakukan upaya-upaya yang dapat menyelesaikan sengketa tanah yang sedang terjadi. Tokoh-tokoh desa inilah yang turut andil semakin merebakkan dan menggulirkan isu memperoleh kembali hak atas tanah.

Pada umumnya sebab-sebab konflik merupakan persoalan yang terpendam sejak lama. Tidak hanya dalam hitungan tahun tetapi sudah puluhan tahun bibit konflik telah muncul. (dapat dirujuk pada bab sejarah konflik dan pemicu munculnya konflik)

Bagi masyarakat konflik baik terbuka maupun terselubung dipahami sebagai cara untuk melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang telah dianggap menimbulkan penderitaan baik lahir maupun batin. Di balik perlawanan itu bermuatan untuk memperjuangkan sumber-sumber ekonomi yang berupa tanah yang selama ini dikuasai pihak lain. Tetapi secara historis merupakan hak warga desa menguasainya.

Salah satu tokoh yang masih dapat meredam konflik di beberapa desa sengketa hingga saat ini masih terus berusaha agar perlawanan secara terbuka tidak terjadi. Misalnya di desa Harjokuncaran ada nama M. Yasin, salah satu tokoh sepuh dan pelaku sejarah sengketa tanah di wilayahnya, terutama di desanya. Tokoh ini hingga saat ini masih mampu meredam agar konflik fisik sejauh mungkin dihindari. Perlawanan yang dilakukan selama ini adalah melakukan berbagai pembicaraan ke berbagai pihak yang

dianggap dapat menyelesaikan sengketa tanah yang dihadapainya. Telah banyak tokoh dan lembaga yang ditemuinya mulai tingkat bawah hingga ketemu Presiden Gus Dur. Selain itu kelompok yang dibentuk oleh warga desa yang disebut FORKOTMAS (Forum Komunikasi Petani Petani malang Selatan) merupakan lembaga lain yang turut serta mengasah pengetahuan dan ketrampilan para petani atau warga desa yang terlibat konflik. Di lembaga ini para petani sering berkumpul membahas dan mengkritisi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan nkasus sengketa tanah yang mereka hadapi. Selain itu di forum atau lembaga ini juga dijadikan sarana untuk belajar berorganisasi. Bagaimana kiat atau metode melakukan berbagai aktifitas yang berkaitan dengan “perjuangan” memperoleh hak-hak petani menjadi bagian tersendiri yang memperoleh ruang lebih longgar dalam diskusi-diskusi yang sering digelar..

Kalkulasi konflik ternyata sudah diperhitungkan oleh warga desa yang terus melakukan upaya memperoleh hak-haknya. Kalkulasi biaya konflik tidak hanya harta benda atau materi tetapi juga nyawa kalau perlu menjadi taruhannya. Belum lagi korban psikologis berupa teros mental yang setiap saat selalu mengintai. Dipanggil pihak keamanan seperti Koramil, Kodin, Korem bahkan Kodam sudah pernah dialami sejumlah warga desa. Sejumlah orang yang berada di bawah jalur birokrasi tak jarang mendapat panggilan dan ancaman dari atasannya untuk tidak terus berada di belakang warga desa yang menuntut hak atas tanah.

## 1.2. Kasus Konflik Agama di Situbondo

Secara lokalistik wilayah kabupaten Situbondo terletak di bagian ujung sebelah timur pulau Jawa. Wilayah ini letaknya berdekatan dan berbatasan dengan kabupaten Banyuwangi, Jember serta kabupaten Bondowoso. Jika ditinjau berdasarkan kondisi geografis alamnya daerah ini banyak diwarnai oleh lautan dan daerah hutan serta lahan pertanian dan perladangan. Dengan kondisi lingkungan alam seperti ini oleh karenanya tidak sedikit warga masyarakat yang menekuni sektor pertanian, peternakan, perikanan laut atau nelayan sebagai sumber mata percaharian. Disamping itu di wilayah ini juga banyak warga masyarakat yang bekerja di sekor perdagangan dan sektor industri.

Apabila ditinjau berdasarkan kondisi sosial ekonominya terlihat bahwa masyarakat Situbondo nampaknya relatif beragam. Masyarakat tidak hanya tersegmen

dalam strata sosial ekonomi rendah saja melainkan juga menengah dan kalangan atas. Demikian juga dengan mata pencahariannya nampak sangat diversifikatif dengan pendidikan yang ditempuh juga relatif amat beragam. Meski demikian masyarakat yang berlatar belakang pendidikan di pondok-pondok pesantren memperlihatkan jumlah relatif besar.

Mencermati kondisi sosio kultural yang ada nampak bahwa mayoritas masyarakat di Situbondo beragama Islam. Berdasarkan informasi yang ada menunjukkan bahwa sekitar 92 persen masyarakat yang tinggal di Situbondo beragama Islam sedangkan sebanyak 8 persen beragama non Islam. Beberapa pemeluk agama lain yang cukup menonjol jumlahnya adalah Kristen yakni Katholik dan Protestan. Sesuatu yang sangat khas di wilayah ini adalah tidak jarang masyarakat yang berada di wilayah lain menyebut bahwa Situbondo sebagai kota santri. Situbondo adalah kota santri, demikian sering diucapkan banyak orang dan slogan-slogan yang acapkali terpampang di pintu gerbang kota. Sebutan ini menyiratkan pemahaman yang cukup dalam bahwa kondisi sosio kultural masyarakat Situbondo sebenarnya sangat religius dan agamis. Masyarakat Situbondo pada umumnya sangat patuh dan taat terhadap ajaran agama Islam.

Oleh sebab itu pada masyarakat bertipe seperti ini peran Kiai sangat dominan. Masyarakat tidak saja patuh dan mempercayai segala yang disampaikan Kiai tetapi lebih jauh dari itu tidak sedikit santri atau masyarakat yang sangat fanatik terhadap Kiai mereka. Dalam peran yang lebih luas nampaknya Kiai tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan agama tetapi ditemui pula Kiai yang memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang menghadapi kesulitan, khususnya jika menderita sakit. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang ada di sekitar Situbondo yakni wilayah Banyuwangi dan Bondowoso serta Jember kondisi seperti peran Kiai, ulama atau tokoh agama terlihat sangat besar.

Memperhatikan bahwa wilayah Situbondo merupakan kota santri setidaknya menyiratkan adanya beberapa situasi. Pertama, mayoritas warga masyarakatnya beragama Islam. Kedua, secara kuantitatif tempat-tempat ibadah untuk agama Islam baik berupa surau, langgar maupun masjid berjumlah relatif banyak. Ketiga, pola perilaku dan tindakan masyarakatnya akan lebih banyak didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yakni ajaran agama Islam. Keempat, peran tokoh agama seperti Kiai dan Ulama nampak sangat

menonjol bahkan mendominasi dalam kehidupan kemasyarakatan. Kelima, dengan jumlah penduduk sebagian besar bersuku Madura yang dikenal cukup temperamental masyarakat Situbondo relatif sensitif. Terutama jika ajaran agama yang mereka yakini benar dilecehkan oleh pihak lain. Seperti diketahui bahwa penduduk Situbondo sebagian besar bersuku Madura dan dikenal oleh banyak orang bahwa suku ini memiliki karakter cukup temperamental.

Di sisi lain jumlah penduduk yang beragama non Islam terlihat tidak terlalu banyak. Dari jumlah seluruh penduduk yang ada terdapat hanya sekitar 8 persen saja yang beragama Non Islam. Tetapi yang menarik adalah menurut banyak orang Situbondo adalah kota santri dengan penduduk non Muslim berjumlah sedikit namun jumlah tempat ibadah untuk orang-orang non Muslim relatif banyak. Bahkan disebut-sebut ada gereja yang tidak ada jemaatnya tetapi masih saja berdiri mentereng. Sedikit penduduk tetapi tempat ibadahnya banyak dan megah lagi. Ungkapan seperti ini sering dikemukakan orang untuk mencermati kemajemukan yang ada di wilayah Situbondo.

Jika isu SARA dihembuskan di wilayah ini akan memberikan kemungkinan cukup signifikan. Demikian perkiraan orang. Apa yang terjadi pada tahun 1996 bulan Oktober nampaknya merupakan salah satu bentuk kerusuhan atau konflik yang olhe banyak kalangan disebut-sebut sebagai bernuansa SARA. Dalam kondisi seperti ini yakni bersifat majemuk masyarakatnya dan dirasakan oleh berbagai pihak ada kesenjangan maka bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan hal ini merupakan "komoditas politik" yang sangat strategis.

Berarti jika ingin menciptakan konflik maka konflik dapat dimunculkan melalui cara yaitu memanipulasi kemajemukan yang bernuansa SARA itu. Nampaknya hal ini terjadi benar pada tahun 1996 bulan Oktober. Lepas dari adanya "skenario politik" besar yang memiliki tendensi dan maksud tertentu tetapi yang jelas akhirnya banyak pihak menilai bahwa kasus Situbondo dipicu oleh adanya kesenjangan sosial ekonomi dan persoalan kultural lain khususnya berkaitan dengan interaksi yang terjadi antar umat beragama.

Untuk memberikan penjelasan di seputar persoalan tragedi Situbondo, apakah ada unsur rekayasa atau skenario politik besar dan apakah konflik terjadi serta muncul secara

kultural dari bawah dan berbagai hal yang berkaitan dengan konflik yang terjadi kala itu, berikut ini diuraikan berbagai hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Beberapa point penting yang hendak diungkap antara lain tentang proses terjadinya konflik, kronologis konflik, partisipasi konflik misalnya hal-hal apa saja yang menjadi sumber konflik, apakah faktor pemicunya, pola konflik yang terjadi, pihak yang terlibat konflik dan sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut selanjutnya hendak digali informasinya melalui berbagai sumber antara lain pihak pemerintah yakni Bupati Kepala Daerah, Anggota DPRD, Kiai dan Ulama, Pihak gereja, LSM dan sebagainya.

### **1.2.1. Peta Persoalan dan Eksistensi Konflik**

Banyak pihak berpandangan bahwa fenomena konflik merupakan sesuatu yang lazim terjadi di dalam masyarakat yang dinamis. Perbedaan pendapat, perselisihan sampai dengan gerakan sosial dan kerusuhan sosial merupakan bentuk konkrit dari fenomena konflik yang tidak jarang terjadi di dalam masyarakat. Dengan kata lain konflik adalah fenomena yang bersifat inherent dalam masyarakat terutama pada masyarakat yang berciri dinamis dan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Latar belakang penyebab terjadinya konflik sosial sendiri memiliki warna yang sangat beragam. Demikian juga tentang intensitas, pihak yang berkonflik dan bentuk konflik ternyata memiliki dimensi yang amat kompleks.

Di wilayah Situbondo fenomena konflik nampaknya juga selalu hadir dan turut mewarnai perkembangan kehidupan masyarakat. Semenjak dulu sampai saat ini konflik senantiasa dapat ditemui di tengah-tengah masyarakat. Dari persoalan yang sangat kecil sampai dengan masalah yang memerlukan energi tersendiri untuk mencari solusinya. Dari persoalan yang bersifat pribadi (privat) sampai dengan yang bersifat umum (publik). Konflik yang terjadipun juga tidak hanya individu dengan individu tetapi juga individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok bahkan antara individu dan pemerintah dan kelompok dengan pemerintah. Intinya bahwa konflik yang terjadi di wilayah Situbondo amat bervariasi dengan isu konflik yang beragam.

Meskipun konflik yang terjadi di wilayah Situbondo hadir baik latent maupun manifest baik yang bersifat pribadi maupun publik tetapi dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir yang memiliki makna yang sangat signifikan adalah konflik yang dikenal dengan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga

---

sebutan "Tragedi Situbondo". Konflik atau kerusuhan yang terjadi di Situbondo ini isunya tidak hanya berkembang pada skala lokal semata melainkan nasional bahkan internasional. Konflik yang terjadi pada tahun 1996 tepatnya pada tanggal 10 bulan Oktober ini gaungnya telah terdengar sampai ke Jakarta bahkan ke mancanegara, khususnya negara Amerika, Australia dan negara yang lainnya.

Hal ini sangat mungkin karena konflik yang terjadi terkesan sarat bermuatan untuk perbedaan agama atau isu SARA. Indikasi kearah itu adalah banyaknya tempat ibadah umat non Islam yakni gereja yang dirusak dan dibakar oleh warga umat Islam. Akhirnya isu yang berkembang mencoba membenturkan adanya dua kelompok yang berkonflik yakni antara umat Islam dan non Islam. Dari berbagai sumber yang berhasil dihubungi menyebutkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memang konflik atau kerusuhan sosial yang menyita banyak perhatian publik dan sempat menimbulkan kecemasan serta ketegangan di kalangan masyarakat adalah kasus pembakaran gereja tersebut.

### 1.2.2. Proses Terjadinya Konflik

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Situbondo diawali oleh adanya tindakan penghinaan atau pelecehan yang dilakukan seseorang -- ada yang menyebut seorang santri, penjaga masjid, seseorang yang sering memberikan ceramah agama di tingkat RT -- terhadap ajaran agama Islam. Tuduhan adanya penghinaan dan pelecehan tersebut selanjutnya melahirkan keresahan di kalangan umat Islam, khususnya mereka yang berada di sekitar pondok pesantren di mana orang tersebut tinggal. Dengan dimotori oleh seorang Kiai -- kebetulan paman tertuduh sendiri-- selanjutnya kasus diangkat ke permukaan dan dibicarakan di tingkat Ulama, Kiai dan tokoh masyarakat yang lain serta aparat yang berwajib.

Di kalangan Kiai dan ulama sendiri sesungguhnya kasus hendak ditutup dan tidak dilanjutkan. Alasannya karena tertuduh bukanlah seseorang berpengaruh, bukan orang terkenal, bukan seseorang yang punya kharisma dan tidak memiliki massa serta hanya seorang santri biasa. Tetapi nampaknya ada seorang Kiai yang sangat berambisi untuk tetap memperkarakan tertuduh sampai ke pengadilan. Latar belakangnya adalah Kiai

tersebut (Kiai Zaini) merasa tersinggung karena Kiai As'ad -- yang juga famili Kiai Zaini -- dikatakan meninggal secara tidak sempurna. Kiai dengan dukungan masyarakat Islam mengharapkan agar tertuduh dihukum seberat-beratnya dan jika perlu dihukum mati.

Meski sempat terhenti beberapa saat akhirnya pihak berwajib terpaksa membuka kembali kasus pelecehan tersebut selanjutnya dilakukan persidangan. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa putusan sidang pengadilan yang menurut sisi hukum telah sesuai prosedur dan sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku di negeri ini nampaknya tidak memberikan cukup kepuasan bagi massa yang turut hadir dalam persidangan itu.

Akibat adanya ketidakpuasan terhadap keputusan pengadilan dan munculnya kecurigaan adanya KKN di lembaga pengadilan tersebut pada saat sidang yang terakhir itu kerusuhan tidak dapat dielakkan. Beberapa sumber informasi menyebutkan bahwa dalam kasus tragedi Situbondo nampaknya ada peran pihak luar yang turut meperkeruh suasana. Provokator-provokator tersebut yang oleh banyak informan dalam penelitian ini sering memberikan komando untuk melakukan pembakaran.

Diawali dengan pembakaran gedung pengadilan dalam waktu yang tidak terlalu lama hampir seluruh gereja yang ada di wilayah Situbondo menjadi sasaran warga. Dengan cara yang mengerikan dan anarkhis massa berjalan dan membakar ban-ban bekas disiram bensin di jalan-jalan. Hingga suasananya menjadi mencekam saat itu. Kejadian berlangsung hingga sore hari dan yang sangat aneh esoknya situasi menjadi tenang dan normal kembali.

Meski demikian suasana mencekam masih tersisa juga. Konflik akhirnya mampu diredam dan situasi dapat terkendali setelah pihak keamanan melakukan tindakan dan mengamankan pelaku pembakaran dan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam aksi tersebut.

Dengan demikian secara ringkas dapat dikemukakan bahwa konflik yang terjadi di wilayah Situbondo nampaknya bermula dari persoalan intern kalangan umat Islam khususnya masyarakat NU sendiri. Menurut informasi sesungguhnya dari pihak NU telah mengambil sikap yakni menutup kasus tersebut. Tetapi seorang Kiai tetap mempertahankan agar kasus tersebut diungkap.



Dengan dibumbui oleh berbagai situasi sosial ekonomi masyarakat Situbondo yang rentan akan isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi, akhirnya isu tersebut mampu memobilisasi massa dan melakukan gerakan sosial. Sayangnya dalam tragedi ini juga terkesan bahwa pihak aparat keamanan kurang gesit dan terkesan lamban dalam melakukan antisipasi. Sehingga massa yang berjumlah ribuan tersebut akhirnya mampu memperlihatkan kekuatan dan aksinya dengan melakukan pembakaran gereja-gereja yang ada di wilayah kota Situbondo dan sekitarnya.

### **1.2.3. Pihak - Pihak Yang Terlibat Konflik**

Konflik yang terjadi di Situbondo ternyata melibatkan berbagai pihak. Tetapi yang cukup menonjol dan secara manifest terlihat adalah konflik antara massa yang umumnya masyarakat NU di wilayah ini dengan pihak aparat keamanan. Meski demikian menurut sumber yang ada konflik juga melibatkan pihak pengadilan.

Hal ini terjadi sebab salah satu sebab meletusnya konflik hingga terjadi kebakaran adalah adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Dalam banyak versi --menurut berbagai sumber yang diwawancarai-- juga disebut bahwa konflik yang menjelma menjadi kerusuhan sosial di Situbondo tersebut juga tidak lepas dari peran Kiai Zaini yang kukuh pada pendirian yakni meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang maksimal bahkan jika bisa hukuman mati seperti yang diberlakukan di negara Arab terhadap Sholeh yang dituduh melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap ajaran agama Islam.

Konflik ini jika dicermati secara rinci juga nampak adanya dimensi horisontal yakni konflik yang terjadi pada sesama santri. Meski untuk mengungkap kasus penghinaan itu dilakukan oleh Kiai Zaini tetapi di kalangan santri sendiri juga sempat muncul keresahan dan ujungnya ingin juga turut mengadili Sholeh.

Dengan demikian dalam konteks ini konflik yang terjadi tidak hanya bersifat vertikal semata melainkan juga memiliki sifat horisontal. Tetapi harus diakui bahwa terjadinya konflik yang lebih besar muncul tidak terlepas dari adanya peran orang yang amat disegani sebut saja semisal Kiai. Ini sangat mungkin mengingat masyarakat Situbondo memiliki karakter paternalistik yang amat kental.

#### 1.2.4. Partisipasi Konflik

Tragedi Situbondo yang terjadi beberapa tahun yang lalu merupakan manifestasi bentuk konflik yang amat memprihatinkan. Konflik itu sendiri terjadi bersumber dari dalam (konflik internal) yakni kalangan masyarakat muslim khususnya NU. Dari berbagai sumber yang berhasil diwawancarai baik dari pihak kepolisian, Bupati, anggota DPRD, pihak gereja, LSM dan sumber informasi lain menyebutkan bahwa konflik bersumber dari adanya penghinaan atau pelecehan terhadap ajaran agama Islam yang dilakukan Sholeh.

Kasus ini akhirnya berkembang sampai ke permukaan karena adanya keinginan Kiai Zaini yang juga adalah pamannya sendiri untuk menuntaskan kasus tersebut. Sebenarnya dari kalangan NU sendiri kasus ini dianggap tidak signifikan dan hasil pertemuan diantara para Kiai, ulama, tokoh masyarakat dan aparat sepakat untuk dipetieskan mengingat Sholeh adalah seorang santri biasa, tidak memiliki pengaruh dan sebagian informan malah menyebut sebagai tukang sapu masjid. Nampaknya kesepakatan ini tidak terlalu diikuti oleh Kiai Zaini hingga merasa perlu untuk mengangkat kasus Sholeh sampai ke pengadilan.

Apa yang terjadi di pengadilan nampaknya tidak membuat rasa puas Kiai dan massa yang berkumpul di sekitar gedung pengadilan untuk mengikuti jalannya persidangan. Meski Sholeh dihukum 5 tahun -- adalah hukuman maksimum menurut aturan hukum formal yang berlaku untuk jenis kesalahan tersebut -- tetapi massa nampaknya lebih tertarik untuk menghukum dan mengadakan pengadilan sendiri terhadap Sholeh sesuai dengan hukum Islam seperti yang berlaku di Arab.

Akibat ketidakpuasan dan saling memperebutkan tertuduh -- pihak aparat keamanan ingin mengamankan Sholeh sementara massa ingin menghakiminya -- maka konflik fisik tidak tertahankan lagi. Apabila hendak diidentifikasi konflik fisik maka saat di gedung pengadilan tersebut merupakan awal terjadinya konflik fisik sekaligus sebagai pemicu terjadinya berbagai pembakaran dan aksi anarkhis lain yang diperlihatkan oleh massa.

Meski kala itu adalah titik awal terjadinya kerusuhan atau konflik fisik tetapi keresahan dan ketegangan yang terjadi antara Sholeh dengan santri lain dan Kiai -- konflik non fisik-- tetap saja berlangsung. Bahkan sebelum kejadian di gedung

pengadilan terlihat secara rutin Kiai Zaini mulai menggalang massa dengan dalih untuk pertemuan pengajian di kalangan santri.

Konflik yang terjadi awalnya hanya bersifat pribadi semata. Namun ketika telah dibumbui dengan persoalan agama dan dibalut oleh isu kesenjangan sosial ekonomi masyarakat maka yang terjadi adalah berkembangnya skala konflik tidak hanya bersifat intern antara Sholeh, Kiai Zaini dan santri yang lain tetapi konflik akhirnya menjalar ke berbagai elemen masyarakat yang lain.

Sehingga dapat diidentifikasi bahwa pihak yang terlibat konflik antara lain adalah, Santri dengan Kiai yakni Sholeh dengan Kiai Zaini, santri dengan santri yakni Sholeh dengan santri yang lain, selanjutnya berkembang menjadi massa yang terdiri dari para santri dengan pihak aparat pemerintah khususnya pengadilan dan pihak aparat keamanan. Disamping itu yang paling merasakan dampaknya adalah kalangan non muslim di mana tempat ibadah mereka tidak sedikit yang dibakar dan dihancurkan massa.

Dengan kata lain dalam konflik ini korban banyak diderita oleh kalangan umat non Islam karena banyak gereja yang dibakar. Pembakaran gereja dilakukan dalam waktu relatif singkat dan dimulai dari gereja yang terletak di sebelah gedung pengadilan yakni di daerah Karangasem kemudian massa terpecah menjadi 2 satu menuju wilayah barat kota dan sebagian yang lain ke arah timur.

Skala konflik yang bermula relatif kecil dengan cepat meluas sampai hampir di seluruh wilayah Situbondo, khususnya yang terletak di pinggir-pinggir jalan besar. Tidak sedikit informan yang merasa heran dan kaget seperti tidak masuk akal sebab hampir serentak pembakatan terjadi di mana-mana, tidak hanya di gereja-gereja tetapi juga di jalan-jalan besar/ raya di mana massa membakar ban-ban bekas dengan memanfaatkan bensin.

Mencermati tragedi ini banyak pihak (khususnya para informan) menyebut bahwa disinyalir ada pihak luar termasuk provokator yang berupaya untuk menciptakan kerusuhan dan memporakporandakan Situbondo dengan muatan isu SARA. Tujuannya agar citra NU di mata masyarakat tidak baik dan memperlihatkan ketidakmampuan elit politik untuk memimpin organisasi yang tergolong besar ini. Kasus Situbondo diduga sebagai sebuah skenario politik dengan mengorbankan Sholeh sebagai kambing hitam..

### 1.2.5. Latar Belakang Konflik

Terdapat berbagai kemungkinan yang dilontarkan oleh informan mengapa konflik baru muncul pada saat itu.

Pertama, adanya perasaan solidaritas terhadap umat Islam. Perasaan solidaritas itu muncul setelah terjadinya kasus pembakaran masjid di wilayah Timor Timur. Seolah apa yang dilakukan massa adalah bentuk “balas dendam” terhadap apa yang dilakukan masyarakat di Timor Timur pada saat melakukan pembakaran masjid.

Kedua, kasus itu baru muncul sebagai bentuk skenario politik agar citra NU menurun dan kurang mendapatkan simpati oleh masyarakat. Dalam upaya menggalang simpati partai politik yang lain khususnya Golkar.

Ketiga ada sinyalemen bahwa tragedi itu merupakan bentuk ujian bagi Gus Dur sebagai Pemimpin NU terpilih karena pada saat itu yang diresdikan oleh Jakarta adalah Kiai Abubakar.

Keempat, adanya hubungan yang kurang harmonis antara elit politik dari garis agama dengan pemerintahan di tingkat pusat. Sehingga ujian-ujian banyak diberikan terhadap Gus Dur.

Apa yang disampaikan tersebut merupakan berbagai kemungkinan yang semapat terpikir di benak para informan. Tragedi Situbondo meletus karena ada skenario politik besar seperti yang dugaan-dugaan diatas. Beberapa situasi yang menguatkan hal tersebut adalah stabilnya kondisi Situbondo setelah tragedi terjadi.

Menurut informan sehari setelah kejadian itu tidak sedikit toko-toko, kios-kios yang membuka kembali dagangannya sebagai tanda aktivitas ekonomi berjalan kembali. Jika memang konflik bersumber dan terjadi secara kultural dan berbasis pada situasi lokal maka konflik tersebut akan berlangsung tidak hanya sehari namun dalam waktu lebih lama lagi.

### 1.2.6. Sejarah Terjadinya Konflik

Tragedi pembakaran tempat ibadah umat Kristiani di wilayah Situbondo yang terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 1996 telah menggemparkan masyarakat Situbondo dan sekitarnya. Tragedi itu tidak hanya menjadi bahan perbincangan masyarakat lokal tetapi juga menjadi isu nasional bahkan internasional yang menarik perhatian berbagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga

kalangan. Konflik yang terjadi demikian cepat dan melibatkan ribuan warga masyarakat -- mayoritas umat Islam -- tersebut tidak hanya memunculkan keprihatinan diantara umat Islam saja melainkan juga warga masyarakat yang lain.

Menurut informan (Bapak Bupati) tragedi Situbondo terjadi diawali dengan adanya seseorang bernama Sholeh yang mencemarkan nama baik dan melecehkan Kiai dan juga dianggap melecehkan ajaran agama Islam. Posisi dan predikat Sholeh ini memiliki berbagai versi. Oleh beberapa pihak hanya disebut sebagai santri saja tetapi dari sumber lain juga diperoleh informasi bahwa Sholeh juga dikatakan Kiai. Ada juga pihak yang menyebutkan bahwa Sholeh hanyalah santri yang bertugas membersihkan masjid.

Tetapi Sholeh juga sering memberikan ceramah agama di tempat tertentu dengan skala kecil setingkat RT. Pada suatu ketika saat Sholeh memberikan ceramah oleh warga masyarakat pengikut ceramah itu ia dianggap mencemarkan dan melecehkan Kiai As'ad yang telah meninggal dengan menyebut bahwa Kiai ini waktu meninggalnya tidak sempurna. Kiai As'ad adalah Kiai yang sangat berpengaruh di wilayah Situbondo.

Pelecehan yang dilakukan Sholeh ini nampaknya menyulut kemarahan warga masyarakat NU yang merupakan jumlah mayoritas di wilayah Situbondo. Masyarakat tidak terima atas apa yang disampaikan dan dikemukakan Sholeh. Oleh karenanya warga masyarakat NU meminta agar Sholeh segera diadili dengan cara mereka sendiri. Tetapi sebelum diadili massa Sholeh telah diamankan di Mapolsek wilayah setempat.

Maksudnya adalah agar Sholeh diadili melalui jalur hukum sesuai prosedur hukum formal yang berlaku. Ketika proses hukum sedang berlangsung masyarakat meminta pada pihak pengadilan agar Sholeh dihukum seberat-beratnya dan kalau bisa dihukum mati. Namun apa yang terjadi berdasarkan aturan hukum formal yang berlaku dengan jenis kesalahan seperti itu ternyata Sholeh seberat-beratnya hanya dapat dihukum penjara selama 5 tahun.

Putusan pihak pengadilan ini nampaknya tidak terlalu menggembirakan dan melegakan bagi masyarakat khususnya warga NU. Mereka menginginkan agar Sholeh segera diberikan pada mereka dan mereka akan mengadilinya dengan cara mereka sendiri. Disamping itu dalam proses peradilan masyarakat menganggap telah terjadi KKN dalam memutuskan hukuman terhadap Sholeh.

Berdasarkan informasi dari pihak NU sebenarnya saat ada keresahan di kalangan umat Islam, kasus tersebut telah diperbincangkan di kalangan Kiai dan Ulama termasuk memberikan tindasan laporan ke Polsek. Adalah Zaini -- beliau seorang Kiai dengan jumlah santri cukup banyak sekaligus sebagai paman Sholeh sendiri -- yang selanjutnya memperlmasalahakan soal pelecehan tersebut.

Kasus itu lalu dibahas di NU dan hasil pertemuan atau rapat memutuskan bahwa oleh karena Sholeh bukan orang penting, bukan orang berpengaruh dan juga bukan tokoh masyarakat maka kasus itu tidak perlu diperpanjang dan dilanjutkan. Dengan kata lain kasus tersebut diharapkan untuk ditutup agar tidak berbuntut panjang. Kalaupun toh harus dihukum hukum saja dengan hukuman yang ringan misalnya 1 bulan untuk memberi pelajaran pada Sholeh. Nampaknya hasil pertemuan itu tidak terlalu dihiraukan oleh Kiai Zaini. Beliau tetap menginginkan bahwa Sholeh harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku terutama hukum Islam.

Situasi ini mencerminkan bahwa keputusan tersebut tidak terlalu membuat Kiai Zaini puas. Oleh sebab itu lalu gugatan diperbaiki dan meminta untuk diteruskan perkaranya. Menurut informasi sebenarnya kasus telah diblokir di Polsek untuk beberapa bulan lamanya.

Tetapi dengan adanya usulan untuk menggugat tersebut lalu dibuka kembali. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kemungkinan ada latar belakang masalah pribadi yang tidak mudah untuk dipahami banyak orang. Atas permintaan dari Kiai Zaini selanjutnya kasus kembali dibuka dan disidangkan. Pada sidang pertama dan kedua tidak terjadi kerusuhan.

Pada persidangan ketiga suasana menjadi sangat berbeda. Dalam persidangan ketiga jumlah massa awalnya hanya ratusan saja. Tetapi lambat laun jumlah massa kian bertambah hingga mencapai ribuan.

Berdasarkan informasi yang ada juga disebutkan bahwa strategi memobilisasi massa waktu itu adalah dengan melontarkan isu tentang pelecehan terhadap Kiai As'ad. Hal ini dilakukan mengingat di Situbondo sangat banyak santri dan pendukung Kiai As'ad. Isu tersebut lalu dibumbui dengan bermacam-macam isu yang relevan dengan kondisi di Situbondo misalnya tentang kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Nampaknya dengan strategi tersebut banyak warga masyarakat yang terpengaruh.

Meski pada sidang-sidang sebelumnya jumlah massa yang hadir tidak terlampau banyak namun pada tanggal 10 Oktober itu massa yang hadir dalam sidang kasus Sholeh ternyata di luar dugaan aparat keamanan. Atas adanya putusan pengadilan yang kurang memuaskan maka mereka melakukan aksi pembakaran terhadap gedung pengadilan tempat mereka mengikuti jalannya sidang kasus Sholeh. Sebenarnya pada saat itu telah hadir seorang Kiai -- menurut informasi adalah putra Kiai As'ad sendiri -- yang mencoba menenangkan massa tetapi nampaknya tidak menunjukkan hasilnya. Bahkan dengan hadirnya Kiai Zaini yang juga dikenal sebagai pamannya Sholeh aksi massa makin beringas saja.

Menurut pengamatan Pak Bupati setelah massa membakar gedung pengadilan lalu mereka membakar gereja yang ada di sebelah baratnya (di daerah Karangasem). Barangkali ada provokator atau ada kecemburuan sosial yang telah lama terpendam ungkap Pak Bupati. Pembakaran ternyata tidak berhenti sampai di Karang asem. Meski kejadian itu terjadi pada pagi hari namun dalam waktu relatif singkat gereja-gereja yang ada di Situbondo dibakar massa.

Pertanyaan yang sempat hadir dipikiran Pak Bupati adalah jika persoalannya adalah ketidakpuasan terhadap hasil putusan pengadilan atas kasus Sholeh kenapa gereja ikut dibakar? Pertanyaan ini tak henti-hentinya berkecamuk dibenak Pak Bupati. Disamping itu mengapa pembakaran bisa dengan cepat merembet di tempat lain. Tidak hanya di daerah sekitar gedung pengadilan saja tetapi telah merembet ke daerah Situbondo sebelah barat dan sebelah Timur bahkan berbatasan dengan wilayah Banyuwangi.

Jika pada jam 11 pagi pembakaran gereja dilakukan maka pada jam 3 sore pembakaran telah menjalar ke daerah Asembagus dan Besuki. Nampaknya tidak mungkin terjadi jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Dengan kata lain mustahil jika aksi massa yang sangat anarkhis itu terjadi secara spontanitas. Apakah ada skenario dalam tragedi ini. Skenario atau rekayasa terhadap kasus konflik massa ini mungkin saja ada. Hanya sampai saat ini tidak jelas siapa dan dengan tujuan apa mereka melakukan atau menciptakan kerusuhan di wilayah Situbondo.

Dalam tragedi ini yang cukup memprihatinkan adalah adanya korban dari pihak gereja yakni pendeta yang tidak bersedia keluar tempat kediaman mereka karena rasa



takut yang amat sangat terhadap massa yang berjumlah sangat banyak. Sehingga pendeta beserta keluarga dan pembantu rumah tangganya meninggal dunia.

Bagaimana situasi kerusuhan yang terjadi saat itu? Kejadian berlangsung sedemikian cepat. Massa dengan cepat membakar ban-ban di jalan-jalan dengan bensin. Jika tidak dipersiapkan terlebih dahulu rasanya tidak mungkin. Waktu itu aksi massa terlihat ganas sekali sampai-sampai seluruh murid dan guru diinstruksikan pulang dan langsung tinggal di rumah. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri para murid dan guru sekolah.

Setelah kasus pembakaran yang dilakukan oleh massa selang 2 dan 3 hari para pejabat yang ada di wilayah ini diganti. Beberapa pejabat seperti; kepala kepolisian, kepala kejaksaan, Kodim, dan semua Muspida digantikan oleh pejabat yang baru. Bagi pelaku setelah ditangkap di proses secara hukum dan sampai saat ini informan kurang mengikuti perkembangan tersebut. Pelaku-pelaku tersebut tertangkap basah melalui dokumentasi berupa foto dan ada yang tertangkap basah saat melakukan pembakaran dan pengrusakan. Sampai saat ini informan tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut. Yang jelas saat itu dilakukan tindakan pengamanan oleh pihak berwajib dan dilakukan pemeriksaan.

Apakah ada tuntutan dari pihak umat Nasrani? Sampai saat ini tuntutan itu nampaknya tidak pernah ada. Bahkan setelah gereja dibakar lalu dibangun dan gerja itu sekarang berdiri lebih megah lagi bahkan lebih megah daripada sebelum dibakar. Hal ini sedikit banyak juga menciptakan kecemburuan sosial pada masyarakat.

Apakah ada prakarsa untuk mempersatukan umat beragama. Sampai saat ini upaya ke arah itu selalu ada. Dengan dimotori oleh GP. Ansor dan kalangan NU pertemuan-pertemuan dengan umat beragama selain Islam sering dilakukan. Bahkan tidak jarang dilakukan kerja bakti bersama serta kegiatan sosial yang lain. Setelah terjadinya pembakaran misalnya untuk memperbaiki gereja juga banyak umat Islam yang terlibat untuk memasang genting, membersihkan gereja dari puing-puing dan sebagainya.

Adakah unsur kecemburuan sosial sebagai pemicu konflik? menurut analisis informan indikasi ke arah itu memang mungkin saja ada. Seperti diketahui bahwa mayoritas masyarakat Situbondo beragama Islam. Hanya sekitar 8 persen saja bahkan

kurang yang beragama non Islam. Tetapi tempat-tempat ibadah yang ada dan dibangun disamping jumlahnya cukup banyak juga bentuk bangunannya sangat megah.

Di sisi lain banyak masjid yang bentuk bangunannya hanya ala kadarnya atau tidak terlalu megah. Kondisi ini dapat juga memicu rasa kecemburuan pada masyarakat Islam. Dalam situasi seperti ini yakni banyaknya perbedaan dan kesenjangan sosial ekonomi akan lebih mudah pihak yang memiliki kepentingan untuk memprovokasi dan menciptakan kerusuhan di wilayah Sitobondo. Artinya dengan menghembuskan isu SARA maka masyarakat akan dengan cepat merespon isu untuk dijadikan pijakan dalam bertindak anarkis.

Meski demikian sepengetahuan informan hingga saat ini nampaknya tidak ada perasaan dendam di kalangan orang NU dengan pihak gereja. Sehingga mungki kecil ini ada kaitannya dengan kesenjangan sosial ekonomi. Toh kondisi itu telah lama ada. Oleh karena itu ada kemungkinan juga dalam kasus ini muncul provokator yang memprovokasi massa agar melakukan perbuatan yang anarkhis tersebut.

Di sisi pihak keamanan sendiri nampaknya juga belum terlalu siap untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Sehingga begitu massa datang secara sporadis dan dalam jumlah besar akhirnya kewalahan dan apa yang terjadi akhirnya kerusuhan tersebut tidak dapat dihindarkan.

Sementara itu pihak keamanan yang ada hanya pihak kepolisian dan pihak militer yang jumlahnya terbatas. Sehingga perbandingan dengan jumlah demonstran atau massa sangat tidak sebanding. Bahkan menurut informan akhirnya pihak keamanan hanya sempat menonton peristiwa itu terjadi. Keterlambatan penanganan nampaknya juga terjadi. Karena baru pada jam 3 sampai jam 5 sore turun bantuan dari Pasuruan untuk meredam kerusuhan yang terjadi.

Bagaimana kiat Bupati untuk tetap menciptakan kedamaian di wilayah Sitobondo?. Menurut Bupati untuk menciptakan kestabilan kondisi sosial politik sering dilakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai kalangan, menjalin hubungan dengan berbagai pihak terutama dengan Departemen agama tiap 3 bulan sekali dilakukan pertemuan dengan para ulama dan pimpinan umat beragama.

Disamping itu juga melakukan seminar yang dihadiri oleh seluruh elemen dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini pertemuan yang dilakukan secara insidental HMI.,

PMII tokoh agama serta berbagai elemen dalam masyarakat untuk melakukan dialog guna memperoleh masukan dan memahami problem yang ada di masyarakat atau "grass root".

Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa masyarakat Situbondo memiliki ciri khas sebagai masyarakat agamis yang dilingkupi kehidupan kultural keagamaan yang amat kental. Biasanya pada masyarakat seperti ini rasa sensitivitas terhadap agama yang sangat diyakini cenderung tinggi.

Oleh sebab itu berbagai bentuk perbedaan pendapat bahkan pelecehan atau penghinaan terhadap ajaran agama yang diakui benar adalah sesuatu yang sangat ditentang keras-keras. Bahkan akan dibela sampai pada titik darah kematian. Konflik mungkin saja akan juga terkonstruksi sebagai situasi di mana dijumpai adanya penghinaan atau pelecehan terhadap ajaran agama, meski tidak selalu muatan isunya berdimensi agama.

Tetapi nampaknya sensitivitas problematika akan muncul saat tindakan, perilaku dan pandangan orang lain bertentangan dengan ajaran agama. Konflik akan segera muncul saat terjadi pelecehan atau penghinaan terhadap nilai-nilai ajaran agama. Situasi sosio kultural yang mengedepankan peran Kiai dalam mendalami ajaran agama nampaknya juga memberikan andil yang cukup besar terhadap sensitivitas ini.

Ini merupakan implikasi praktis ketika iklim kultural paternalistis berkembang. Apa yang dikatakan, disampaikan, dilakukan dan diperintahkan oleh sang Kiai menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan dan terkesan haram untuk dibantah. Sehingga sikap santri yang diharapkan adalah patuh, nurut serta mengikuti rambu-rambu yang telah digariskan oleh Kiai.

Akibatnya jika anggota masyarakat atau santri menjumpai sesuatu, ucapan, tindakan dan pikiran yang berseberangan dengan apa yang pernah diterima dari sang Kiai ini memberikan potensi konflik yang cukup besar, meski wujud konflik itu sendiri bukan manifest tetapi bersifat latent.

### **1.2.7. Manajemen Konflik**

Pada masyarakat yang berkarakter agamis, santri dan religius maka figur seorang Kiai sangat diperlukan dan dominan. Sebagai refleksi dari kultur patenalistik yang kental

maka peran Kiai tidak hanya sebatas mengajarkan ajaran agama tetapi juga turut membantu menciptakan suasana ketenangan, kedamaian dan ketentraman di seluruh lapisan masyarakat.

Artinya bahwa sebagai wilayah dengan tipe agamis maka seperti juga wilayah yang lain di wilayah Situbondo peran Kiai sebagai mediator, sebagai penyelesaian masalah bahkan menjalankan peran untuk menciptakan keseimbangan di dalam masyarakat sangat diharapkan.

Di wilayah Situbondo peran Kiai memang sangat diperlukan khususnya sebagai pihak yang dapat membantu menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Namun sayang terkadang diantara Kiai sendiri terjadi perbedaan pendapat dan tidak jarang hal ini memberikan implikasi pada santrinyan. Di wilayah ini sebenarnya ada 3 (tiga) Kiai yang dianggap oleh masyarakat dan tokoh formal atau kalangan pemerintah sebagai Kiai yang memiliki kharisma dan berpengaruh besar di masyarakat Bondowoso.

Ketiga Kiai tersebut antara lain adalah; Kiai Sofyan, Kiai Fawaid dan Kiai Kholil. Para Kiai ini dianggap oleh masyarakat memiliki kharisma dan memiliki santri dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan Kiai Sofyan memiliki santri lebih dari sepuluh ribu santri. Tetapi sayang pada saat terjadinya konflik di Situbondo kala itu ketiga Kiai tersebut tengah berada di luar kota. Sehingga mereka tidak dapat turut serta terjun untuk meredam kerusuhan.

Disamping ketiga Kiai tersebut institusi yang mampu meredam konflik saat terjadinya tragedi Situbondo adalah pihak aparat keamanan. Tetapi mungkin banyak pihak memahami bahwa pendekatan yang dilakukan biasanya bersifat fisik. Dengan kata lain konflik bukannya terhenti oleh langkah persuasif tetapi lebih mengarah pada penanganan secara fisik.

Meski demikian ketika tragedi Situbondo terjadi menurut pengakuan dari berbagai pihak (khususnya sumber dari pengadilan) menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan tindakan persuasif. Tetapi karena jumlah massa terlampau banyak dan suasananya sangat kacau ditambah lagi dari pihak Dandim turun tangan dan mengalami "misunderstanding" maka tragedi pembakaran itu terjadi. Ketika aksi pembakaran dan pengrusakan terjadi memang pihak keamanan tidak mampu mengendalikan situasi. Baru

pada sore hari sekitar pukul 3 sampai dengan pukul 5 datang bantuan dari daerah lain dan mampu meredam konflik atau kerusuhan yang terjadi.

Beberapa kemungkinan yang dapat diharapkan untuk bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik saat ini dan masa yang akan datang selain pihak tokoh-tokoh agama baik Kiai maupun Ulama, juga pihak DPRD serta LSM. Namun sayang pada saat konflik terjadi institusi-institusi tersebut tidak sekritis dan sesigap sekarang ini. Meski demikian di masa yang akan datang mungkin lembaga ini dapat diberdayakan sebagai institusi yang turut membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Situbondo.

### 1.2.8. Pihak yang Berperan

Dalam masyarakat yang terbingkai dalam kultur paternalistik yang kental banyak pihak merasa pesimis terhadap adanya perubahan, apalagi yang bersifat revolusioner. Justifikasi absolut berupa pembenaran berdasarkan nilai-nilai kultural keagamaan acapkali menjadi dinding yang harus ditembus dengan energi penuh.

Oleh sebab itu menyamping masyarakat masih menilai dan mengagung-agungkan pemimpin atau tokoh agama sementara mereka tidak bersedia menyambut dengan gembira adanya perubahan niscaya perubahan akan jauh dari harapan. Meski dapat dilakukan perubahan tetapi hal itu nampaknya harus dilakukan secara gradual bukanlah revolusioner kalau tidak ingin terjadi "keterkejutan" dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa sumber informasi di wilayah Situbondo nampaknya pihak atau institusi yang paling siap memainkan peran sebagai agen perubahan adalah lembaga swadaya masyarakat.

Meski tidak sedikit lembaga swadaya masyarakat yang masih sungkan-sungkan berhadapan dengan Kiai tetapi lembaga swasta ini relatif lebih bebas dan berusaha untuk mampu bertindak netral. Kritik-kritik perlu dilakukan, input perlu disumbangkan guna membantu mengembangkan kehidupan masyarakat Situbondo. Institusi lain yang nampaknya juga cukup siap menyongsong segala bentuk perubahan adalah pihak DPRD.

Lembaga ini terlihat makin agresif dan kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat termasuk dalam mengantisipasi konflik yang bakal dan potensial terjadi. Dengan ciri khas aspiratif bersedia menampung segala masukan dari bawah demi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga

kemajuan dan perkembangan wilayah Situbondo lembaga ini mencoba memberdayakan diri dan turut berkiprah dalam memajukan kabupaten Situbondo.

Setelah babak akhir meletusnya kasus pembakaran dan pengrusakan usai, banyak kalangan menyiratkan perasaan prihatin dan penyesalan yang amat dalam. Ucapan belasungkawa tidak hanya tertuju pada puing-puing reruntuhan gereja, sekolah dan yayasan panti asuhan akibat pembakaran dan tindakan anarkhis massa tetapi yang lebih haru adalah saat ucapan itu tertuju pada korban jiwa yakni seorang pendeta dengan keluarganya yang meninggal terbakar (seluruh korban 5 orang).

Sungguh mengenaskan demikian banyak diungkapkan oleh informan terutama pendeta Samuel yang merasa kehilangan teman, sahabat dan kolega yang amat dicintainya. Bagaimanapun selalu masyarakat kecil menjadi korban. Ungkapan itu juga sering dilontarkan oleh informan. Jika hendak dikaji kerugian apa yang ditanggung dan keuntungan apa yang diperoleh nampaknya dalam kasus ini hanya kerugianlah yang banyak dirasakan.

Meski demikian bagaimanapun juga semua ada hikmahnya. Setidaknya belajar dari pengalaman ini berbagai pihak harus tetap waspada dan bersikap antisipatif terhadap berbagai upaya memecah belah kehidupan masyarakat Situbondo.

Secara material kerugian yang terjadi tidak dapat ditentukan secara pasti. Tetapi menurut informan terdapat sekitar 27 bangunan yang terdiri dari gereja, sekolahan dan panti asuhan. Semua bangunan itu mengalami kerusakan akibat pembakaran dan pengrusakan dan yang paling banyak adalah tempat ibadah untuk umat Kristen.

Sementara itu dalam kasus tersebut jumlah pelaku tertangkap sebanyak 104 orang dan tersangka sejumlah 54 orang. Dari sebanyak 104 orang tersebut seluruhnya teridentifikasi sebagai orang Situbondo. Selanjutnya jumlah kerugian ekonomi akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi sebagai dampak dari kasus ini tidak dapat dihitung secara pasti.

Tentu ini berkait dengan besarnya omzet perdagangan yang berputar tiap hari di pusat perbelanjaan termasuk juga pedagang kecil yang ada di sekeliling tempat kejadian. Kerugian yang lebih dalam adalah secara psikologis tidak jarang masyarakat masih merasa trauma dengan tragedi tersebut.

Dengan demikian kerugian psikologis dan sosial yang tidak dapat dikalkulasi secara material tentu akan lebih dirasakan daripada sekedar kerugian materi. Perasaan kehilangan teman, saudara, sahabat baik yang menjadi korban maupun yang akhirnya ditangkap dan dihukum tentu tidak akan terbeli dengan materi semata.

### **1.3. Kasus Konflik di Kabupaten Banyuwangi**

Nama Banyuwangi boleh jadi mulai banyak dikenal orang dan menjadi bahan perbincangan publik ketika isu santet mulai banyak memakan korban. Periode transisi yang rawan konflik dan suasana euforia yang seringkali kebablasan, ternyata melahirkan imbas buruk bagi masyarakat Banyuwangi. Perselisihan yang lama terpendam dan syakwasangka yang mengendap, tiba-tiba meletup dan sukar untuk dikendalikan dalam waktu yang cepat. Hanya sekedar curiga, karena balas dendam atau karena benar-benar jengkel dengan ulah dukun santet yang diidentikkan dengan ilmu hitam, warga masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya tampak lugu, mungkin hanya seorang petani biasa, tukang becak atau warga masyarakat yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terlibat dalam tindak kekerasan, tiba-tiba bisa berubah menjadi orang yang kalap. Mereka tak sekedar menghajar orang yang dituduh sebagai dukun santet hingga babak-belur, tetapi tak jarang pula kemudian menggantung hidup-hidup, diseret di sepanjang jalan, dan merusak rumah si terdakwa hingga rata dengan tanah.

#### **1.3.1. Bentuk dan Intensitas Konflik**

Kabupaten Banyuwangi selain dikenal masyarakat luas karena memiliki tempat wisata yang indah seperti pantai Plengkung dan kawah Gunung Ijen, juga dikenal sebagai "sarang" dukun santet. Ilmu santet yang telah disalahkembangkan atau bahkan disalahgunakan oleh para pemiliknya untuk menjadi ilmu sihir, tenung maupun guna-guna, disatu sisi sekelompok anggota masyarakat yang memerlukan, namun disisi yang lain, terdapat juga anggota masyarakat yang memusuhi dengan pembenaran dari ajaran agama.

Permusuhan antara dukun santet dengan masyarakat yang anti dukun santet sudah berlangsung lama, untuk itu sebelum tahun 1997 pernah terjadi pula pembunuhan terhadap dukun santet, walaupun frekuensinya jarang sekali.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga

---



Kasus pembunuhan dukun santet pada tahun 1998 yang lalu, di Kabupaten Banyuwangi sempat menyedot perhatian masyarakat pada tingkat nasional maupun internasional. Walaupun kasus pembunuhan dukun santet ini sempat menjalar ke kabupaten lain di wilayah pulau Jawa, namun kasus di Banyuwangi inilah yang paling mendapat perhatian dari berbagai kalangan, karena bukan saja dalam waktu yang relatif pendek telah terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan dan pembakaran rumah dalam jumlah yang banyak, namun beberapa kalangan ada yang bersepekulasi untuk menduga-duga bahwa kasus itu cenderung bermuatan politis.

Pembunuhan terhadap orang yang dicurigai sebagai dukun santet, meliputi 17 dari 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian hanya 4 kecamatan di wilayah Banyuwangi yang penduduknya bebas dari isu pembunuhan dukun santet, yaitu kecamatan Bangorejo, Glenmore dan Muncar, artinya di tiga wilayah kecamatan ini tidak satupun yang terjadi korban pembunuhan, penganiayaan maupun perusakan/pembakaran.

Menurut informasi dari ketua DPRD, Bupati serta aktivis LSM Banyuwangi, bahwa didaerah ini juga telah terjadi konflik tanah antara warga masyarakat dengan pihak perkebunan telah melimpahkan kasus ini kepada pemerintah daerah. Namun karena berbagai hambatan, sehingga sampai saat ini kasus tersebut belum terselesaikan. Kasus ini apabila tidak segera mendapatkan penanganan yang serius, bukan tidak mungkin pada suatu saat dapat meletup seperti yang terjadi pada kasus Jenggawah di Kabupaten Jember.

### 1.3.2. Proses dan Sejarah Terjadinya Konflik

Menurut keterangan yang berhasil dihimpun dari ketua DPRD, Bupati, Kapolres, Aktivis LSM/Rektor Untag, Ketua MUI dan anggota tim investigasi kasus santet Banyuwangi, bahwa istilah santet itu semula dimaksudkan sebagai praktek penggunaan ilmu qoib yang dimiliki seseorang untuk mempersatukan/menjodohkan/menarik simpati lawan jenisnya agar bersedia untuk menjadi istri/suami. Dengan demikian, santet itu identik dengan "guna-guna" , "pelet" dan "pengasihian", yang bertujuan untuk mempertemukan dan bukannya memisahkan atau mencelakakan orang lain. Dalam pengertian demikian ini, santet dapat dikatakan tidak jelek. Oleh karena itu praktek "ilmu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga

santet" mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Terlebih-lebih, dalam prakteknya penggunaan ilmu santet cukup memberikan hasil yang memuaskan, sehingga cepat menyebar luar di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, para dukun santet mendapat permintaan untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup, seperti diantaranya menyembuhkan orang sakit, agar ujian lulus, agar segera mendapatkan pekerjaan, agar dagangannya laris sampai pada mencelakakan musuhnya. Tidak jarang para dukun santet memenuhi permintaan anggota masyarakat tertentu untuk mencelakakan orang lain dengan ilmu santetnya selama memperoleh imbalan yang memadai.

Untuk mencari kesembuhan (bila celaknya dalam bentuk penyakit) kepada dukun santet diberbagai tempat, jika ternyata penyakitnya mendapat "kiriman" dari dukun santet tertentu, menurut dukun santet yang dimintai tolong, dan atau karena dugaannya sendiri, maka dendam seseorang yang dicelakai berikut kerabatnya bahkan teman-teman dekatnya mulai terbentuk terhadap dukun santet yang dituduhkan tanpa bukti tersebut, yang kemudian akan berusaha membalas terhadap pengirimnya serta dukun santet yang mengirim.

Untuk membalas terhadap dukun santet yang mengirim, relatif banyak mengalami kesulitan, karena dukun santet lain yang dimintai tolong untuk membalas kepada sesama dukun santet pasti lebih sulit, dan mungkin karena solidaritas sesama dukun santet, karena itulah maka dendam terhadap dukun santet cenderung dipendam. Demikianlah seterusnya, sehingga orang yang dendam terhadap dukun santet semakin banyak atau meluas, namun belum berani membalas karena takut.

Oleh karena itu tidak jarang jika ada orang yang sakitnya tidak kunjung sembuh, maka akan menuduh dukun santet yang membuatnya sakit, walaupun sakitnya karena secara medis memang dalam kondisi sakit, sehingga dukun santet yang dituduh telah menyantetnya. Tetapi tuduhan tersebut sulit untuk dibuktikan secara ilmiah ataupun lewat hukum. Oleh karena itu jauh sebelum tahun 1998 pembunuhan terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet pernah terjadi walaupun relatif jarang.

Menurut para informan tersebut diatas, bahwa isu pemburuan dan pembunuhan dukun santet cepat berkembang menjadi pembicaraan dan opini umum dan bahkan menjadi tindakan umum atau massal karena adanya peran dari berbagai pihak, yang

diantaranya adanya orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan yang bersifat politis maupun kepentingan ekonomis. Orang yang mempunyai kepentingan politis dan memiliki kemampuan ekonomi kuat dengan mudah merekrut orang-orang untuk menyebar luaskan isu secara langsung kepada para tokoh masyarakat terutama para ulama, dan minta tolong institusi pers atau para jurnalis cetak maupun elektronik. Institusi keagamaan terutama para tokohnya dan institusi pers dapat dikatakan sangat efektif untuk membentuk dan menyebar luaskan suatu isu kecil dan lokal akan cepat menyebar dengan cepat dan luas diseantero wilayah negara.

Kenyataan tersebut dengan mudah dapat dipahami karena elektronik, khususnya televisi dapat dikatakan sebagai *"the big giant mass communication"*, sehingga isu pembunuhan dukun santet yang terjadi di Banyuwangi, bukan saja menyebar di seluruh wilayah Banyuwangi, tetapi dengan cepat menyebar ke beberapa kota lainnya seperti Situbondo, Jember, Probolinggo, Pasuruan dan beberapa kota lainnya.

### 1.3.3. Sebab dan Partisipasi Konflik

Tragedi pembunuhan dukun santet yang terjadi apabila dilihat akar permasalahan yang paling dasar dan paling dalam adalah adanya perbedaan kultur santet itu sendiri. Artinya bahwa di dalam masyarakat itu terdapat dua penafsiran yang kontroversial tentang santet.

Di satu pihak masyarakat menafsirkan bahwa budaya santet itu merupakan pemanfaatan kekuatan qoib putih (*white magic*) adalah lazim digunakan oleh warga masyarakat untuk membantu/meringankan berbagai persoalan hidup, khususnya untuk menarik simpati/cinta lawan jenisnya tanpa harus merugikan atau mencelakakan orang lain, yang kemudian sering disebut dengan penggunaan ilmu "pelet" atau "pengasihian".

Pemanfaatan kekuatan qoib untuk membantu warga masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan hidup tanpa merugikan pihak lain seperti yang berkembang di Banyuwangi itu juga tidak asing diberbagai wilayah di Indonesia saat ini. Orang yang menjalankan "profesi" itu dikenal dengan sebutan : paranormal, orang pinter, orang tua, dukun dan sebagainya. Bahkan dalam masyarakat kota yang dikenal rasional/modern, untuk perawatan kesehatannya telah tersedia berbagai fasilitas lengkap, canggih dan modern sekalipun, tidak sedikit warga kota yang memanfaatkan pengobatan alternatif.

Bagi warga masyarakat yang menderita sakit kemudian telah berusaha keras untuk penyembuhannya melalui pengobatan medis tetapi tidak menunjukkan kemajuan atau perkembangan yang menggembirakan atau justru mengalami kemunduran, maka kebanyakan mereka ini akan berpaling pada pengobatan alternatif.

Banyuwangi yang dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya agamis, tidak menolak berbagai praktek penggunaan kekuatan qoib yang putih (*white magic*), karena diyakini bahwa kekuatan qoib ini datangnya dari Tuhan yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang terpilih yang diantaranya sebagai suatu bentuk "mukjizat". Untuk itulah para pemimpin umat beragama, kyai misalnya ada beberapa diantaranya yang memiliki kekuatan qoib, guna membantu berbagai permasalahan hidup yang dihadapi oleh warga masyarakat. Semakin tinggi ilmu qoib yang dikuasai seseorang kyai dan semakin banyak kalangan masyarakat (baik kalangan tinggi, tengah dan bawah), semakin tinggi pretise seseorang kyai itu, dan semakin banyak masyarakat yang loyal terhadapnya.

Untuk itu tidaklah berlebihan untuk dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Banyuwangi pada khususnya, masih menerima berbagai praktek penggunaan ilmu qoib putih. dan sebagian besar dari masyarakat ini menolak berbagai praktek penggunaan kekuatan qoib hitam (*black magic*). Masyarakat yang menolak praktek penggunaan ilmu hitam (*black magic*), meyakini bahwa kekuatan qoib itu diperoleh dari bantuan iblis atau syetan/jin kafir.

Di lain pihak ada sekelompok anggota masyarakat yang menyetujui praktek penggunaan ilmu qoib hitam untuk mengatasi persoalan hidup walau harus mengorbankan orang lain, untuk itu penggunaan ilmu goin hitam ini sering diidentikkan dengan penggunaan ilmu "sihir" atau "tenung" dan sejenisnya. Seseorang yang merasa iri hati, sakit hati dan sejenisnya adakalanya akan memperhitungkan terhadap sumber penyebabnya dengan mengirimkan musibah melalui bantuan para dukun santet yang memiliki ilmu hitam.

Sehingga korbannya, jika suatu jenis usaha maka usahanya akan hancur, jika korbannya itu manusia/hewan, maka korban itu akan menderita sakit dan atau sampai mati. Untuk itulah, para dukun santet yang menggunakan atau ditengarai menggunakan ilmu hitam cenderung dimusuhi oleh masyarakat pada umumnya.

Eksistensi dukun santet yang menggunakan ilmu hitam pada dasarnya tidak berdiri sendiri, artinya bahwa dukun itu terus buka praktek kalau ada pasien yang memerlukan. Pasien/klien yang memerlukan hampir dilupakan banyak pihak, sebagai penyebab berkembang atau bertahannya budaya santet yang menggunakan ilmu hitam, yang sekaligus sebagai salah satu penyebab terjadinya tragedi pembunuhan dukun santet di Banyuwangi.

Namun yang harus bertanggung jawab atas korban santet yang dilakukan oleh dukun santet atas permintaan dari para kliennya, maka sementara ini dibebankan kepada para dukun santet yang diduga menggunakan ilmu hitam (*black magic*). Pembuktian akan kebenaran seseorang dukun santet itu menggunakan ilmu hitam memang tidak mudah karena sukar dibuktikan secara empirik, sehingga apabila mereka ini diajukan ke polisi, maka polisi akan kesulitan untuk menangkap karena tidak adanya rujukan yang material untuk dapat dijadikan dasar untuk penyidikan.

Itulah sebabnya, para korban dukun santet yang menggunakan ilmu hitam, baik korban itu sendiri (yang tidak sampai meninggal) berikut keluarga/kerabatnya, teman karibnya tidak dapat berbuat banyak kepada seseorang yang diduga menyantet (baik itu dukun santetnya maupun kepada seseorang yang minta bantuan dukun itu), kecuali dendam, menggerutu, frustrasi dan sejenisnya yang harus dipendam.

Konflik latent antara warga masyarakat yang anti penggunaan ilmu hitam dengan para dukun yang menggunakan ilmu hitam mampu bertahan lama karena banyak faktor, diantaranya adanya sebagian kecil warga masyarakat yang tetap membutuhkan disamping takut jika menindak sendiri harus berhadapan dengan polisi atau hukum.

Namun mengapa pada tahun 1997/1998 terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet dalam jumlah yang banyak serta dengan cara yang dapat dikatakan sadis? Kenyataan ini menurut para informan diatas, karena adanya pemicu yang sangat strategis, berupa gelombang reformasi diberbagai aspek yang melanda negara ini, yang kemudian diawali dengan jatuhnya pemerintahan orde baru, faktor yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan meletusnya konflik latent menjadi konflik manifest yang berupa pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat diantaranya adalah :

*Pertama.* kewibawaan pemerintah dan aparatnya mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini tidak terlepas dari kondisi politik makro di negeri ini.

*Kedua.* adanya fenomena toleransi yang tinggi terhadap perilaku vandalisme dan anarkhis. Kenyataan ini banyak dilakukan sebagian anggota masyarakat dan nampaknya anggota masyarakat lainnya maupun aparat tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Sehingga aksi massa, unjuk rasa, demonstrasi menjadi sangat marak bahkan dapat dikatakan menjadi tren masyarakat bahwa hukum formal sangat lemah kekuatannya bahkan masyarakat sering tidak peduli dengan hukum dan tidak percaya lagi dengan hukum yang ada di wilayahnya. Artinya muncul anggapan, tidak adanya kepastian hukum dan hukum seolah dapat "diperjual-belikan", sehingga untuk mendapatkan keadilan yang obyektif seolah tidak akan ditemui lagi.

*Ketiga,* adanya pendataan terhadap anggota masyarakat yang diduga sebagai dukun santet oleh pihak Koramil dan Kepala Desa atas perintah Bupati, yang dimaksudkan untuk mengamankan mereka, namun kenyataannya justru hal yang berkebalikan dan semakin resahnya masyarakat dan menumbuhsuburkan rasa saling curiga yang berkepanjangan.

*Keempat.* kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan masih ditimpa krisis ekonomi yang berkepanjangan, disinyalir dapat menjadi faktor penunjang suburnya eksistensi pembunuh bayaran. Disinyalir, orang-orang yang membantai orang yang diduga sebagai dukun santet adalah pembunuh bayaran yang dengan strateginya mampu melakukan mobilisasi massa dan melakukan provokasi sehingga pembunuhan dukun santet dilakukan secara massal. Dengan kata lain power yang berdimensi materi nampaknya mampu menciptakan "move" guna merealisasikan kepentingannya. Sinyalemen adanya permainan uang dalam kasus ini terbukti dengan adanya pelaku yang ditangkap dan dia mengaku mendapatkan bayaran untuk melakukan pembunuhan itu.

*Kelima,* adanya tendensi politis, nampak adanya kecenderungan pada saat itu untuk menghabisi kelompok tertentu, sehingga Bupati dipaksa mundur melalui permintaan yang ditanda tangani oleh sekitar 101 kyai di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Bupati dianggap sebagai figur yang kurang dapat menangani kasus ini dan tidak dapat menciptakan stabilitas sosial politik di Kabupaten Banyuwangi.

*Keenam*, adanya unsur balas dendam dari para korban, keluarga/kerabat dan orang-orang yang dekat. Hal ini diawali dengan adanya isu yang berkembang dalam masyarakat, jika akan melakukan sesuatu pada bulan tertentu di 1998 tidak ada tuntutan hukum. sehingga mereka yang dapat melakukan pembalasan seolah bagaikan pahlawan.

*Ketujuh*, adanya landasan moral atas fatwa kyai yang menyatakan bahwa mencelakakan orang dengan ilmu santet itu hukumnya dosa besar, sehingga darah dari para dukun santet itu halal. Pernyataan seseorang kyai yang demikian itu sebenarnya ditujukan kepada siapapun yang sering melakukan praktek ilmu hitam (*black magic*) seperti diantaranya apa yang disebut dengan santet, tenung, sihir dan sejenisnya, agar bersedia untuk berhenti dan bertaubat.

Namun didalam kenyataannya masyarakat menanggapi atau mempersepsi lain, artinya bahwa masyarakat seolah diwajibkan untuk memberantas para dukun santet dengan sara dibunuh, dan pembunuhan terhadap mereka ini dianggap tidak berdosa, atau justru mendapat pahala.

Dari beberapa sumber konflik yang telah dikemukakan tersebut, maka dapatlah ditarik benang merahnya, bahwa pemicu utama merebaknya kasus pembantaian kepada orang-orang yang diduga sebagai dukun santet adalah bergulirnya gelombang reformasi yang kemudian diikuti oleh menurunnya kewibawaan pemerintah beserta aparat penegak hukum dan sekaligus melemah atau surutnya supremasi hukum, kemudian masih dipercepat dengan adanya krisis ekonomi, sehingga situasi sosial ekonomi politik menjadi semakin kacau balau, menegangkan, menakutkan. Situasi yang demikian ini lalu dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan keinginan atau ambisi melalui skenario yang sistematis.

Pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet yang dilakukan oleh massa yang berasal dari desa dimana dukun santet itu sendiri bermukim ada pula warga masyarakat dari desa-desa lain yang tidak dapat dikenali secara tepat karena disamping jumlahnya sangat banyak (mungkin ratusan) dan umumnya dilakukan pada malam hari serta lampu banyak yang dipadamkan serta beberapa diantaranya dengan muka ditutup dengan kain ala ninja, demikian tutur Ketua MUI Banyuwangi, KH. Ali Muchoidlori Askandar.

Dalam konflik ini yang terlibat adalah massa/penduduk yang jumlahnya banyak itu beramai-ramai mendatangi orang-orang yang diduga sebagai dukun santet ke rumahnya masing-masing kemudian dieksekusi beramai-ramai pula. Kemudian setelah meninggal, korban ada yang digantung di pohon ada yang diseret ditaruh ditepi jalan raya dan sebagainya. Namun sebelum massa meninggalkan rumah korban ada beberapa diantaranya kemudian membakar rumah korban dan penyuruh penghuninya untuk keluar rumah sebelum dibakarnya. Dengan demikian konflik yang terjadi ini antara warga masyarakat dengan perorangan yang diduga sebagai dukun santet, dimana para dukun santet ini tidak melakukan perlawanan, kecuali beberapa yang telah mengetahui atau telah mendapat informasi sebelum eksekusi dilaksanakan, maka ada yang menyelamatkan diri dengan cara pergi ke daerah lain, umumnya mereka ini yang umurnya relatif muda (kurang dari 50 tahun).

Mengenai pola konflik yang dikisahkan oleh Pak Koesnadi, mantan Kepala Desa Kecamatan Kabat, namun saat peristiwa pembunuhan dukun santet dia masih menjabat. Menurutnya, sebelum peristiwa pembunuhan orang-orang yang diduga sebagai dukun santet di desa Tambong, khususnya Haji Syamsul dan keluarganya sudah mendengar informasi bahwa Haji Syamsul akan dijadikan salah satu sasaran pembunuhan. Oleh karena itu anaknya H. Syamsul berinisiatif untuk menyelenggarakan sumpah pocong terhadap warga di kecamatan Kabat yang diduga sebagai dukun santet.

Sehingga menetapkan hari dan tempat pelaksanaan dengan mengundang semua orang yang dicurigai mempunyai ilmu santet serta mengundang empat kyai, ternyata pada hari yang ditentukan empat kyai yang diminta untuk memimpin upacara sumpah pocong tidak satupun yang hadir sehingga ditunda hari berikutnya. Sebelum tiba hari besuk, ternyata malam harinya setelah sumpah pocong gagal warga masyarakat dari berbagai penjuru telah mendatangi rumah Haji Syamsul. Massa yang jumlahnya banyak sekali itu berteriak-teriak agar keluarganya menyerahkan H. Syamsul kalau keluarga masih menginginkan selamat, dan diantara warga saat itu ada yang melemparkan tali/tampar kedalam rumah H.Syamsul kemudian tali tersebut diambil oleh Haji Lukman (anak H. Syamsul yang berinisiatif melaksanakan sumpah pocong) kemudian dikalungkan ke leher H. Syamsul yang sudah berusia 78 tahun, maka diseret/ditariklah tampar itu oleh warga masyarakat, kemudian H. Syamsul jatuh dan terus diseret kira-kira 300 meter dari rumah



korban sampai di lapangan. Darah berceceran sepanjang jalan dari depan rumah korban sampai lapangan, karena berbagai benturan batu, aspal maupun benda lainnya yang dibawa massa untuk menganiaya korban.

Sesampai di lapangan, korban dianiaya massa dengan berbagai benda, dan diantara benda yang digunakan untuk menganiaya korban adalah kayu dan daun kelor. Karena kayu/pohon kelor sering dianggap sebagai "pengapesan" atau hilangnya kesaktian yang menggunakan ilmu hitam (black magic). Setelah korban meninggal kemudian diseret lagi sejauh kurang lebih 100 meter, tepat didepan balai desa, kemudian digantung di pohon.

Tragedi di Banyuwangi ini jelaslah bahwa korbannya adalah orang-orang (warga Banyuwangi juga) yang diduga mempunyai ilmu santet atau sebagai dukun santet. Kebenaran seseorang itu sebagai dukun santet atau bukan sukar untuk dibuktikan, oleh karena setiap pembunuhan terhadap korban itu dilakukan secara massal, maka seseorang yang dendam terhadap orang lain yang bukan santetpun dapat terjadi dengan cara difitnah.

Pembunuhan terhadap orang yang diduga dukun santet tidaklah mungkin tanpa ada rencana sebelumnya. Hal ini nampak dari indikator seperti terorganisirnya massa untuk mendatangi dan mengeksekusi korban demi korban. Dan pelaksanaannyapun/momentumnya memilih waktu yang sangat tepat dimana sebagian besar dilaksanakan pada bulan September 1998, pada saat itu marak-maraknya masyarakat, khususnya para mahasiswa dari berbagai organisasi sosial untuk melakukan unjuk rasa tentang berbagai permasalahan bangsa yang terjadi di seluruh kota-kota besar di Indonesia setelah jatuhnya penguasa orde baru. Sampai sekarang perencana dan provokatornya belum ada yang tertangkap.

Selain warga yang dituduh sebagai dukun santet, dan para pelaku pembunuhan yang dapat dikatakan sebagai korban tragedi Banyuwangi, kiranya H. Turyono Purnomo Sidik, Bupati Banyuwangi saat kejadian itu berlangsung, kemudian didaulat untuk turun jabatan secara ikhlas melalui permintaan yang ditanda tangai oleh 101 kyai yang berada di Banyuwangi, yang kemudian permintaan itu dipenuhi, karena itu beliau ini juga di golongan sebagai orang yang dikorbankan.

### 1.3.4. Konstruksi Konflik

Menurut informasi dari Bpk. Sugihartoyo, SH (Aktivis LSM, dan Rektor Untag Banyuwangi), hingga saat ini kehidupan sosio kultural masyarakat Banyuwangi dilingkupi oleh sebuah pola yang sangat paternalistik. Pola ini tidak saja disektor sosio kultural semata melainkan juga mewarnai sendi-sendi kehidupan lain seperti ekonomi dan politik. Disadari atau tidak, iklim paternalistik tersebut menghidupkan bahkan memposisikan peran kyai amat dominan. Kyai dipandang sebagai figur yang secara religius memiliki "power" dan pengaruh yang sangat kuat dikalangan masyarakat Banyuwangi. Kondisi masyarakat Banyuwangi dikenal sebagai masyarakat yang religius nampaknya melestarikan dan menyuburkan posisi kyai pada peran superordinasi di atas yang lain, tidak terkecuali kalangan eksekutif.

Banyaknya pihak yang memanfaatkan peran kyai, nampaknya menyebabkan posisi kyai berada diatas angin. Kyai banyak dijadikan tempat untuk bertanya dari berbagai kalangan. Untuk dapat menduduki posisi tertentu dan agar dapat langggeng memegang jabatan, para pejabat harus "sowan" terlebih dahulu ke kyai untuk mendapatkan nasehat dan do'a restu. Pemanfaatan kyai ini tampak juga pada saat menjelang pemilihan Bupati misalnya. Pada saat yang demikian ini tidak sedikit para "petualang" politik berusaha mendekati kyai.

Digulirkannya isu santet sebagai komoditas politik untuk merubah situasi sosial kemasyarakatan juga tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang bersifat homogen dalam hal agama/kepercayaan. Seperti diketahui bahwa hampir diseluruh desa di Banyuwangi memiliki pondok pesantren. Antar pondok pesantren terjalin komunikasi/interaksi yang baik, sehingga jika ada isu tertentu disuatu pondok pesantren akan cepat menyebar ke yang lain. Kondisi yang homogen dan karakter kultur yang solid ini dapat dianggap sebagai "modal" yang sangat strategis bagi pihak tertentu yang akan memanfaatkan melalui wibawa kyai, untuk kepentingan pribadi/kelompok tertentu.

Disinyalir kasus pembunuhan dukun santet sebagai realisasi dari adanya desain tertentu. Artinya, keresahan dan kekacauan diciptakan untuk selanjutnya dijadikan "kendaraan politik" bagi kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu. Sehingga ada dugaan yang kuat bahwa kasus pembunuhan dukun santet itu merupakan tendensi politis sebagai usaha untuk menyingkirkan figur pejabat tertentu. Gejala tersebut nampak,

dengan adanya peristiwa pembunuhan dukun santet yang semakin mencemaskan dan menakutkan itu tidak kunjung reda, namun setelah bupati dipaksa mengundurkan diri melalui permintaan yang ditanda tangani oleh sekitar 101 kyai di wilayah Banyuwangi. Karena bupati dianggap tidak mampu menangani kasus ini dan tidak dapat menciptakan stabilitas sosial politik di wilayahnya, sehingga merebak kasus pembunuhan dukun santet itu diduga merupakan konspirasi politik.

Namun demikian, konstruksi proses pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet itu melalui jalinan komunikasi interpersonal antar warga masyarakat sehingga terbentuk opini yang kuat, bahwa praktek yang dilakukan dukun santet itu diduga telah menelan korban sangat banyak, seperti sakit ataupun meninggalnya warga masyarakat yang mendadak bahkan dinilai tidak wajar, sehingga mencemaskan, menakutkan dan membuat warga masyarakat dendam. Opini sebagian penduduk terhadap dukun santet yang demikian itu terakumulasi dengan kondisi saat peristiwa itu terjadi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional lebih cepat terbakar dan menyebar lewat kontribusi yang diberikan oleh media cetak maupun elektronik.

### 1.3.5. Kerugian Sosial

Kerugian yang diderita oleh ahli waris mereka ini tentunya tidaklah dapat diukur dengan nilai uang, namun yang jelas bila diukur dengan nilai ekonomik bagi ahli waris, jika mereka ini sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, maka sedikit banyak ekonomi keluarga akan terganggu. Sedang kerugian dari aspek psikologis, anggota keluarga yang ditinggalkan akan mengalami depresi, trauma dan mungkin malu terhadap tetangga dan sanak keluarga yang lain. Disamping itu, anggota keluarga yang ditinggalkan ini akan merasa dendam, terlebih-lebih jika anggota keluarga/orang tua yang dibunuh itu benar-benar bukan dukun santet, tetapi karena dendam pribadi terhadap orang lain yang kemudian difitnah.

Kerugian yang lain adalah luka parahnya 13 orang karena penganiayaan massa. Mereka ini pasti mengeluarkan biaya untuk pengobatannya, namun sayangnya data ini tidak terdeteksi. Mereka ini berikut anggota keluarganya tentunya masih bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih diberi kesempatan untuk hidup, walaupun harus

mengeluarkan biaya perawatan. Namun, biaya sosio psikologis yang mereka tanggung adalah perasaan takut, tertekan dan depresi tidak akan cepat hilang begitu saja.

### **1.3.6. Peredam konflik**

Beberapa upaya yang ditempuh untuk meredakan tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet telah dilakukan di antaranya :

Pertama. Bupati beserta jajarannya mencoba melakukan peredaman kasus ini dengan cara menginventarisir orang-orang yang diduga sebagai dukun santet, dan kemudian diminta untuk sementara menyingkir di luar Kabupaten Banyuwangi. Cara yang ditempuh Bupati ini, terdapat sebagian kecil ada yang menuruti, dan sebagian kecil lainnya menolak , sedang sebagian besar belum sempat menagamakan diri telah kedahuluan dieksekusi oleh massa. Data yang dihimpun Bupati ini justru mempermudah dan mempercepat proses pengeksekusian massa, karena takut kehilangan buruannya.

Kedua, dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat untuk menyelenggarakan sumpah pocong terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet. Ternyata penyelenggaraan sumpah pocong tidak efektif sebagai resep peredam kasus pembunuhan dukun santet.

Ketiga, dilakukan oleh Bupati yang baru saja terpilih, yaitu dengan mengajak unsur Muspida (Bupati, Danramil dan Kapolres) ditambah para kyai dan Banser maupun Pagar Nusa serta MUI dengan cara memberikan pengertian lewat masjid-masjid untuk menghentikan tindakan pembunuhan terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet, karena membunuh itu berdosa dan merupakan tindakan kriminal. Disamping itu, pihak kepolisian yang dibantu Banser dan Pagar Nusa menangkap penduduk yang diduga sebagai pelaku pembunuhan, kemudian diajukan ke pengadilan sekitar 200 orang tersangka. Mereka ini dijatuhi hukuman yang variatif antara 2 sampai 8 tahun penjara. Ternyata dengan cara ini kasus pembunuhan terhadap dukun santet langsung berhenti.

## **1.4. Kasus Konflik di Kabupaten Pasuruan**

Secara umum kasus-kasus konflik yang ada di kabupaten Pasuruan relatif cukup banyak, terutama dalam sepuluh tahun terakhir dan bahkan mungkin jauh

sebelumnya. Kasus-kasus tersebut, apabila dikategorikan berdasarkan issue yang muncul, terdiri atas:

#### **1.4.1. Konflik/Sengketa Tanah:**

Konflik tanah yang terjadi di Pasuruan terjadi antara: (1) penduduk di Kecamatan Kraton, Bangil dan Rembang dengan pihak TNI-Angkatan Udara; (2) penduduk di Kecamatan Lekok dan Nguling dengan pihak TNI-Angkatan Laut; (3) Penduduk di Kecamatan Bangil dengan PIER (Pasuruan Industrial Estate- Rembang).

Sengketa tanah antara penduduk kecamatan Kraton, Bangil dan Rembang dengan TNI-Angkatan Udara. Kasus sengketa ini bisa dikatakan sudah sampai pada skala nasional, artinya konflik ini pernah diupayakan untuk dimediasi oleh Komnas HAM tingkat Nasional, akan tetapi belum ada tindak lanjut yang nyata bagi masyarakat maupun pihak TNI-AU.

Kasus ini mulai muncul sejak tahun 1989, di mana ada seorang tokoh LSM (Bapak M. Roqib Jamaludin) yang melakukan pembelaan terhadap warga masyarakat yang tanahnya diduduki oleh pihak TNI-AU. Penduduk setempat menganggap bahwa tanah yang dikuasi TNI-AU adalah tanah milik leluhur mereka, sejak dahulu kala (sebelum tentara Jepang masuk Ke Indonesia).

Ketika jaman pendudukan Jepang, tanah-tanah yang sekarang dikuasi TNI-AU, adalah milik warga masyarakat yang dirampas oleh Jepang. Apabila warga tidak mau menyerahkan tanahnya kepada tentara Jepang, maka akan dipotong lehernya. Dengan segala keterpaksaan akhirnya warga menyerahkan hak milik mereka.

Setelah Indonesia merdeka, tanah seluas 930 Hektar tersebut berpindah tangan ke TNI-AU. Proses perpindahan kepemilikan tanah itu tidak begitu saja terjadi. Pada awalnya, TNI-AU menyewa tanah kepada masyarakat disebelah rel kereta api dan membangun kantor di sana. Namun lama-kelamaan mereka mengakui tanah itu sebagai miliknya dan mencaplok tanah di wilayah-wilayah disekitarnya (Desa Raci, Desa Bendungan, Desa Rejosari, Desa Curah Dukuh, Desa Mojo Paron dan Desa pandean).

Menurut Bp. Roqib, sejak tahun 1960 (sebelum meletusnya G30S PKI) ayahnya telah berupaya ke DPR untuk menuntut pengembalian tanah yang menjadi haknya (setelah ayahnya meninggal, usaha untuk mengadu ke DPR diteruskan olehnya). Karena

tidak ditanggapi secara serius oleh DPR pada waktu itu, maka banyak orang-orang tua (kawan-kawan dari Ayah pak Roqib) yang mengalami tekanan jiwa akibat stress memikirkan tanah yang tidak kunjung kembali.

Banyak pula orang-orang tua yang meninggal karena tidak kuat menanggung tekanan akibat tanah milik mereka dikuasai oleh TNI-AU. Pihak TNI-AU sendiri sebetulnya tidak memiliki bukti-bukti kuat tentang kepemilikan tanah di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Masyarakat merasa bahwa merekalah yang secara sah dan kuat memiliki hak atas tanah, karena mereka memiliki bukti buku C (Buku letter C dianggap sudah merupakan sertifikat apabila merunut UU no. 60).

Tetapi oleh penguasa pada saat itu (Bupati Pasuruan ketika itu berasal dari TNI-AU) dibuatkan sertifikat untuk TNI-AU. Dengan adanya sertifikat baru tersebut maka TNI-AU merasa tanah seluas itu adalah hak mereka dan akan digunakan semuanya untuk kepentingan mereka. Tanah itu sedianya oleh TNI-AU akan dijadikan Pusat Pendidikan Militer Internasional dan aktifitas Pangkalan.

Masyarakat mulai bergerak melawan arogansi TNI-AU ketika pihak TNI-AU memagari rumah-rumah penduduk dengan kawat berduri yang bisa membahayakan keselamatan penduduk. Tujuan pemagaran itu adalah agar warga masyarakat tidak melangkah jauh mengambil tanah atau membangun di atas tanah yang dikuasai TNI-AU. Akibat perlakuan TNI-AU tersebut, terjadi bentrokan antara warga dengan aparat militer, dimana banyak masyarakat yang ditembak dan diringkus oleh aparat.

Masyarakat banyak yang diintimidasi untuk pindah atau meninggalkan tanah yang dikuasai TNI-AU, terutama ketika pihak TNI-AU mengukur tanah-tanah yang ada di wilayah tersebut. Ketika proses pengukuran tanah dilakukan mereka membawa senjata untuk menakut-nakuti warga masyarakat. Sebelum ada LSM yang melakukan pendampingan terhadap warga, masyarakat yang ingin menanami tanah di wilayah TNI-AU itu harus menyewa.

Tetapi ketika LSM berjuang membela kepentingan warga, maka pihak TNI -AU tidak berani lagi menarik uang sewa dari masyarakat. Dari sini terlihat, bahwa hak-hak rakyat atas tanah mereka sendiri telah dirampas oleh TNI-AU. Tanah-tanah yang sudah ditanami warga dengan tanaman polowijo, dihancurkan oleh anggota TNI-AU.

Kemudian oleh TNI-AU, yang bekerja sama dengan perusahaan hortikultura, tanah-tanah itu ditanami pohon mangga untuk kepentingan bisnis mereka. Ada upaya juga dari Bupati Pasuruan (yang juga salah satu anggota TNI-AU) sebelum Bupati yang sekarang, untuk menjual sebagian tanah tersebut (kurang-lebih seluas 800 hektar) kepada investor yang akan membangun Taman Safari II, pada tahun 1989/1990.

Tetapi upaya ini nampaknya gagal. Pada tahun 1993/1994 mulai ada simpati dari pemerintah, terutama sesudah terjadinya pergantian bupati Pasuruan. Pemerintah menjadi fasilitator dan mediator antara masyarakat dengan pihak TNI-AU. Pada tahun-tahun itu juga, Fraksi Karya Pembangunan membantu masyarakat untuk menyelesaikan konfliknya dengan pihak TNI-AU.

Pada tahun 1995 dan 1996 masalah ini sampai ditangan KOMNAS HAM tetapi sampai tahun 2000 ini belum ada titik terang tentang kejelasan hak-hak masyarakat atas tanah tersebut. Dari pihak pemimpin informal, yang dalam hal ini banyak dilakukan oleh para ulama, juga ada upaya-upaya meredam konflik fertikal tersebut. Akibat yang cukup memprihatinkan dari konflik ini, ada sejumlah warga yang sampai saat ini tidak mau mengibarkan Bendera Merah Putih dalam memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah, karena mereka merasa belum merdeka (setelah tanahnya dirampas oleh tentara Jepang, lalu belum sampai mereka menikmati kebebasan mengelola tanahnya sendiri, ternyata tanah itu telah diserobot dan dikuasai oleh TNI-AU).

#### **1.4.2. Sengketa tanah antara warga masyarakat (kecamatan Lekok dan Nguling) dengan TNI Angkatan Laut (PROKIMAL).**

Kasus sengketa tanah itu terjadi di desa Alas Tlogo, Sumber Anyar dan Waru serta lima desa lainnya di dua kecamatan tersebut. Luas tanah yang menjadi sengketa sebesar 4000 hektar. Para petani di wilayah-wilayah tersebut menggugat TNI-AL yang sudah menguasai tanah mereka, untuk segera mengembalikan hak (tanah) mereka. Kasus ini dipicu oleh adanya keyakinan dari sebagian masyarakat yang merasa bahwa dalam kasus jual-beli tanah itu mereka dipaksa atau ditekan, sehingga mau-tidak mau mereka harus menjualnya ke TNI-AL.

Namun ada sebagian masyarakat yang menganggap sah proses jual-beli tanah antara warga dengan pihak TNI-AL. Dengan demikian di antara masyarakat di dua lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga

kecamatan tersebut ada kontradiksi antara yang mengakui keabsahan prosedur jual-beli dengan yang tidak mengakui keabsahannya (ini merupakan potensial konflik yang bersifat horisontal).

Dengan adanya konflik tersebut, warga di wilayah-wilayah itu banyak yang pindah tempat tinggal ke Desa Grati (daerahnya disebut Kampung Baru). Oleh TNI-AL, tanah itu rencananya akan digunakan untuk pembuatan Pangkalan Angkatan Laut Internasional. Proses penyelesaian konflik, hingga saat ini (tahun 2000) masih mengambang. Pihak DPRD kabupaten Pasuruan pun pernah berupaya mendatangi warga (pada bulan November 1999) untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut melalui perundingan secara damai dengan pihak TNI-AL. Namun hasilnya, sampai saat ini belum kelihatan.

Para alim ulama dari wilayah itu sudah berusaha untuk meredam konflik, akan tetapi mereka tidak berhasil. Hal ini disebabkan penduduk desa, terutama dari desa Alas Tlogo terlalu emosional, karena seluruh wilayah desanya memang milik TNI-AL. Penduduk desa Alas Tlogo juga berbuat anarkis, yaitu dengan merusak pipa-pipa air yang dulu dibangun oleh PT. Kebon Grati Agung anak perusahaan milik PT. Rajawali Nusantara Indonesia (milik Departemen Keuangan RI).

Perusakan pipa air tersebut ternyata pada akhirnya merugikan mereka sendiri, di mana mereka kembali harus berjalan jauh, sampai tiga kilometer, hanya untuk mengambil air bersih dari desa Waru. Konflik horisontal yang terjadi di antara warga juga terjadi dalam kaitan dengan kasus ini.

Beberapa kasus konflik intern itu antara lain adalah antara warga merusak pipa dengan warga yang memiliki ternak sapi yang merasa jengkel karena kecukupan pangan dan air menjadi sulit didapat, karena perusakan pipa-pipa air tersebut. Konflik intern lainnya adalah ada sebagian warga yang mencari kesempatan dengan bekerja sama dengan pihak pengacara, yang pada akhirnya ternyata mereka hanya ingin "menguras" uang masyarakat dengan menjanjikan kasus ini akan diperkarakan di pengadilan. Pada kenyataannya kasus ini, hingga kini masih terkatung-katung sedangkan pengacaranya melarikan diri setelah ia menerima uang dari masyarakat.



### 1.4.3. Sengketa tanah antara warga masyarakat dengan PIER.

Warga yang bersengketa berada di Desa Raci, Kecamatan Bangil. Sengketa tersebut berawal dari proses jual beli tanah yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat (para petani). Peristiwa ini pada awalnya terjadi pada tahun 1986, di mana PIER berniat membeli tanah warga, tetapi PIER melakukan jual beli tanah tersebut dengan cara-cara yang tidak prosedural (asal ada surat dari kepala desa Raci maka warga dapat menjual tanahnya pada PIER).

Ada sebagian warga yang merasa proses jual beli tanah itu dilakukan secara sepihak, di mana mereka merasa tidak menjual tanah pada PIER, tetapi sudah ada bukti jual-beli. Setelah ditelusuri ternyata pihak yang melakukan jual-beli adalah kepala desa dengan PIER. Kepala desa membuat KTP atas nama orang lain, dan orang tersebut disuruh mengakui bahwa tanah itu miliknya. Dalam hal ini kepala desa bekerja sama dengan camat yang memberikan stempel pada sertifikat jual beli. Upaya penyelesaian masalah ini dilakukan dengan mengajukan kepala desa (yang telah melakukan penvelewangan) ke pengadilan.

Akan tetapi kepala desa yang bersangkutan telah melarikan diri, sehingga penyelesaian sengketa tersebut belum tuntas hingga kini. Masyarakat yang bersengketa tidak mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis (tidak ada yang menakut-nakuti atau mengancam dengan senjata), akan tetapi mereka merasa tanah yang menjadi haknya telah dirampas. Warga masyarakat sempat menanyakan ke PIER, namun PIER menyangkal bahwa pihaknya telah merampas tanah warga, karena ada bukti kepemilikan sertifikat, meskipun sertifikat itu menurut masyarakat dianggap palsu, tetapi oleh PIER tetap dianggap memiliki kekuatan hukum.

Saluran untuk mengakomodasi kepentingan petani nampaknya belum ada, sehingga petani merasa kebingungan untuk mengadukan dan menyelesaikan masalahnya. Warga juga telah mengadukan kasusnya ke petani, namun pihak kepolisian tidak menanggapi secara positif. Barulah pada tahun 1999, warga masyarakat dapat menyalurkan persoalan mereka dengan mengadu ke DPRD. Pihak DPRD pun bersikap proaktif, dengan upayanya memanggil Kepala Desa Raci dan Camat Bangil.

Namun, kepala desa yang dimaksud tidak mau datang memenuhi panggilan DPRD. Para alim ulama dan pemerintah sendiri juga berinisiatif membantu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga

menyelesaikan sengketa dan berusaha menciptakan intergrasi masyarakat dengan mengadakan acara manakiban dan istighotsah bersama (manakiban adalah pembacaan sejarah yang dilakukan oleh para iman, ulama dan mujahid). Namun demikian, warga masyarakat tetapi merasa kecewa dengan pihak kepolisian, karena pengaduan-pengaduan mereka tidak direspon dan pada akhirnya masyarakat menganggap bahwa kepolisian tidak mampu menyelesaikan sengketa (polisi dianggap maling oleh warga masyarakat).

#### **1.4.4. Konflik Antar Warga Masyarakat**

##### **1.4.4.1. Konflik Antar Kelompok Nelayan**

Konflik masyarakat yang tergolong horisontal terjadi antara kelompok nelayan di desa Kaliagung, Wates Tani dan Semedu Sari. Pemicu konflik adalah saling berebut dan "serobot" wilayah tangkapan ikan. Konflik ini ternyata memakan korban, yakni pernah terjadi kasus pembunuhan di antara warga dari kelompok yang saling bertikai.

Kasus pertikaian antar nelayan tersebut bisa segera diselesaikan, baik oleh pihak-pihak yang berkonflik maupun oleh pihak kepolisian setempat, dan kasus ini tidak sampai meluas ke wilayah-wilayah lain sehingga tidak memicu terjadinya kerusuhan yang lebih besar.

##### **1.4.4.2. Konflik yang disebabkan oleh issue santet.**

Pemicu konflik ini adalah karena ketidakpahaman masyarakat akan berbagai jenis penyakit yang sebetulnya secara medis bisa disembuhkan. Wilayah yang warganya cenderung sering berkonflik karena santet adalah : di Kecamatan Lekok dan Nguling, serta di desa-desa yang sebagian besar masyarakatnya beretnis Madura, seperti di desa Pasrepan, Pandaan, Winongan dan Rembang. Menurut Wakil Kasi Intel Polres Pasuruan (Bapak Bambang),

Hal-hal yang memperuncing kasus konflik santet ini adalah karena warga di wilayah-wilayah tersebut kebanyakan berpendidikan rendah dan memiliki rasa curiga yang sangat tinggi. Sebagai contoh, apabila ada salah satu warga yang sakit dan tidak segera sembuh, kemudian anggota keluarganya meminta tolong seseorang yang dianggap mampu mengobati tetapi kebetulan orang tersebut tidak mau atau tidak mampu

mengobati, maka anggota keluarga dari si sakit itu akan segera menyebar isu bahwa orang yang dimintai tolong itu adalah tukang santet.

Ternyata secara kultural, khususnya untuk warga keturunan etnis madura (disebut sebagai orang-orang pedalungan) yang menetap di Pasuruan, mereka telah cukup lama mengenai dan mempercayai santet. Bahkan sebelum kasus santet di Banyuwangi merebak. Kepolisian di Kabupaten Pasuruan (juga di Kejaksaan Bangil) cukup banyak menangani perkara akibat saling bunuh antara kelompok keluarga yang katanya terkena santet dan kelompok keluarga yang dicurigai telah menyantet.

Untuk kasus santet di Kabupaten Pasuruan, hingga saat ini (tahun 2000, dan kasus santet pada tahun ini yang ditangani di kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan masih mendominasi) belum ada penanganan yang serius dari pemerintah daerah, paling tidak Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan belum meneliti penyakit-penyakit yang terjadi di wilayah pedesaan yang masih mempercayai santet.

#### **1.4.4.3. Konflik Antara Kelompok Masyarakat dengan Kepolisian**

Terjadi pada tahun 1997, tepatnya ketika diadakannya kampanye putaran terakhir. Menurut pihak kepolisian Kabupaten Pasuruan, konflik itu dipicu oleh kesalahpahaman di antara peserta kampanye pada saat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan kegiatannya.

Menurut analisis pihak kepolisian, peserta itu ditunggangi oleh kelompok masyarakat yang justru bukan berasal dari Pasuruan, melainkan dari Probolinggo sampai ke timur dan dari Madura, di mana mereka tidak menunjukkan ciri-ciri khusus dari golongan PPP. Mereka mungkin bermaksud mengadu domba antara warga masyarakat dengan aparat kepolisian.

Peserta yang brutal itu melakukan tindakan anarkis dengan cara mengejar-ngejar aparat, merusak pos polisi di depan alun-alun Bangil dan membakar kijing inventaris polsek Bangil. Konflik bisa diredam pada saat 1 x 24 jam. Namun pada saat itu ada bantuan dari Brimob yang pada awalnya juga dikejar-kejar oleh massa hingga pasukan Brimob itu mundur sampai ke polsek Bangil, hingga ada korban dari pihak aparat, termasuk satu sepeda motor milik seorang Polisi Militer dibakar.

Masih menurut analisis polisi, pelaku-pelaku kerusuhan tersebut sebenarnya adalah narapidana (penjahat) yang pernah ditahan oleh pihak kepolisian, dan mereka menggunakan moment tersebut untuk balas dendam terhadap polisi yang mungkin pernah memidanakan mereka.

#### **1.4.4.4. Konflik Antara Warga Masyarakat dengan Perusahaan**

Banyak perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Pasuruan yang tergolong sebagai industri besar dan modern. Kebanyak dari perusahaan-perusahaan tersebut membuang limbahnya, yang berupa zat-zat kimia, baik berupa cairan, uap (yang dapat menimbulkan bau dan mengganggu pernafasan) atau limbah padat lainnya, di sekitar pemukiman, sawah atau tambak milik penduduk.

Akibatnya, masyarakat merasa dirugikan dan timbul konflik di antara perusahaan dengan warga masyarakat sekitar. Ada empat contoh kasus konflik dengan issue pencemaran limbah yang melibatkan masyarakat dengan pihak industri. Keempat kasus tersebut adalah sebagai berikut :

*Pertama.* Konflik antara warga masyarakat dengan PT. Cross Fill. Konflik ini terjadi juga di Desa Raci, Kecamatan Bangil. Pihak yang berkonflik terutama adalah petani tambak dengan PT Cross Fill ( kebetulan juga berada di kawasan PIER) yang menurut para petani tambak, perusahaan itu (memproduksi bahan baku untuk sabun dan odol) membuang limbahnya ke sungai yang airnya masuk ke tambak mereka.

Para petani tambak merasa dirugikan karena airnya kotor dan terkontaminasi zat-zat kimia. Perusahaan ini pernah berhenti beroperasi karena tuntutan masyarakat di sekitarnya. Konflik ini tidak sampai menimbulkan korban atau kekerasan fisik, tetapi sengketa ini sempat ditangani oleh Muspida hingga Wakil Gubernur yang datang ke lokasi kejadian, karena perusahaan yang berkonflik adalah milik PMA (patungan antara Inggris dan Belanda).

Ada pula kelompok masyarakat yang berusaha ingin menengahi kasus konflik tersebut (disebut tim sebelas) tetapi ternyata mereka tidak menyampaikan aspirasi masyarakat, malahan mereka memeras (meminta sejumlah uang) PT. Cross Fill untuk kepentingan tim sebelas itu sendiri. Tim sebelas ini akhirnya dibubarkan oleh masyarakat sendiri. Konflik ini dapat diselesaikan dengan bantuan alim ulama dan pemerintah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga

---

daerah di mana pihak perusahaan diminta untuk membuang kolam indikator untuk pembuangan air limbah.

*Kedua.* konflik antara warga masyarakat dengan PT. Chiel Samsung Indonesia. Konflik ini juga dipicu oleh limbah pabrik, yang terjadi di desa-desa Kecamatan Rejoso. Konflik ini menajam hingga menimbulkan kerusuhan besar (yang sempat terekspos secara luas hingga ke tingkat nasional) terjadi pada tahun 1995. Masalah yang memicu konflik adalah soal pembuangan limbah yang menurut warga merusak habitat tambak yang ada di desa-desa disekitar kecamatan Rejoso. Pada tanggal 14 November 1995 terjadi kerusuhan besar di mana penduduk yang beraksi di PT. CSI berjumlah sekitar 500 orang. Aksi massa ini juga menimbulkan kerugian besar bagi PT. CSI hingga empat milyar rupiah. sedangkan di pihak warga, ada korban (digebuki aparat kepolisian) tapi tidak sampai terjadi korban jiwa. Yang menarik, pihak yang menerima sanksi hukum akibat kasus ini ternyata sebagian besar bukan dari pihak masyarakat petambak di wilayah itu, tetapi orang-orang dari wilayah Jenggawah atau Jember dan probolingga yang dibayar serta mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi di Malang. Berdasarkan analisis dari pihak PT. CSI, kasus konflik limbah ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang membuat PT. CSI sebagai sasaran antara untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto, karena ada yang menduga, bahwa CSI adalah perusahaan milik kroninya Soeharto.

*Ketiga.* konflik antara warga masyarakat dengan PT. Indofood Sukses Makmur. Warga masyarakat yang berkonflik dengan PT. Indofood berada di sekitar Kecamatan Gempol. Pada awalnya masyarakat mempersoalkan pencemaran limbah dari perusahaan tersebut. Namun kemudian persoalan yang muncul merembet hingga pada tuntutan atau keinginan warga masyarakat agar mereka dapat dipekerjakan di perusahaan tersebut. Tetapi dari pihak perusahaan tidak bisa menerima, dengan alasan setiap karyawan yang bekerja harus punya sumber daya manusia yang memenuhi syarat. Sedangkan sumber daya masyarakat di sekitar wilayah kecamatan Gempol kebanyakan tidak memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan.

*Keempat.* konflik antara warga masyarakat dengan PT. Agip Lubrindo Pratama (PT.ALP). Konflik ini juga berkaitan dengan masalah pencemaran limbah yang terjadi di Kelurahan Legok, tepatnya di dusun Tempel (wilayah di mana PT. ALP ini berdiri).

Limbah yang dipersoalkan oleh warga adalah masalah bau yang menyengat yang dihasilkan oleh dari pengolahan oli bekas. Masyarakat pernah mendatangkan seorang ahli kimia untuk meneliti masalah bau dari PT. ALP dan juga berkonsultasi dengan seorang dokter.

Hasil dari penelitian dan konsultasi itu menjadi pegangan masyarakat untuk menggugat perusahaan. Upaya mencari jalan keluar pernah dilakukan, baik oleh PT. ALP, Pemda Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Dusun Tempel. Dalam konteks mencari jalan keluar itu, masyarakat membentuk Tim Sepuluh, yang bertugas mengawasi uji coba produksi di PT. ALP. Tim ini ternyata tidak bisa memenuhi harapan masyarakat, karena ada dugaan mereka menerima suap dari perusahaan. Hingga pada akhirnya masyarakat melakukan pengerahan massa, sehingga beberapa kali terjadi demonstrasi disertai dengan pengrusakan kantor dan laboratorium perusahaan. Akibat aksi tersebut, ada beberapa warga yang ditahan pihak kepolisian. Persepsi yang muncul dari kalangan birokrasi lokal, PT. ALP kurang memberi perhatian pada masyarakat sekitar.

## **2. Potensi Konflik Dan Problema Kesenjangan Sosial Di Jawa Timur: Analisis Dan Interpretasi Teoritik**

Sebagai sebuah wilayah yang dihuni penduduk dari berbagai kelompok dan kelas sosial, Provinsi Jawa Timur sebetulnya bukan saja rawan konflik, tetapi juga rawan mengalami berbagai bentuk disintegrasi sosial. Pengalaman dalam satu dekade terakhir telah banyak memperlihatkan bahwa yang namanya konflik tidak sekali-dua kali terjadi di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur karena dipicu oleh berbagai sebab. Konflik yang sifatnya horizontal maupun vertikal relatif intens terjadi, bahkan dalam skala yang sangat keras: menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa. Aksi unjuk rasa buruh, bentrokan yang terjadi antarpengukung partai dan kandidat pimpinan daerah, konflik yang dipicu isu SARA, konflik dalam perebutan sumber-sumber produksi, dan sebagainya adalah berbagai jenis konflik yang dalam lima tahun atau satu dekade terakhir kerap kali terjadi di berbagai kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Apa sebetulnya yang menjadi penyebab terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan integrasi masyarakat di Provinsi Jawa Timur? Mekanisme macam apakah yang biasa dikembangkan masyarakat Jawa Timur untuk meredam terjadinya konflik

agar tidak berkembang makin parah. dan sebagai gantinya menjaga serta menumbuhkan hubungan keserasian sosial yang fungsional untuk menjaga perdamaian? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab. sebab sekalipun di satu sisi Provinsi Jawa Timur memendam potensi konflik yang terbuka dan intensitas terjadinya konflik cukup kerap. tetapi di sisi yang lain di kalangan masyarakat sendiri ternyata juga telah terbukti memiliki daya resistensi dan mekanisme adaptasi tersendiri untuk meredam agar konflik yang terjadi tidak makin pecah hingga memporak-porandakan keseluruhan tatanan yang ada. Bahkan, secara obyektif harus diakui bahwa masyarakat Jawa Timur sendiri sebenarnya memiliki mekanisme tersendiri yang terbukti fungsional menjaga agar berbagai perbedaan yang ada dapat diterima semua pihak, tanpa harus merusak *equilibrium system* secara keseluruhan.

Bab ini, secara rinci akan mencoba memaparkan latar belakang dan sumber penyebab terjadinya konflik di Provinsi Jawa Timur, pola-pola terjadinya konflik, konflik dan gerakan sosial, dan peran pranata dan kearifan lokal yang dikembangkan dalam membangun keserasian sosial. Apa yang dipaparkan dalam bab ini adalah hasil pelacakan informasi dari berita-berita media massa, hasil investigasi dari lapangan dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan serta warga masyarakat di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

## 2.1. Latar Belakang dan Sumber Masalah

Latar belakang terjadi konflik secara teoritis bermacam-macam, dan berbeda-beda antara komunitas satu dengan yang lain. Konflik, gesekan, atau benih-benih keresahan masyarakat yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur bisa disebabkan mulai dari faktor-faktor yang paling elementer, bersumber pada konflik ekonomi, kepentingan hingga yang bersifat ideologis. Sebagian besar konflik memang berpotensi terjadi akibat kesenjangan ekonomi atau perebutan sumber-sumber produksi. Namun, tidak menutup kemungkinan konflik juga bisa saja meletup gara-gara faktor-faktor non-ekonomi, seperti fanatisme, syakwasangka, perbedaan ideologi, dan juga karena perbedaan agama.

Di Provinsi Jawa Timur, hubungan keserasian masyarakat tidak jarang retak, dan terguncang karena orang-orang tidak siap dengan yang namanya perbedaan dan kritik. Dari hasil kajian dan penelusuran data di lapangan, studi ini berhasil mengidentifikasi

sejumlah faktor yang melatarbelakangi dan menjadi penyebab terjadinya pergesekan, gangguan, dan bahkan meletupnya konflik antar kelompok masyarakat di berbagai kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pertama, berkaitan dengan kondisi sosial-politik makro yang sedang dialami bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Provinsi Jawa Timur yang tengah memasuki masa transisi dari pola-pola kehidupan sebelum reformasi ke pola kehidupan pasca reformasi yang berkeinginan untuk menciptakan tatanan sosial-politik yang demokratis, tetapi sayangnya dalam berbagai kasus ternyata tidak diimbangi dengan kedewasaan dan kematangan sikap politik masyarakat, terutama para elit politik. Di berbagai daerah di Jawa Timur, tidak sekali-dua kali pergesekan dan konflik terjadi karena dipicu oleh ketidakdewasaan sikap politik masyarakat dan elit politik. Di Pasuruan, Situbondo, Banyuwangi, dan sebagainya.

Kedua, potensi pergesekan dan konflik umumnya lebih rawan meletup bila di masyarakat terjadi kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi, sosial maupun budaya yang adapkali ditunggangi oleh berbagai isu primordial, seperti perbedaan suku bangsa, agama, ras dan antargolongan. Di dalam masyarakat yang tersegregasi dan terstratifikasi secara *rigid* (kaku), yang namanya kadar sensitivitas biasanya amat tipis, ketersinggungan mudah meletup, dan ketika di masyarakat muncul apa yang disebut kesadaran kelas, maka jangan kaget jika pergesekan atau konflik yang semula *latent* akan mudah berubah menjadi konflik yang *manifest*. Di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, tidak sekali dua kali konflik terjadi karena dipicu adanya kekecewaan dan kecemburuan sosial akibat ketidakadilan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Di komunitas yang terpolarisasi, konflik cenderung lebih mudah meletup hanya karena hal-hal yang sepele.

Ketiga, bila di sebuah masyarakat atau komunitas hadir industrialisasi yang mengalienasikan dan bahkan mengeksploitasi warga masyarakat setempat. Bisa dibayangkan apa yang terjadi bila di sebuah masyarakat terjadi kesenjangan budaya (*cultural gap*) yang memperkecil peluang atau bahkan sama sekali tidak memungkinkan bagi penduduk lokal untuk dapat terserap dalam kegiatan industri dan pembangunan yang sedang berlangsung di wilayah itu. Sebuah perusahaan yang hadir di sebuah wilayah terpencil, dan terpaksa hidup menurut tata aturan yang serba kontraktual, impersonal dan profesional, niscaya akan menyebabkan ia tumbuh eksklusif dan mengalienasikan



penduduk setempat yang sudah puluhan tahun terbiasa hidup di bawah pola hubungan yang serba informal, menonjolkan kedekatan antar orang per orang yang sifatnya personal dan semata hanya mengandalkan loyalitas.

Dalam berbagai kasus, sering terjadi bila kegiatan pembangunan dan proses industrialisasi yang berlangsung tidak berusaha mengembangkan mekanisme redistribusi asset atau pembagian kembali sebagian keuntungan untuk kepentingan pengembangan SDM penduduk setempat, maka yang terjadi bukan saja keresahan, tetapi juga potensi konflik yang terpedam. Selama ini, banyak bukti menunjukkan, bahwa kegiatan industrialisasi yang semata hanya mementingkan kepentingan produksi dan tujuan komersial, bukan saja menyebabkan berkembangnya kecemburuan sosial masyarakat lokal, tetapi juga melahirkan tekanan-tekanan yang sifatnya struktural.

Industrialisasi dan modernisasi yang merambah ke sebuah wilayah, dan kemudian menyebabkan hilangnya sejumlah lapangan kerja dan terpukulnya industri di tingkat lokal, dan bahkan menyebabkan terjadinya proses marginalisasi, maka besar kemungkinan di wilayah itu konflik akan lebih potensial meletup. Di sejumlah kabupaten seperti Pasuruan yang sekarang ini terdapat cukup banyak industri, misalnya, potensi dan tanda-tanda keresahan masyarakat setempat sedikit-banyak kini mulai terasa, dan bukan tidak mungkin jika industrialisasi yang berlangsung kemudian menyebabkan terjadinya proses marginalisasi, maka konflik yang terjadi niscaya hanya menunggu waktu. Di Pasuruan, misalnya, ketika di daerah tersebut dibangun industri berteknologi tinggi seperti industri migas, tidak sekali-dua kali perselisihan antara kekuatan kapital dengan kepentingan penduduk lokal sempat terjadi karena proses infiltrasi, invasi dan suksesi pemilikan aset produksi dari penduduk setempat ke para pendatang.

Secara teoritis, dikatakan Ted Robert Gurr (dalam Kweit, 1996: 153-154), konflik dengan kekerasan biasanya akan lebih mudah meletup jika masyarakat mengalami kekecewaan dan frustrasi. Frustrasi itu sendiri timbul berkaitan dengan meningkatnya harapan-harapan yang tidak terpenuhi atau tidak terakomodasi dalam suatu sistem sosial-politik, sehingga frustrasi yang muncul akan melahirkan perasaan tertindas, sehingga cepat atau lambat akan memicu terjadinya konflik yang terbuka.

Keempat, konflik di Provinsi Jawa Timur umumnya juga terjadi ketika wibawa hukum dan aparat penegak hukum dirasa masyarakat masih belum berfungsi dengan

benar, sesuai dengan asas-asas keadilan. Ketika sebagian masyarakat merasa diperlakukan tidak adil akibat rekayasa produk hukum dan proses penerapan hukum yang dinilai inkonsisten, maka kemungkinan terjadinya keresahan dan konflik cenderung akan lebih terbuka. Ketika ada warga masyarakat yang digusur secara tidak adil, maka hampir dapat dipastikan benih-benih keresahan dan kerusuhan akan potensial muncul. Di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang ketika penghuni dan pengolahan lahan digusur paksa atas nama hukum, maka yang terjadi biasanya adalah sikap resisten, dan bahkan tidak sekali-dua kali warga yang tergusur itu mencoba melawan dengan cara yang keras. Seperti dipaparkan di bab terdahulu, bahwa resistensi para petani di Kabupaten Malang seringkali meletup ketika mereka merasa diperlakukan tidak adil atau sewenang-wenang.

Kelima, ketika di masyarakat masih tumbuh subur adanya syakwasangka dan *prejudice* terhadap kelompok yang berbeda, baik dari segi etnis, agama maupun golongan, maka intensitas dan potensi terjadinya konflik umumnya akan lebih terbuka. Pengalaman selama ini di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur cukup banyak memperlihatkan betapa pergesekan dan konflik cenderung lebih mudah meletup karena yang ada di benak masing-masing kelompok adalah rasa *in-group* dan sikap yang enggan menerima perbedaan.

Di sebuah komunitas yang masyarakatnya hidup tersegregasi atas dasar etnis, agama dan status ekonomi, niscaya potensi konflik yang terpendam makin lama akan makin mengental, sehingga ketika ada sedikit pemicu saja, besar kemungkinan konflik akan mudah tersulut. Perbedaan dan syakwasangka antara etnis Tionghoa dengan etnis Jawa, misalnya adalah salah satu persoalan social yang hingga saat ini belum terpecahkan di Provinsi Jawa Timur, dan boleh dikata merupakan bara dalam sekam yang suatu saat tidak mustahil meletup jika tidak dikelola dengan baik.

Di Situbondo, misalnya, studi ini menemukan potensi konflik *latent* antara Islam-Kristen hingga kini masih terpendam, dan bukan tidak mungkin suatu saat bakal tersulut jika tidak dikelola dengan baik. Konflik antar pemeluk agama yang berbeda yang sempat meletup beberapa tahun silam, ternyata menimbulkan luka psikologis dan trauma yang cukup mendalam. Sejumlah informan dari agama minoritas yang diwawancarai

menyatakan bahwa mereka mau tidak mau harus mengambil sikap ekstra hati-hati, menahan diri, agar tidak memancing keributan yang bisa kontraproduktif.

Menurut Thomas Santoso (2006), ada empat hal yang mempertautkan konflik horizontal, kekerasan, politik dan agama. Pertama, agama semestinya tidak menimbulkan konflik horizontal dan kekerasan. Namun fakta menunjukkan bahwa agama dapat menimbulkan konflik horizontal dan kekerasan apabila berhubungan dengan faktor lain, misal kepentingan kelompok/nasional atau penindasan politik. Agama dapat disalahgunakan dan disalaharahkan baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, agama prophetis (nabi), seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Dari sisi internal, agama prophetis cenderung melakukan kekerasan karena merasa yakin tindakannya berdasar kehendak Tuhan. Oleh karena itu pemahaman agama atau bagaimana agama diinterpretasi merupakan salah satu alasan yang mendasari konflik horizontal dan kekerasan. Agama telah dimanipulasi untuk kepentingan politik sebagai upaya untuk membebaskan dirinya dari kewajiban moral jika merasa eksistensinya terancam. Kekerasan telah dibingkai "agama" sebagai ekspresi keinginan untuk menetralsir dosa. Kedua, agama telah mengalami simplifikasi, politisasi, mobilisasi, dan dibuat transenden sehingga terjadilah komunalisasi politik-agama : "agama bernilai lebih tinggi dibanding agama lain dan hukum nasional/ internasional". Ketiga, orang beragama punya afiliasi agama dan juga kepentingan politik, sehingga bisa terjadi pertentangan dengan komunitas agama lain di wilayah geografis yang sama. Keempat, ambivalensi agamawan sebagai *peacemaker* sekaligus *violencemaker*.

## 2.2. Pola Terjadinya konflik

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, konflik yang terjadi dapat mewujud dalam berbagai bentuk, mulai dari yang bersifat lunak, *subtle* hingga bentuk-bentuk yang terbuka dan bersifat kekerasan. Konflik dapat mewujud dalam bentuk ketidaksukaan (*dislikeness*), ketidaksepakatan (*discord*), ketidaksetujuan (*disagreement*), perseteruan (*rivalry*), persaingan (*competition*), permusuhan (*hostility*), oposisi (*opposition*), kontak fisik (*physical contact*), dan bahkan tindak kekerasan yang terbuka: perkelahian massal.

Di Provinsi Jawa Timur, sumber terjadinya konflik dapat berdimensi ekonomi, politik, budaya, dan ideologi. Konflik-konflik yang berdimensi ekonomi dan politik acapkali berhubungan dengan aspek-aspek instrumental dan material, yaitu yang berkaitan dengan siapa mendapat apa atau siapa kehilangan apa dan berapa banyak kehilangan tersebut. Konflik berdimensi ekonomi ini cenderung bersifat riil. Sebaliknya konflik-konflik berdimensi budaya dan ideologi memiliki aspek yang lebih fundamental dan karena itu seringkali cenderung bersifat abstrak. Pada prinsipnya, bagaimana bentuk-bentuk aksi yang dipakai pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, sangat tergantung pada bagaimana mereka melihat sumber-sumber konflik, tujuan-tujuan konflik, serta cara-cara penyelesaian konflik.

Apapun jenis konflik yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, umumnya dua elemen utama yang seringkali berkombinasi menjadi sumber hakiki konflik. Pertama, elemen identitas atau *potent identity-based factors*. Kelompok-kelompok sosial dimobilisasi dengan membawa identitas komunal kelompok atas dasar ras, agama, ideologi, dan kepentingan kelompok. Kedua, elemen persepsi terhadap persoalan distribusi sumber-sumber ekonomi, politik dan sosial di dalam masyarakat. Ketika elemen *potent identity-based factors* dan elemen persepsi mengenai adanya ketidakadilan ekonomi-sosial ini bercampur, maka potensi konflik menjadi semakin sangat tinggi dan lalu memunculkan konflik yang bersifat mengakar (*deep-rooted conflict*). Secara garis besar, jenis dan pola terjadinya konflik yang mengancam keserasian social masyarakat Jawa Timur adalah:

Pertama, konflik horizontal yang terjadi karena sekelompok warga masyarakat tertentu dengan warga masyarakat yang lain terlibat dalam perebutan sumber-sumber produksi yang jumlahnya relatif terbatas. Di Provinsi Jawa Timur, salah satu contoh konflik horizontal antar warga masyarakat yang memperebutkan sumber-sumber produksi adalah konflik yang terjadi antara nelayan dari daerah yang berbeda, dan antara nelayan modern dan nelayan tradisional yang acapkali dirugikan karena perkembangan alat tangkap ikan yang canggih, seperti kapal *Trawl*.

Di berbagai media massa, berkali-kali kita bisa melihat terjadinya kasus bentrokan antar nelayan, seperti bentrokan yang berkali-kali terjadi antara nelayan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan melawan nelayan dari Kecamatan Kraton, kabupaten

Pasuruan. Kenapa konflik antarnelayan ini terus terjadi sebetulnya bukan semata-mata karena dipicu perebutan wilayah tangkap ikan antardaerah. Tetapi, yang menjadi akar masalah sesungguhnya adalah kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan yang berkecamuk di kepala kelompok nelayan tradisional (Surya, 30 Oktober 2004). Di Situbondo, misalnya, seperti dilaporkan di berbagai media massa bahwa sempat terjadi sejumlah nelayan kecil setempat seringkali resah karena ada nelayan yang diketahui menggunakan lampu merkuri untuk menangkap ikan. Dengan menggunakan daya tarik cahaya lampu merkuri, dikhawatirkan justru ikan-ikan kecil yang akan naik dan terjaring terlebih dahulu, sehingga cepat atau lambat sumber daya laut akan turun drastis karena tidak ada lagi pembaharuan.

Di Jawa Timur, konflik yang terjadi antar nelayan ini biasanya terjadi karena ada sekelompok nelayan yang dianggap melanggar kesepakatan, mencari ikan di wilayah tangkapan nelayan daerah lain dengan menggunakan pukat harimau minim dan bom ikan (bondet). Bagi nelayan tradisional yang sehari-hari ruang gerak hanya sekitar 3-5 mil laut karena keterbatasan peralatan tangkap yang dimiliki, tentu bisa dipahami jika mereka resah karena harus menghadapi ancaman *overfishing* dan pengurasan sumber penghasilan mereka oleh nelayan modern yang memiliki modal dan teknologi lebih canggih. Sebagai bagian dari masyarakat pesisir yang tergolong paling miskin, tidak berdaya, dan menjadi korban pertama yang paling menderita dari kebijakan modernisasi perikanan (*blue revolution*), sesungguhnya wajar jika para nelayan tradisional kembali meradang tatkala batas toleransi mereka terus-menerus dilanggar.

Berbeda dengan nelayan modern yang acapkali mampu merespon perubahan dan lebih kenyal dalam menyiasati tekanan perubahan dan kondisi *over fishing*, nelayan tradisional seringkali justru mengalami proses marginalisasi dan menjadi korban dari program pembangunan dan modernisasi perikanan yang sifatnya a-historis. Akibat keterbatasan teknologi yang dimiliki, ruang gerak nelayan tradisional umumnya sangat terbatas: mereka hanya mampu beroperasi di perairan pantai (*inshore*), sehingga mereka percaya akan menjadi korban yang pertama dan yang paling menderita jika sumber daya ikan di wilayah pantai makin langka.

Studi yang dilakukan Lembaga Penelitian Unair bekerjasama dengan Balitbang Provinsi Jawa Timur (2004) menemukan bahwa kehidupan sehari-hari keluarga nelayan

tradisional bukan hanya diwarnai dengan kemiskinan dan berbagai keterbatasan, tetapi yang memprihatinkan adalah nyaris tidak ada peluang atau kesempatan untuk melakukan mobilitas vertikal. Tidak dimilikinya modal yang cukup dan asset produksi yang memadai, seringkali menyebabkan mereka terpaksa hidup pas-pasan, atau bahkan kekurangan, sehingga wajar ketika batas kesabaran mereka makin tipis, maka mereka pun tidak akan segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya yang terganggu oleh kelompok lain yang dianggap merugikan.

Kedua, konflik horizontal atau konflik identitas yang berlatarbelakang isu SARA. Di Provinsi Jawa Timur boleh dikata pola konflik inilah yang paling potensial meledak dan paling mencemaskan. Isu Kristenisasi, pelarangan pembangunan gereja di sejumlah wilayah, syakwasangka antarkelompok pemeluk agama yang berbeda, isu pri versus non-pri, dan sejenisnya adalah hal-hal yang acapkali masih muncul di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun terakhir.

Karakteristik dari konflik-konflik horizontal yang berdimensi identitas ini adalah sifatnya yang persisten, dan acapkali tumpang-tindih dengan isu-isu kesenjangan ekonomi. Konflik-konflik yang berbasis SARA ini seringkali bercampur dengan konflik mengenai distribusi sumber-sumber; wilayah, ekonomi, dan prospek lapangan kerja. Dalam konflik (*latent*) antar etnis yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, salah satu faktor penting yang tidak bisa diabaikan adalah soal persepsi, sebab persepsi seringkali menentukan apakah hubungan antar-kelompok cenderung mengarah pada terjadinya tindak kekerasan atau tidak. Di Provinsi Jawa Timur, ada kecenderungan posisi kelompok etnis Tionghoa acapkali dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup, kultur, sosial dan kepentingan vital lain, sehingga pada tingkat kelompok kompromi tampaknya menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai. Konflik antar etnis yang terpendam ini biasanya menjadi makin sulit dihapuskan ketika dimeni konflik yang ada ditambahi dengan perbedaan-perbedaan lain yang makin memperkeras jarak, seperti perbedaan agama, permukiman dan segrasi sosial yang lain.

Ketiga, konflik horizontal antar kelompok yang berbeda ideologi politik. Di Provinsi Jawa Timur menjelang Pemilu, dan menjelang serta pasca pelaksanaan Pilkada di berbagai kota/kabupaten, potensi pergesekan antar massa yang berbeda afiliasi partai politik dan ideologi ini biasanya cenderung makin besar karena masing-masing kelompok

bersikukuh memperjuangkan dan membela calon yang diusung. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, sepanjang tahun 2005, misalnya kita tahu yang namanya Pilkada telah dan bakal digelar di 16 kota/kabupaten, sehingga rawan dan dibayangi kemungkinan terjadinya konflik (Surya, 13 April 2005). Prediksi dan kekhawatiran ini dilontarkan bukan tanpa alasan. Kendati saat ini konflik yang mencuat lebih banyak terjadi di lingkup intern partai dan bersifat elitis. Tetapi, tidak mustahil konflik yang terjadi di tingkat elit itu meluas dan melibatkan massa pendukung masing-masing pihak.

Meski di atas kertas, pelaksanaan Pilkada memang menjanjikan perubahan ke arah kehidupan berdemokrasi yang lebih baik. Namun, harus diakui bahwa pelaksanaan Pilkada yang dilakukan dengan cara agak *instant* dan berbarengan seperti sekarang ini sesungguhnya riskan terjerumus ke dalam situasi yang kontra-produktif. Pada batas-batas tertentu, bahkan pelaksanaan Pilkada terbukti juga berpotensi memicu terjadinya konflik horizontal yang makin terbuka, baik atas dasar perbedaan ideologi, kepentingan atau identitas sosial-politik yang lain.

Dalam merumuskan visi dan program yang ditawarkan kepada publik, atau ketika seorang kandidat Pilkada mencoba menjangring simpati massa, tidak jarang terjadi retorika yang dikembangkan justru membuat sekat-sekat sosial antar golongan satu dengan yang lain menjadi makin jelas. Iklim persaingan antar kandidat, dan fragmentasi kekuasaan yang terjadi selama proses Pilkada, jangan heran jika kemudian dibarengi dengan kemungkinan tumbuhnya fragmentasi konflik pada tingkat komunitas yang lebih kecil. Kendati secara umum pelaksanaan Pilkada di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur tergolong sukses, tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa pergesekan sempat muncul dan berlarut-larut, seperti kasus yang terjadi di Banyuwangi dan Sampang.

Keempat, konflik antara kekuatan massa versus kekuatan kelembagaan atau negara. Di Provinsi Jawa Timur, jenis konflik semacam ini terutama sering terjadi pada kasus pertanahan, khususnya di sektor perkebunan. Di era otonomi daerah, berbagai sengketa pertanahan yang terjadi di sektor perkebunan di sejumlah daerah Jawa Timur bukannya segera terselesaikan, tetapi acapkali justru makin marak. Sejak proses komersialisasi dan modernisasi merambah wilayah pedesaan, masalah pertanahan telah menjadi isu sosial-politik yang acapkali melahirkan berbagai sengketa: gerakan perlawanan, pembangkangan, dan bahkan hingga tetesan darah serta nyawa.

Di sektor perkebunan, konflik pertanahan dalam banyak kasus dipicu oleh proses pengalihan dan penerbitan HGU (Hak Guna Usaha) yang sama sekali tidak berpihak kepada petani. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur, perusahaan-perusahaan perkebunan negara dalam melaksanakan ekspansi usahanya sering kemudian mengambil alih tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat. Dalam sepuluh tahun belakangan ini, investasi modal di sektor perkebunan kita tahu telah makin meluas, sehingga konsekuensinya sektor perkebunan komersial ini membutuhkan tanah sebagai modal utamanya. Fakta yang ada menunjukkan tanah-tanah di Jawa —kecuali lahan hutan— hampir tidak ada lahan kosong yang terlantar.

Tanah-tanah perkebunan eks perkebunan Belanda (eks hak *erpach*) maupun tanah-tanah TN (Tanah negara) yang semula telah digarap petani kecil secara turun-temurun, baik secara sukarela maupun terpaksa kemudian diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan perkebunan. Negara yang diharapkan petani mau mendengar keluhan dan berpihak kepada mereka, ternyata seringkali malah mendukung perkembangan atau ekspansi perkebunan komersial dan bahkan tak segan menceraabut petani dari hubungannya dengan tanah.

Sengketa atau permasalahan pertanahan —termasuk di areal perkebunan— pada dasarnya bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum terhadap kebijakan agraria, tetapi juga memuat dan menyangkut persoalan sosial, ekonomi dan politik. Berbagai kasus sengketa tanah tidak semata muncul karena ketidakjelasan administratif atau proses sertifikasi yang tidak beres, melainkan juga dipicu karena orientasi kebijakan pembangunan yang cenderung pro kepada teori-teori modernisasi. Di Indonesia, banyak ahli telah mengkaji bahwa sejak Orde Baru, kebijakan pertanahan lebih dititikberatkan kepada upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat —yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan pembangunan sektoral di bidang pertanian dan industri (Kasim & Suhendar, 1997).

Selama pemerintahan Orde Baru hingga era reformasi telah banyak terbukti bahwa penetrasi modal ke daerah pedesaan dan pinggiran kota, bukan cuma menyebabkan terjadinya proses infiltrasi, invasi, dan suksesi pemilikan lahan, tetapi juga pemusatan penguasaan tanah yang berlangsung melalui dua mekanisme utama: pasar dan intervensi negara (Fauzi, 1997). Kenaikan harga tanah dalam banyak hal dipicu oleh ulah



spekulan dan perubahan peruntukan tanah untuk kegiatan industri atau pembangunan sektor pertanian komersial. Tanah adat, dan lahan tradisional yang semula generasi ke generasi menjadi lahan garapan masyarakat petani, acap kemudian dieksploitasi untuk kepentingan komersial: petani dipaksa menanam komoditi yang sebetulnya tidak terlalu mereka kenal atau bahkan secara ekonomi rugi, dan tidak sedikit lahan "milik" petani diambil begitu saja dengan dalih untuk mendukung swasembada pangan atau kepentingan negara, seperti pembangunan waduk atau budidaya sektor perkebunan komersial demi ekspor.

Ketika rakyat dan petani masih terkungkung dengan ketidakberdayaannya, berbagai tindakan pengambilalihan dan pemaksaan agar petani menanam komoditi perkebunan tertentu, mungkin tidak menjadi persoalan serius yang meresahkan. Tetapi, lain soal ketika reformasi bergulir cepat, dan sikap kritis masyarakat tidak lagi dapat dihegemoni oleh kekuatan komersial atau tindakan represi kekuasaan. Dalam lima tahun terakhir, kita bisa menyaksikan tumbuhnya radikalisme di kalangan petani yang benar-benar membara. Gerakan perlawanan petani muncul di mana-mana, dengan eskalasi yang kian lama kian radikal, sehingga jika tidak segera dicari jalan keluar yang baik atas permasalahan ini, maka dikhawatirkan imbasnya akan berdampak kontra-produktif bagi pihak mana pun.

Akses terhadap tanah-tanah strategis yang semula cenderung didominasi oleh kalangan terbatas, untuk industri, perumahan dan pertumbuhan ekonomi. Kini, tidak lagi berjalan mulus. Di kota besar seperti Surabaya, berbagai kasus penggusuran dan ganti-rugi di masa lalu yang dinilai tidak memuaskan, kini menuai perlawanan. Demikian pula kasus pertanahan di areal perkebunan komersial. Di masa lalu, perusahaan perkebunan komersial yang didukung aparat keamanan dan tindakan represif mungkin berhasil untuk sementara meredam perlawanan rakyat. Tetapi, saat ini berbagai aksi unjuk rasa dan gerakan perlawanan seolah tumbuh bagai jamur di musim hujan. Di daerah Malang, Pasuruan, Situbondo, dan lain-lain, konflik pertanahan di sektor perkebunan terjadi berkali-kali dan hingga saat ini pun belum berhasil dirumuskan formula atau tata cara penyelesaian sengketa yang benar-benar dapat memuaskan semua pihak.

Di Kabupaten Malang, misalnya, permasalahan pertanahan di arel perkebunan terjadi belasan kasus: bukan hanya petani berhadapan dengan perkebunan negara dan

swasta, tetapi juga berhadapan dengan aparat keamanan, yakni Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Kalau dilihat sejarahnya, konflik tanah di daerah Malang ini sebetulnya merupakan persoalan yang telah lama ada. Namun baru muncul kepermukaan dengan perlawanan yang terbuka baru terlihat sejak tanggal 25 Desember tahun 1997. Perlawanan warga desa Simojayan yang diwujudkan dengan membabat tanaman kako, kopi, cengkeh dan sengon diawali di Afdeling Petungombo di desa Simojayan kecamatan Ampelgading. Di desa ini lahan yang dibabat warga desa mencapai 240 hektar. Aksi perlawanan desa Simojayan ini mengilhami desa-desa lainnya yang sebelumnya telah memiliki persengketaan dengan pihak perkebunan. Aksi warga ini seakan mendapatkan tenaga baru ketika era reformasi merebak. Aksi reformasi yang terus bergulir seakan menjadi justifikasi bahwa apa yang dilakukan warga desa dengan melakukan pembabatan dalam upaya memperoleh hak-hak garap tanah yang telah lepas dapat dibenarkan, dan bahkan strategis untuk dikembangkan di wilayah lain.

Di Jember, konflik pertanahan di sektor perkebunan terjadi antara penduduk lokal dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). Pada tahun 1999, konflik sempat memuncak dan ditandai dengan aksi penjarahan kopi secara massal di Kebun Ketajeg, Desa Suci, dan Desa Kemiri, Kec. Panti. Waktu itu, sedikitnya sepuluh orang ditembak dan sekitar 79 orang ditahan untuk dimintai keterangan. Selain menjarah, penduduk dilaporkan juga melakukan aksi pendudukan kantor dan rumah dinas sinder, serta para mandor PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Jember. Alasan pendudukan itu karena mereka merasa ikut memiliki lahan kebun yang saat ini dimiliki PDP Jember (Surabaya Post, 22 April 1999). Memasuki tahun 2001, aksi perlawanan rakyat kepada PDP tersebut belum juga menemukan titik temu. Kendati, menurut Direktur PDP Soewarno warga Ketajek telah menerima ganti rugi atau tali asih dari PDP Jember sebesar Rp 1 milyar atau sekitar Rp 800.000 s.d. Rp 3 juta per KK, tetapi sebagian masyarakat mengaku tidak pernah menerima ganti rugi atau tali asih (Kompas, 11 April 2001).

Terlepas dari bentuk perlawanan yang dilakukan, tindakan petani berunjuk rasa atau merusak tanaman di lahan sengketa, sesungguhnya merupakan bentuk ekspresi dari ketidakpuasan dan rasa diperlakukan tidak adil oleh berbagai kebijakan yang berpola *top-down*. Penerapan UUPA yang dinilai bias dan hanya membela kepentingan pemilik modal dan negara, dipersepsi rakyat atau petani pada khususnya bukan hanya membuat

terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur penguasaan, kepemilikan dan penyewaan tanah, tetapi juga perubahan-perubahan dalam distribusi pendapatan dan status sosial.

Bisa dibayangkan, bagaimana reaksi seorang petani yang selama bertahun-tahun dipaksa mengerjakan lahan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi sekadar melayani kepentingan perusahaan perkebunan komersial yang sama sekali tidak memerankan diri sebagai *patron*? Bagi petani yang merasa telah menggarap lahan selama puluhan tahun, dan turun-temurun, arti tanah dalam konstruksi sosial mereka tentu bukan sekadar asset produksi yang memiliki nilai ekonomi saja, tetapi di sana juga ada faktor keterikatan kultural, dan bagian inheren dari mekanisme *survival* mereka menghadapi tekanan kemiskinan dan situasi krisis.

Kelima, konflik antar kelas yang terjadi antara buruh dan pemilik modal atau kekuatan komersial. Di kota/kabupaten yang memiliki banyak pabrik atau kegiatan industri, khususnya Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Kediri, dan Malang tidak sekali-dua kali terjadi kasus unjuk rasa atau demonstrasi kaum buruh yang dipicu soal UMR, THR, cuti dan berbagai kasus pelanggaran hak buruh yang lain. Pada saat hendak memasuki Hari Raya, ada kecenderungan keresahan dan kasus unjuk rasa buruh ini makin meningkat, dan bahkan dengan skala yang melibatkan ribuan atau puluhan ribu orang.

Di era reformasi, ada kecenderungan kesadaran dan sikap kritis kaum buruh umumnya meningkat tajam. Di mata kaum buruh, salah satu isu utama yang mereka biasa persoalkan dari waktu ke waktu umumnya adalah menyangkut kelayakan upah. Di penghujung tahun 2005 ini, misalnya, ketika kalangan pengusaha tengah sibuk menghitung ulang biaya produksi yang harus mereka keluarkan menyikapi keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, persoalan baru yang belakangan ini memaksa kalangan pengusaha bereaksi adalah usulan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Bagi kalangan pekerja dan serikat buruh, ketentuan upah minimum yang saat ini berkisar antara 500-600 ribu rupiah per bulan dianggap tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat "efek domino" kenaikan harga barang pasca kenaikan BBM.

Apakah tuntutan kaum buruh soal upah ini akan makin mengeras atautidak, tentu sangat tergantung pada sikap dan respons yang diperlihatkan pemilik perusahaan. Tetapi, bagi kalangan buruh atau pekerja, akar masalah yang menjadi tuntutan utama mereka sebenarnya tidak hanya kenaikan upah, tetapi yang lebih substansial adalah sejauhmana pihak perusahaan mau bersikap empati dan memahami pekerja sebagai bagian dari asset perusahaan yang harus dilindungi —dan bukan dianggap sebagai beban biaya produksi yang sewaktu-waktu dengan mudah dikorbankan atau di-PHK jika perusahaan sedang dirundung masalah.

### 3. Konflik dan Gerakan Sosial

Kendati selama puluhan tahun elit politik yang berkuasa, pada batas-batas tertentu telah berhasil melakukan hegemoni politik dan terkadang pula dengan cara-cara yang bersifat represif. Tetapi, yang namanya konflik sesungguhnya tidak pernah teredam hingga akarnya dan gerakan politik rakyat sesungguhnya tidak pernah mati: ia terus *survive* dari waktu ke waktu, kreatif menyasati keadaan dan tekanan, dan bahkan berbagai jejasan kekerasan seolah menjadi energi sosial yang membuat mereka seperti sel hidup yang terus membelah diri untuk menyambung hidup.

Dalam skala mikro, gerakan politik rakyat di Provinsi Jawa Timur dapat dijumpai di berbagai wilayah pedesaan ketika di sana digelar Pilkades yang justru dimenangkan oleh *bumbung* kosong. Sikap sebagian petani yang menolak TRI dengan cara membakar tanaman tebu adalah contoh lain dari kesadaran dan bentuk perlawanan petani terhadap kekuasaan yang dinilai sewenang-wenang. Di kota, gerakan politik rakyat juga telah bertahun-tahun dilakukan kelompok marginal kota, terutama mereka yang bekerja di sektor informal tatkala mencoba menyasati kejaran Tibum. Kebijakan politik kota besar yang seringkali bersifat punitif —mencoba menggusur dan melakukan razia terhadap PKL— telah terbukti kalah stamina dengan daya tahan dan daya juang para pekerja di sektor informal. Di kota, gerakan politik rakyat bahkan sudah satu dekade yang lalu dilakukan secara lebih terorganisir oleh kaum buruh yang menuntut kenaikan UMR dan perbaikan nasib.

Dalam berbagai kasus, gerakan politik rakyat biasanya selalu dipicu oleh rasa tidak puas terhadap perlakuan yang dirasa tidak adil atau tidak patut —terutama ketika

hasil-hasil pembangunan dan kebijakan politik dirasa tidak atau kurang mencerminkan rasa keadilan. Sebuah gerakan politik rakyat yang kemudian terbukti berhasil menghimpun massa dalam jumlah besar, selain diikat oleh rasa solidaritas, kristalisasi kepentingan bersama yang tengah diperjuangkan dan proses "politisasi massa", sebetulnya juga dihela oleh proses perubahan sosial yang melahirkan berbagai kontradiksi. Artinya, gerakan politik massa biasanya tumbuh subur: memperoleh ladang persemaian yang kondusif ketika pembangunan yang dilangsungkan bukannya membuat masyarakat makin sejahtera, tetapi justru melahirkan polarisasi, marginalisasi dan terlebih alienasi massa.

Di Provinsi Jawa Timur, sering terjadi gerakan perlawanan petani menempuh pola yang radikal tatkala batas kesabaran mereka mulai habis. Di Malang, misalnya tepatnya di wilayah Kalibakar sekitar 2.050 hektar tanaman Cacao terpaksa musnah dirusak massa, dan menyebabkan pihak PTP XII harus menanggung kerugian sekitar 14 milyar. Keterlibatan dan intervensi militer, bukan membuat persoalan menjadi cepat selesai, tetapi justru membangkitkan rasa solidaritas dan perlawanan rakyat yang makin intensif. Di Jember, pola yang terjadi kurang-lebih sama.

Hotman M. Siahaan (1997), dalam studinya tentang gerakan perlawanan petani TRI di Jawa Timur menemukan bahwa kuatnya hegemoni negara dan hegemoni aparatur yang tidak mampu mengartikulasikan kepentingan-kepentingan petani, pada akhirnya melahirkan kesadaran untuk melakukan tindakan pembangkangan terselubung para petani untuk menolak ikut dalam program TRI. Lebih lanjut Siahaan menyimpulkan, bahwa pembangkangan terselubung yang dilakukan petani tebu sesungguhnya bukan hanya dilatarbelakangi oleh cairnya nilai-nilai etika subsistensi, melainkan juga disokong akibat meluasnya proses komersialisasi dan hubungan rasional dalam proses produksi.

Di Provinsi Jawa Timur, dalam berbagai aksi yang dilakukan rakyat terhadap kekuasaan, bentuk perlawanan sosial yang mereka lakukan sebagian mungkin berupa perlawanan terbuka yang radikal, seperti aksi amuk massa yang anarkhis, sabotase, atau bahkan revolusi. Namun, tidak jarang terjadi pula bentuk perlawanan yang dikembangkan rakyat sebatas berupa pembangkangan terselubung, perlawanan diam-diam, atau yang biasa disebut sebagai resistensi diskursif. Yang dimaksud resistensi diskursif adalah bentuk perlawanan sosial rakyat yang sifatnya tidak terang-terangan, sebatas ekspresi dari

ketidakpuasan terhadap rasa diperlakukan tidak adil, dan dilakukan dengan mengacu pada landasan moral atau norma-norma sosial yang diyakini bersama kebenarannya.

Berbeda dengan analisis Marxis klasik yang menganggap hubungan produksi sebagai faktor determinan bagi terjadinya bentuk perlawanan kaum marginal dan rakyat pada umumnya, banyak kasus membuktikan bahwa kesenjangan kelas dan perbedaan penguasaan terhadap alat produksi bukanlah faktor penyebab —apalagi satu-satunya faktor— yang sifatnya deterministik atau menentukan terjadinya aksi perlawanan massa. Menurut Marx, dalam masyarakat kapitalis sesungguhnya mereka memiliki kontradiksi-kontradiksi internal yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Diyakini oleh Marx bahwa konflik kelas dan perjuangan kelas selalu terjadi hanya dalam hubungan produksi yang eksploitatif, seperti terdapat dalam masyarakat kapitalis. Kaum buruh, karena mereka selalu berhadapan dengan situasi yang kontradiktif, dan di sisi lain yang bersamaan bertemunya kaum buruh di daerah-daerah industri di kota akan memungkinkan terbentuknya jaringan komunikasi yang mampu menghasilkan kesadaran bersama, maka diramalkan Marx bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi apa yang disebut revolusi sosial yang bakal melahirkan masyarakat baru: masyarakat sosialis tanpa kelas.

Dalam pandangan Marx, kontradiksi yang paling sering terjadi di masyarakat kapitalis adalah kontradiksi antara kekuatan produksi materiil dan hubungan-hubungan produksi, dan antara kepentingan-kepentingan kelas yang beda. Di antara rakyat yang merasa teraniaya dan negara yang mereka lawan selama ini, bukan berarti tidak ada kontradiksi dan perbedaan kepentingan. Namun, hal ini sesungguhnya bukanlah faktor utama yang mampu mendorong terjadinya perlawanan atau sikap kritis rakyat. Kendati sebagian besar rakyat yang marginal adalah kelompok masyarakat yang relatif miskin, sering kali mengalami tekanan-tekanan kebutuhan hidup yang sangat berat dan acapkali pula diperlakukan secara tidak adil oleh kelas yang berkuasa —baik secara ekonomi maupun politik—, hal itu tidak selalu cukup kuat untuk mendorong mereka melakukan perlawanan sosial secara terbuka atau protes yang terorganisir. Sering terjadi, dalam berbagai gerakan politik massa, yang mereka lakukan hanyalah atau masih sebatas pembangkangan terselubung —yang dilakukan dalam konteks tradisi setempat.

Di Jawa Timur, dalam aksi dan gerakan politik yang meletup di berbagai wilayah, sikap dan perlawanan sosial yang dilakukan massa acap muncul bukan semata sebagai ekspresi dari atau didorong oleh adanya kesadaran kelas atau karena adanya perbedaan kepentingan dengan kelas penguasa, melainkan lebih merupakan dinamika dari pengalaman hidup sehari-hari mereka dan pilihan spontan yang mencuat begitu saja pada saat mereka merasa diperlakukan tidak adil, haknya dilanggar, dan dalam konstruksi sosial mereka tindakan seperti itu diyakini keliru —walaupun di saat yang sama mereka memaklumi kenapa hal itu terjadi. Dengan kata lain, perlawanan rakyat yang ditemukan dalam studi ini sebatas pada bentuk resistensi diskursif atau ekspresi rasa tidak puas saja, dan tidak berlanjut dengan bentuk perlawanan yang sifatnya terbuka: aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Terbatas pada tindakan reaktif tanpa agenda berjangka panjang, dan bukan dimaksudkan untuk menohok atau mengoyak-ngoyak legitimasi kekuasaan, melainkan hanya sekadar untuk mengingatkan kembali bahwa suatu tindakan yang dilakukan orang-orang tertentu telah melanggar moral dan norma sosial setempat, dan karena itu mereka menjadi memiliki keberanian moral untuk melawannya —meski sehari-hari mereka adalah kelompok masyarakat yang marginal dan acapkali merasa dirugikan oleh berbagai kebijakan negara yang condong lebih mementingkan efisiensi program daripada efektivitas program.

Studi sebagaimana dilaporkan menemukan, bahwa faktor yang mendorong kenapa seorang warga desa yang miskin berani melakukan protes, diam-diam tidak menuruti perintah aparat desa atau sekadar *rasan-rasan* (pergunjangan), sesungguhnya bukanlah pertimbangan untung-rugi (semata): Menerima bantuan atau dilibatkan dalam sebuah program, bagi masyarakat miskin di desa tampaknya adalah bagian dari bentuk loyalitas yang seharusnya mereka berikan, atau minimal disadari harus diikuti. Bahwa di tengah perjalanan, sebagian penduduk miskin itu kemudian terpaksa melakukan aksi resistensi diskursif, tujuannya sekali lagi, bukanlah untuk mencari keuntungan atau menghindari kerugian, melainkan yang lebih pokok adalah mereka meyakini apa yang dilakukannya itu benar dan niscaya akan dibenarkan masyarakat di sekitarnya. Nilai-nilai dan ukuran moral tentang kepatutan adalah diskursus yang melatarbelakangi bentuk resistensi moral yang dikembangkan penduduk miskin di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur.

Sudah barang tentu, tidaklah mutlak bahwa hubungan produksi dan perbedaan kelas sosial sama sekali tidak berperan dalam membentuk kohesifitas sosial sesama anggota gerakan politik massa. Tetapi, tidak selalu terbukti bahwa hubungan produksi dan kesadaran kelas merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya perlawanan sosial masyarakat miskin. Seperti dikatakan Barrington Moore —dalam bukunya *Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt*— bahwa kesenjangan adalah sesuatu yang inheren di dalam setiap masyarakat. Artinya, di setiap masyarakat selalu ada stratifikasi sosial dan pembagian kelas —termasuk pula ketidakadilan pembagian hasil produksi. Namun, pertanyaannya yang menarik kemudian adalah sejauh mana kesenjangan itu dapat dibenarkan atau tidak secara moral.

Menurut Barrington Moore, ketidakadilan sosial adalah suatu derivasi pengertian dari keberangan moral yang dipengaruhi oleh tiga elemen penting dalam setiap sistem sosial: koordinasi sosial atau kekuasaan, pembagian kerja, dan distribusi barang. Koordinasi sosial dan kekuasaan selalu dievaluasi dalam pengertian tentang kemampuannya untuk memberikan perlindungan kepada warganya dan memelihara kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Para anggota masyarakat, sebaliknya mempunyai tanggung jawab untuk tunduk dan mentaati kekuasaan yang berlaku. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban timbal-balik ini akan menyebabkan keberangan moral atau kerusakan sosial. Perlawanan politik rakyat terhadap kekuasaan akan terjadi jika masyarakat merasa bahwa kekuasaan tidak lagi memenuhi kewajiban-kewajiban moralnya yang mendasar.

Secara faktual, sudah barang tentu tidak semua warga masyarakat di Provinsi Jawa Timur memiliki cara pandang yang sama dalam menafsirkan apa yang disebut Moore dengan kewajiban moral yang mendasar di atas, dan mereka pun niscaya memiliki kadar toleransi yang berbeda-beda tentang apa yang disebut batas subsistensi. Di samping itu, referensi terhadap berbagai bentuk perlawanan sosial dan kesadaran terhadap hak mereka tentunya akan menentukan bagaimana sikap masing-masing orang terhadap situasi dan perlakuan yang diterimanya.

Seperti Barrington Moore, apa yang telah diuraikan sesungguhnya mencoba meletakkan hubungan produksi di dalam suatu kesalingterkaitan dengan otoritas moral — tanpa perlu menganggapnya sebagai faktor determinan. Masalah mengenai kepatuhan dan



perlawanan hanya bisa dijelaskan jika orang melihat dimensi moral secara memadai dan bukan dengan cara memperlakukannya sebagai faktor yang sifatnya deterministik. Dengan mengacu kepada moral atau norma sosial sebagai dasar pembenar dalam bersikap, maka dalam konstruksi sosial massa niscaya akan muncul semacam energi pendorong yang menyebabkan mereka menjadi berani bersikap, atau paling-tidak akan mampu merangsang lahirnya ketidaktaatan kepada kekuasaan yang eksploitatif. Perbedaan kelas, kesadaran kelas, dan batas-batas struktural mungkin saja penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi munculnya tindakan perlawanan, tetapi hal itu tidak bisa menghapuskan potensi dari imperatif-imperatif moral.

Satu hal yang perlu ditekankan di sini, bahwa resistensi diskursif sebagai suatu bentuk aksi perlawanan rakyat terhadap “ketidakpantasan” yang dialaminya, tidak dapat dilihat sebagai proses yang deterministik dan mekanistik. Hal ini melibatkan perubahan-perubahan dan dinamika perjuangan internal di dalam lingkungan kesadaran, dan karena itu kurang bisa diramalkan serta mungkin mengambil berbagai bentuk yang tidak terpola.

#### **2.4. Membangun Kehidupan Multikulturalism: Kearifan Lokal**

Pada batas-batas tertentu, studi ini memang menemukan bahwa masyarakat Jawa Timur yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, dan ideologi serta disekat oleh batas-batas kelas yang *rigid*, niscaya akan mengidap potensi konflik yang besar jika semua perbedaan dan kesenjangan yang ada tidak dikelola dengan baik. Bukti-bukti yang ada di lapangan telah membuktikan bahwa masyarakat Jawa Timur yang tersratifikasi dan pluralistik acapkali dihadapkan pada sejumlah dilema: membiarkan perbedaan itu mencuat atau menekan perbedaan yang ada, dengan cara mencoba menutup-nutupinya dengan berbagai bentuk rekayasa sosial yang seolah-olah harmoni adalah satu-satunya kunci untuk membangun masa depan. Apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk mengelola perbedaan agar tidak tergelincir menjadi pemicu terjadinya disintegrasi dan konflik yang terbuka?

Di berbagai lokasi penelitian, studi ini menemukan bahwa di balik potensi konflik dan syakwasangka yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi perbedaan, ternyata masih ada pranata dan kearifan lokal yang terbukti fungsional dan efektif meredam agar perbedaan dan potensi konflik yang ada tetap dalam dikelola dengan baik, tanpa harus

melerup menjadi konflik yang terbuka. Di sebagian warga masyarakat, mungkin benar bahwa perbedaan atas dasar agama atau etnis dapat membuat kedua belah pihak yang berbeda itu terus-menerus bersywasangka dan bahkan menyimpan kecurigaan yang kronis. Tetapi, di sebagian warga masyarakat yang lain, perbedaan yang ada itu, ternyata seringkali disikapi dengan bijak, penuh rasa toleransi dan terbukti mereka dapat hidup berdampingan selama sekian lama tanpa pernah sekali pun diusik oleh konflik.

Di Kota Surabaya, misalnya ketika isu tentang ancaman peledakan bom di sejumlah gereja sempat mencuat, salah satu fenomena yang menarik dicermati adalah sikap toleran dan upaya-upaya perlindungan yang diperlihatkan Banser NU dan berbagai organisasi sosial-keagamaan lain yang justru bersedia ikut menjaga ketentraman umat Kristen yang tengah beribadah tanpa harus dibayang-bayangi dengan pandangan atau sikap yang tersekat-sekat atas dasar perbedaan agama yang dipeluk. Sejumlah informan dari pihak pemeluk agama Kristen yang diwawancarai, umumnya bukan saja menyatakan terimakasih dengan sikap simpatik yang diperlihatkan sebagian umat Islam yang bersedia menjaga keamanan gereja dari kemungkinan serangan peledakan bom, tetapi mereka umumnya juga meyakini bahwa sikap saling melindungi dan toleran seperti itulah yang semestinya dikembangkan antar pemeluk agama yang berbeda di Provinsi Jawa Timur.

Di Situbondo, hal lain yang juga menjadi cermin dan strategis dikembangkan untuk menumbuhkan semangat multikulturalism adalah keberadaan Forum Lintas Agama. Aktivitas Forum Lintas Agama ini, kendati ruang gerak dan aktivitasnya tidak sepenuhnya mulus dan diterima oleh semua pihak, tetapi bagaimanapun juga harus diakui bahwa forum semacam ini sangat fungsional untuk menjembatani dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak yang berbeda agama untuk saling mengenal dan menjalin kontak yang lebih personal. Forum seperti ini, bahkan tidak hanya memungkinkan orang yang berbeda agama untuk saling kenal, tetapi juga antar orang yang berbeda etnis untuk dapat menjalin komunikasi satu dengan yang lain, sehingga cepat atau lambat akan dapat mengurangi timbulnya berbagai sywasangka yang kontra-produktif bagi upaya membangun keserasian sosial di antara warga masyarakat Jawa Timur.

Salah satu fenomena yang menarik untuk disimak dalam konteks kehidupan multikulturalism adalah ketika ada beberapa gereja yang ikut berperan menyediakan takjil

untuk berbuka puasa bagi kaum muslim dan muslimat yang berpuasa. Aktivitas semacam ini, sepintas mungkin tidak bermakna apa-apa, dan bahkan dapat menumbuhkan kecurigaan baru bahwa hal itu dilakukan gereja untuk menarik simpati dan merupakan bagian dari isu Kristenisasi. Tetapi, di mata warga masyarakat yang lain, aktivitas seperti itu sedikit-banyak membangun cara pandang dan menumbuhkan toleransi yang menggembirakan, khususnya antar pemeluk agama yang berbeda. Esensi masalahnya di sini bukan pada takjil yang disediakan gratis bagi umat muslim yang berpuasa, tetapi kesediaan orang yang berbeda agama untuk ikut menyumbang dan berbuat sesuatu kepada umat beragama yang lain, sungguh hal itu adalah hal yang menggembirakan dan positif.

Sikap tenggang rasa dan kesediaan untuk memahami perbedaan yang ada, tanpa harus diwarnai dengan syakwasangka, dalam banyak hal tampaknya terbukti merupakan kunci untuk membangun kehidupan multikulturalism di berbagai daerah Provinsi Jawa Timur. Selain yang terjadi di Surabaya, salah satu sikap multikulturalism yang juga menarik untuk disimak adalah pada kasus seputar keberadaan salah satu klenteng yang ada di tepian pantai di pusat Kota Tuban. Sebagai tempat ibadah bagi orang yang memeluk agama Konghuchu, keberadaan klenteng ini ternyata relatif bisa hidup berdampingan dan diterima warga di sekitarnya yang beragama Islam (mayoritas) maupun Kristen (sebagian).

Di Kabupaten Tuban, hubungan keserasian yang berkembang di kalangan masyarakat setempat terjadi bukan hanya secara horizontal antar pemeluk agama dan etnis yang berbeda, tetapi juga secara vertikal. Di Tuban, sebuah wilayah yang relatif kecil, tetapi di sana antara umat Islam, Kristen dan konghuchu umumnya telah sekian lama hidup berdampingan dengan rukun, tanpa pernah dinodai sedikitpun dengan pergesekan yang berbau SARA maupun ekonomi –kecuali konflik yang dipicu karena perbedaan ideologi dan kepentingan partai. Dalam radius hanya 1 kilometer, di Kabupaten Tuban dapat dijumpai adanya masjid, mushola, gereja dan klenteng yang relatif berdekatan, tanpa harus satu sama lain saling terganggu. Kunci dari hubungan keserasian yang terbangun di wilayah ini umumnya adalah pada sikap toleransi.

Perbedaan antar pemeluk agama dan antarkelas yang ada di wilayah ini, sebetulnya bukannya tidak ada. Di Kabupaten Tuban dan juga daerah lain, kebetulan

mayoritas etnis Tionghoa yang ada adalah pemeluk agama Kristen dan Konghucu, dan secara ekonomi status mereka rata-rata lebih mapan: mereka umumnya adalah pemilik toko-toko besar dan tinggal di kawasan pecinan. Tetapi, karena lingkungan komunitas setempat sudah saling kenal dan dalam kehidupan sehari-hari senantiasa menjalin kontak-kontak personal, maka yang namanya syakwasangka umumnya tidak banyak berkembang atau tidak memperoleh kesempatan untuk berkembang. Di Tuban, apa yang disebut *cross-cutting affiliation*, benar-benar berkembang, di mana antar etnis yang berbeda dan antar pemeluk agama yang berbeda, ternyata memiliki forum atau zone netral yang memungkinkan mereka tetap dapat saling berhubungan tanpa harus dibayang-bayangi dengan sikap egois yang sikap etnosentris yang kaku. Kegiatan olahraga bersama, seperti bermain bola basket atau bulu tangkis, atau mancing bersama, misalnya adalah aktivitas "kebersamaan" yang dapat menjadi jembatan untuk menetralsir perbedaan dan kecurigaan yang tidak perlu.

Pada tingkat yang lebih mikro, studi ini juga menemukan bahwa peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam banyak kasus juga penting. Dalam kasus konflik antara Negara dan rakyat, kasus pertanahan, kasus industrialisasi, konflik perebutan sumber-sumber produksi dan sebagainya, peran tokoh lokal umumnya adalah mencoba menjadi jembatan kepentingan masyarakat dengan pihak yang berkuasa atau kekuatan komersial yang dinilai merugikan penduduk lokal. Pada batas-batas tertentu, peran tokoh ini terbukti efektif, tetapi beberapa informan mengakui bahwa tidak jarang mereka juga kewalahan ketika menghadapi tuntutan dan ketidakpuasan masyarakat yang benar-benar mengumpal, dan aksi massa yang melibatkan jumlah warga yang tidak sedikit. Ketika massa yang tidak puas pada sesuatu hal telah berkembang menjadi aksi kerumunan, misalnya, maka seringkali peran tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat menjadi sulit berkembang karena ulah atau perilaku massa yang terkadang lepas kendali.

Beberapa nara sumber yang diwawancarai dalam studi ini menyatakan bahwa selain soal teknis menghadapi aksi kerumunan, kendala lain yang acapkali menghambat peran tokoh masyarakat dan tokoh agama menghadapi aksi keresahan sosial adalah pada figure tokoh itu sendiri. Pasca reformasi, menurut nara sumber tersebut keberadaan tokoh yang benar-benar netral dan *independent*, dalam banyak hal makin sulit dicari karena mereka umumnya mulai terlibat dalam kehidupan politik, sehingga netralitasnya acapkali

dipertanyakan masyarakat. Seorang ulama yang masuk ke partai politik tertentu, misalnya, tentu sulit diharapkan dapat menyelesaikan atau menjadi mediator ketika terjadi konflik politik.

Studi ini menemukan beberapa hal yang mempengaruhi peran tokoh dalam penyelesaian dan penanganan keresahan sosial di masyarakat adalah: Pertama, netralitas atau independensi tokoh itu di mata masyarakat. Kedua, akses tokoh yang bersangkutan ke jenjang politik yang lebih tinggi, karena hal itu akan menentukan sejauhmana tokoh yang bersangkutan mampu menjadi saluran bagi aspirasi sosial-politik masyarakat di sekitarnya. Ketiga, kharisma dan wibawa tokoh itu di hadapan masyarakat. Keempat, kemampuan tokoh itu untuk merumuskan inti pokok persoalan, akar konflik dan aspirasi sosial-politik masyarakat yang ada, untuk kemudian dapat dicarikan jalan keluar yang memuaskan semua pihak.

Sebagai tokoh yang disegani dan dihormati masyarakat, posisi tokoh masyarakat dan ulama dalam mengantisipasi keresahan sosial di Provinsi Jawa Timur ibaratnya adalah sebagai pemadam kebakaran yang dengan taktis mampu mencegah kebakaran yang meluas sebelum api membesar. Menangani dan menyelesaikan konflik yang sudah terlanjur membesar, tentu selain dibutuhkan energi lebih besar, biasanya seringkali juga terlambat karena korban keburu berjatuh. Oleh sebab itu, dengan menempatkan posisi tokoh dan ulama sebagai bagian dari komponen *early warning system*, diharapkan upaya mengantisipasi keresahan sosial akan dapat lebih mungkin diwujudkan.

Di lingkungan masyarakat yang satu sama lain teralienasi dan tidak pernah menyapa, barangkali membangun kehidupan multikulturalism bukan hal yang mudah. Tetap, studi ini memperlihatkan ketika di masyarakat banyak tumbuh zone-zone atau forum yang memungkinkan mereka saling menyapa satu dengan yang lain, maka yang namanya syakwasangka dan potensi konflik akan dapat diredam pada tingkat yang sangat minimal. Pada batas-batas tertentu, studi ini menemukan bahwa di berbagai daerah di Jawa Timur, sikap toleran dan zone-zone netral inilah sebetulnya yang menjadi kunci dari perkembangan kehidupan multikulturalism yang dinamis, namun fungsional dan efektif menjaga hubungan keserasian sosial antar warga yang harmonis (\*).

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Studi yang tengah dilaporkan ini pada dasarnya bermaksud memetakan situasi problematik di seputar persoalan keserasian sosial dan ancaman konflik yang dihadapi masyarakat Propinsi Jawa Timur. Pada batas-batas tertentu, studi ini telah berhasil memetakan sumber dan latar belakang masalah terjadinya konflik, bentuk-bentuk gangguan keserasian sosial yang terjadi, dan mekanisme sosial yang dikembangkan masyarakat untuk meredam konflik agar tidak makin meluas dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Sebagai sebuah wilayah yang dihuni penduduk yang sangat pluralistik, tersegregasi, dan bahkan terpolarisasi, harus diakui bahwa kondisi semacam ini membuat Propinsi Jawa Timur ibaratnya adalah ladang persemaian yang subur bagi terjadinya konflik antar anggota masyarakat, antar kelompok, maupun antara masyarakat dan negara, serta antara masyarakat dengan kekuatan komersial. Laporan ini, secara panjang-lebar telah menggambarkan bahwa di berbagai daerah di Jawa Timur, intensitas terjadinya konflik umumnya cukup tinggi, dan tak jarang meresahkan. Kegagalan negara dan sikap kurang tanggap untuk segera merespon secara proporsional keluhan-keluhan terbukti telah memicu terjadinya konfliknya yang meminta *social-human cost* yang tinggi.

Dalam bab penutup ini, selain dikemukakan kembali sejumlah temuan pokok dari studi yang telah dilakukan, juga dipaparkan kebijakan dan program yang perlu dikembangkan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur untuk mencegah agar potensi terjadinya konflik dan berbagai bentuk gangguan terhadap keserasian sosial masyarakat tidak berkembang makin liar. Di bagian akhir, dikemukakan pula sejumlah prasyarat yang dibutuhkan untuk mempercepat upaya pengembangan keserasian sosial di berbagai kota/kabupaten di Propinsi Jawa Timur.

## 1. Kesimpulan

Atas dasar kajian lapangan, analisis berita-berita di media massa dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, beberapa temuan penting yang diperoleh dari studi ini adalah:

1. Keresahan sosial yang timbul di masyarakat umumnya makin mencemaskan dan cenderung makin luas ketika tidak ada informasi yang jelas dari sumber yang memiliki otoritas, terlebih ketika ada pertentangan informasi dari sekian banyak sumber. Tidaknya sumber yang dapat dipercaya, bukan saja akan menimbulkan desas-desus atau rumor, tetapi juga memperkeras perbedaan atau benturan kepentingan, sehingga masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik cenderung akan makin mengeras dan tidak saling percaya.
2. Adanya "jarak sosial" antara masyarakat dan aparat menyebabkan proses penyaluran keluhan masyarakat menjadi terhambat. Alih-alih warga masyarakat bersedia menjadi ujung tombak dalam mendeteksi dini terjadinya benih-benih keresahan sosial, sering terjadi justru masyarakat menarik diri dan menghindari berurusan dengan aparat karena takut terlibat dalam persoalan yang dapat merugikan posisi dirinya.
3. Keresahan sosial yang sulit ditangani umumnya berkaitan dengan adanya perbedaan, keyakinan, ideologi dan keyakinan. Di sejumlah daerah, perbedaan yang terjadi di antara umat Islam sendiri, khususnya antara Syiah dan Sunni, misalnya dapat berpotensi menyulut terjadinya konflik yang terbuka. Di sisi lain, perbedaan sikap tentang pendirian tempat ibadah antara umat yang berbeda agama, dalam beberapa hal juga berpotensi menyulut keresahan sosial. Di Provinsi Jawa Timur, potensi konflik juga terjadi ketika massa partai satu dengan yang lain tengah bersaing dalam Pilkada, dan berbeda kepentingan dalam mengusung calonnya masing-masing. Pendek kata, perbedaan keyakinan, ideologi dan kepentingan sangat berpeluang untuk mendorong terjadinya keresahan sosial yang mencemaskan.
4. Konflik terbuka yang melibatkan massa atau kelompok dalam jumlah besar dan memiliki perbedaan identitas yang terwariskan dari waktu ke waktu cenderung sulit didamaikan/diakomodasikan.

5. Faktor yang mempercepatnya keresahan sosial menjadi konflik yang *manifest* umumnya adalah diskriminasi, inkonsistensi, ketidakadilan/kesewenang-wenangan. Di masyarakat mana pun sebetulnya senantiasa ada potensi-potensi konflik yang dilatarbelakangi karena adanya perbedaan keyakinan, ideologi, dan kepentingan. Potensi konflik yang sifatnya *latent* ini, akan dengan cepat menjadi manifest tatkala sikap pemerintah atau pihak ketiga dinilai berat sebelah, tidak adil, penerapan hukum yang inkonsisten, dan terlebih jika dirasakan ada perlakuan yang sewenang-wenang. Dalam berbagai kasus pertanahan, misalnya, tidak jarang radikalisme massa menjadi makin keras ketika pendekatan yang diterapkan ternyata bersifat represif dan dinilai sewenang-wenang.
6. Konflik yang sifatnya horizontal umumnya lebih sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat, dan bahkan ada kecenderungan terus berkepanjangan. Berbeda dengan konflik yang berbasis material, seperti demonstrasi buruh yang dilatarbelakangi keinginan untuk dinaikkan upahnya biasanya akan cepat terselesaikan jika tuntutan mereka terpenuhi. Tetapi, konflik yang disebabkan karena dendam kesumat yang terjadi antar-kelompok atau golongan yang berbeda, niscaya tidak mudah terselesaikan hanya dengan jalan perundingan yang sifatnya formal.
7. Industrialisasi yang menafikan kepentingan masyarakat lokal cenderung berpotensi menyulut resistensi dan keresahan sosial. Di berbagai daerah, ketika pembangunan industri ternyata hanya mementingkan eksploitasi sumber daya alam dan menambah pendapatan negara, tetapi tidak atau kurang memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, maka jangan kaget jika dengan cepat akan menyulut resistensi dan keresahan sosial.
8. Keterlibatan dan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial kemasyarakatan yang dinilai masyarakat dalam posisi netral umumnya masih cukup signifikan untuk mencegah agar keresahan sosial tidak makin meluas.

## 2. Program *Social Early Warning System*

Prinsip dasar dari pengembangan program mekanisme deteksi dini (*social early warning system*) adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara pro-aktif



berupaya untuk mendeteksi, memonitor, menganalisis dan menangani setiap benih konflik sedini mungkin dan secepat mungkin. Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya keresahan sosial, deteksi dini perlu lebih diutamakan, baik pada titik-titik kelompok strategis dalam lingkungan komunitas di tingkat lokal maupun pada titik-titik yang merupakan persentuhan kegiatan pemerintah dengan masyarakat lokal.

Alasan utama tentang perlunya mekanisme deteksi dini adalah bagaimana mencegah keresahan sosial tidak berkembang meluas, dan “api” keresahan dapat dipadamkan sedini mungkin ketika kebakaran belum membesar dan makin sulit ditangani. Dalam pengembangan program *social early warning system*, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

**Pertama**, menentukan siapa yang sekiranya pantas menjadi penghubung dan pendeteksi awal kemungkinan terjadinya keresahan sosial di masyarakat. Yang dimaksud pendeteksi di sini sudah barang tentu tidak harus orang yang terlatih secara militer, aparat keamanan dan sejenisnya. Tetapi, yang terpenting mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengenali situasi dan kondisi daerahnya. Dalam hal ini, kelompok-kelompok sekunder di masyarakat, CBO (*Community Based Organization*), dan tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah pihak-pihak yang potensial diposisikan sebagai pemantau karena mereka adalah bagian dari warga masyarakat yang memiliki akar kultural dan sosial di komunitasnya. Tugas pendeteksi di sini adalah sebagai mata dan telinga atas berbagai desas-desus, keresahan dan ketidakpuasan warga masyarakat, tetapi bukan dalam artian sebagai perpanjangan tangan yang lebih berorientasi ke atas daripada ke bawah. Yang disebut pendeteksi di sini justru adalah orang-orang yang memiliki aspirasi sosial-politik yang pro kepada masyarakat lokal, namun memiliki kesadaran dan kesepakatan bahwa penyaluran aspirasi sosial masyarakat seyogianya disampaikan melalui jalur yang sudah tersedia. Berbeda dengan mata-mata yang sekadar mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kekuasaan dan kelompok kepentingan, yang disebut pendeteksi di sini adalah orang-orang yang diharapkan dapat berdiri di dua sisi kepentingan dan memiliki sikap yang reformis (bukan radikal).

**Kedua**, menentukan dan menawarkan kepada masyarakat tentang bentuk serta jenis saluran keluhan keresahan sosial. Bentuk saluran keluhan keresahan sosial ini bisa bersifat informal, semi informal atau formal. Yang terpenting saluran yang

dikembangkan benar-benar harus mampu merebut kepercayaan masyarakat, transparan, dan benar-benar melindungi identitas serta keselamatan warga masyarakat yang melaporkan keresahan yang dialaminya. Di lingkungan masyarakat kota maupun pedesaan, saluran keluhan bisa berupa surat yang dimuat di kontak pembaca, kontak langsung, laporan tertulis, tilpun, dan sebagainya. Posisi pemerintah daerah, baik di tingkat desa, kecamatan atau di tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini seyogianya bukan serba dominan apalagi represif, sebaliknya: dalam kasus keresahan sosial yang dicoba disampaikan kepada pejabat setempat atau orang-orang tertentu, apapun jenis dan isi keluhannya seharusnya disikapi dengan bijak dan yang terpenting justru harus direspon secara proporsional.

*Ketiga*, pendataan dan registrasi hasil pemantauan kemungkinan terjadinya keresahan sosial. Kegiatan pendataan ini penting dilakukan bukan sekadar sebagai upaya pengarsipan belaka, tetapi yang terpenting adalah menjadikan kasus-kasus keresahan sosial sebelumnya sebagai cermin untuk berkaca atau belajar dari kekeliruan yang terjadi sebelumnya. Dengan melakukan pengarsipan yang rapi diharapkan akan dapat diidentifikasi pola keresahan yang muncul di masyarakat, apa faktor penyebabnya, dan setelah itu menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan.

*Keempat*, yang dimaksud upaya penanganan awal adalah penanganan yang mungkin dikembangkan pada level paling bawah, yang sekiranya dapat ditangani sendiri pendeteksi awal yang ada di komunitas lokal. Sepanjang memungkinkan, upaya penanganan awal untuk meredam terjadinya keresahan sosial dalam skala yang lebih luas seyogianya tidak selalu diserahkan kepada level kecamatan, kota/kabupaten, apalagi provinsi. Tetapi, jika mungkin diselesaikan secara informal, lewat adat-istiadat setempat yang fungsional hidup bersama-sama dengan tokoh-tokoh setempat yang dipercaya dan memiliki legitimasi kultural.

*Kelima*, menyangkut tindak lanjut penanganan awal yang sudah dikembangkan sebelumnya. Dalam berbagai kasus, terkadang harus diakui bahwa kasus-kasus keresahan sosial di masyarakat ternyata berkembang liar seperti bola salju: dari waktu ke waktu menjadi makin besar dan menyulitkan untuk ditangani hanya di level desa atau komunitas lokal. Dalam konteks seperti ini, tak pelak keterlibatan aparat birokrasi dan tokoh masyarakat serta tokoh agama yang lebih reputatif adalah sesuatu yang semestinya

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional

singkat, dan bahkan ada kecenderungan terus berkepanjangan		
Industrialisasi yang menafikan kepentingan masyarakat lokal cenderung berpotensi menyulut resistensi dan keresahan sosial	Pengembangan Program CD ( <i>Community Development</i> ) yang melibatkan peran aktif masyarakat lokal	Mencegah agar masyarakat lokal tidak teralienasi dari pembangunan industri di wilayahnya
Dibutuhkan peran tokoh masyarakat, ulama dan lembaga sosial yang netral untuk mencegah agar keresahan sosial tidak makin meluas	Pengembangan kerjasama dengan tokoh masyarakat, ulama dan lembaga sosial yang netral	Mencegah agar pertentangan tidak makin meluas

#### 4. Saran

Untuk lebih menjamin efektivitas pengembangan mekanisme deteksi dini, beberapa prasyarat yang diperlukan adalah:

1. Butuh *sensitivity*, artinya setiap aparat atau warga masyarakat yang ada di ujung tombak, terutama yang bersentuhan langsung dengan komunitas local perlu peka atas berbagai isyarat/tanda keresahan sosial sesamar apapun sedini mungkin. Wujud-wujud keresahan sosial yang perlu diantisipasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis sebagai berikut: (1) omongan, pergunjungan atau *labeling* yang merebak di masyarakat, (2) protes atau debat-sengit individual, (3) sikap apatis yang makin meluas, (4) demonstrasi, dan (5) penyanderaan, penghalangan kegiatan serta perusakan/penganiayaan atas manusia atau harta-benda. Urutan keresahan ini sekaligus memperlihatkan tingkat-tingkat hierarkhis keseriusan gangguan atau keresahan sosial yang timbul, dan sudah barang tentu membutuhkan level penanganan yang berbeda-beda.
2. Butuh koordinasi yang *multi-level*, baik menyangkut arus informasi keluhan maupun saling berbagi analisis dan pertukaran pendapat tentang solusi yang efektif untuk mengantisipasi keresahan sosial. Berharap masyarakat bersedia berperan aktif untuk menyampaikan hasil pengamatan mereka di lapangan, sudah barang tentu perlu didukung kesediaan aparat birokrasi dan aparat keamanan untuk menghilangkan "jarak sosial" agar masyarakat tidak enggan menyampaikan keluhan.
3. Butuh *exhaustiveness*. Artinya, dalam hal pencatatan data perlu diupayakan pengumpulan, pencatatan dan pemrosesan yang teliti-cermat dan menyeluruh,

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional \_\_\_\_\_

dilakukan. Konflik yang terjadi antara warga dari dua daerah yang berbeda, misalnya, tentu sulit jika pemecahannya hanya diserahkan kepada salah satu daerah, sementara persoalan yang dipersengketakan adalah masalah lintas daerah.

### 3. Isu Prioritas dan Program *Social Early Warning System*

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, untuk Provinsi Jawa Timur sejumlah isu prioritas dan program *Social Early Warning System* yang direkomendasikan untuk dikembangkan dalam rangka mengantisipasi ancaman keresahan sosial adalah:

Tabel 2

Isu Prioritas dan Program *Social Early Warning System* Dalam Rangka Mengantisipasi Ancaman Keresahan Sosial di Provinsi Jawa Timur

Isu Prioritas	Program	Tujuan
Keresahan social umumnya makin mencemaskan ketika tidak ada informasi yang jelas dari sumber yang memiliki otoritas, terlebih ketika ada pertentangan informasi dari sekian banyak sumber	Kerjasama dengan tokoh/ulama setempat untuk sosialisasi dan sebagai mediator konflik	Mencegah perkembangan desas-desus dan rumor (misal: isu dukun santet)
Adanya "jarak sosial" antara masyarakat dan aparat menyebabkan proses penyaluran keluhan masyarakat menjadi terhambat	Program rutin <i>Coffee Morning</i> antara Ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah	Mendekatkan dan membangun saling percaya antara masyarakat dan aparat
Keresahan social yang sulit ditangani umumnya berkaitan dengan adanya perbedaan keyakinan, ideology dan keyakinan	Pengembangan forum silaturahmi bersama antar umat beragama.  Pengembangan forum lintas-partai di pedesaan (slametan, arisan, dll)	Mengembangkan pemahaman akan perbedaan dan hak serta kewajiban dalam bermasyarakat
Konflik terbuka yang melibatkan massa atau kelompok dalam jumlah besar dan memiliki perbedaan identitas yang terwariskan dari waktu ke waktu cenderung sulit didamaikan/diakomodasikan	Pengembangan kegiatan bersama lintas afiliasi (bukan pertandingan, tapi permainan)	Mengkikis dendam antarkelompok yang bertikai (misal: konflik peserta Pilkada, konflik antar pendukung partai)
Faktor yang mempercepatnya keresahan social menjadi konflik yang manifest umumnya adalah diskriminasi, inkonsistensi, ketidakadilan/kesewenang-wenangan	Program mediasi konflik	Mencegah kemungkinan ditempuh jalur represif dalam penyelesaian konflik
Konflik yang sifatnya horizontal umumnya lebih sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang	Pengembangan dan Revitalisasi Peran Forum Kerukunan Antar-Umat Beragama	Menumbuhkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga \_\_\_\_\_

baik tentang lokasi atau wilayah kejadian, waktu, pihak-pihak yang terlibat, sumber dan faktor penyebab keresahan, dampak yang ditimbulkan secara benar-benar mendalam. Prinsip ini sudah barang tentu hanya bisa dijalankan bila didukung oleh suatu sistem dokumentasi yang tertata rapi.

4. Butuh *fairness*. Artinya secara jujur dan terbuka pemerintah harus berupaya sedapat mungkin untuk berpikir seadil-adilnya dan bertindak yang obyektif dengan siapa pun, terutama terhadap mereka yang lemah, terabaikan dan marginal. Sejak awal perlu disadari bahwa aksi-aksi keresahan sosial pada dasarnya adalah sebuah “teriakan untuk meminta perhatian dan keadilan”, sehingga yang semestinya dilakukan bukan pagi-pagi memperlakukan masyarakat yang meminta keadilan itu sebagai terdakwa, tetapi seyogianya memperlakukan mereka sebagai korban yang perlu mendapat simpati dan empati (\*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2004. "Konflik dan Pembangunan Politik", dalam: *Analisis CSIS, Penguatan dan Modal Sosial Masyarakat*. Volume 33, No. 3 September 2004.
- Budiman, Arief, dkk. 2000. *Harapan dan Kecemasan: Menatap Arah Reformasi Indonesia*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Bachriadi, Dianto, 1995. *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital*. Bandung: Akatiga.
- Basrowi & Sukidin, 2003. *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia.
- DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley, 1992. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon.
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fromm, Erich. 2000. *Akar Kekerasan, Analisis Sosio-psikologis Atas Watak Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer (peny.), 1997. *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fauzi, Noer dkk., 2000. *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah*. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
- Gidden, Anthony. 1996. *The Nation State and Violence*. Cambridge: K Polity Press.
- Kuntowijoyo, 1993. *Radikalisasi Agraria: Essai-Essai Sejarah* (Yogyakarta: Bentang).
- Kartika, Sandra & Gautma,a Candra, 1999. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara* (Jakarta: Kerjasama Panitia Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan).
- Kusuma, N. & Fitria Agustina (Penyunting). 2003. *Gelombang Perlawanan Rakyat, Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Insist.
- Mulkan, Abdul Munir, dkk. 2001. *Membongkar Praktik Kekerasan, Menggagas KULTUR Nir-Kekerasan*. Malang: Kerjasama Pusat Studi Islam dan Filsafat Universitas Muhammadiyah Malang dengan Sinergi Press.

Nasikun, 1984. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Putri, C. Elly Kumari Tjahya, 2001. "Pemanfaatan Strategi Pengembangan Masyarakat Bagi Penumbuhan Sikap Kesetiakawanan dan Integrasi Sosial Antaretnis di Indonesia", dalam: *Jurnal CSIS* Tahun XXX/2001 No. 3, "Konflik Sosial: Tantangan Domestik dan Global.

Pratikno, Fadjar, 2000. *Gerakan Rakyat kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani* (Yogyakarta: Media Pressindo).

Sihbudi, Riza & Nurhasim (eds.). 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*. Jakarta: Grasindo.

Susetiawan. 2000. *Konflik Sosial, Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Schiller, Jim (ed.). 2003. *Jalan Terjal Reformasi Lokal, Dinamika Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah, program Studi Ilmu Politik UGM.

Soharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, memberdayakan Masyarakat, kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Susan, Novri, 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2000. *Mengupayakan Terwujudnya Masyarakat Warga di Desa-Desa: Sebuah Cita-Cita Berikut Tantangannya, Dalam Arus Bawah Demokrasi*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Walsh, Thomas & Harry Wibowo (Penyunting). 2003. *Masih Adakah Alternatif di Ujung Krisis*. Jakarta: INFID.

Zakaria, Yondo dkk., 2000. *Menyiasati Otonomi Daerah Demi Pembaharuan Agraria*. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.

# INTERVIEW GUIDE

## PENYUSUNAN MODEL *SOCIAL EARLY WARNING SYSTEM* UNTUK MENGANTISIPASI KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT

### Kata Pengantar

Kami adalah tim peneliti dari LPPM Universitas Airlangga. Saat ini kami sedang mengadakan studi dalam rangka menyusun Model *Social Early Warning System* untuk Mengantisipasi terjadinya Konflik Sosial di Masyarakat.

Kami mohon bapak/ibu sekalian bersedia memberikan informasi yang kami butuhkan sebagai bahan bagi kami untuk merumuskan program penanganan konflik, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Atas kesediaan dan dukungan bapak/ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih.

### A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : .....
2. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
3. Usia : .....tahun
4. Status : .....

### B. POTENSI DAN SUMBER KONFLIK

5. Dalam 5 tahun terakhir, apa saja potensi konflik yang ada dan timbul di masyarakat sekitar?

6. Apa saja yang menjadi potensi penyebab terjadinya konflik kelas yang sifatnya vertikal dan konflik horisontal di masyarakat? Apakah terjadi akumulasi perbedaan dan segregasi sosial berdasarkan perbedaan kelas dan perbedaan yang sifatnya horisontal?



**7. Sejauhmana isu SARA potensial memicu terjadinya konflik di masyarakat?**

**8. Sejauhmana faktor politik menjadi penyebab terjadinya konflik di masyarakat?**

**9. Sejauhmana terjadi segregasi sosial di masyarakat? Apa yang menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya segregasi sosial di masyarakat?**

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional \_\_\_\_\_

10. Apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik sehingga berkembang menjadi konflik yang terbuka atau manifest?

**C. MEMBANGUN KESERASIAN SOSIAL**

11. Sejahumana batas daya toleransi masyarakat terhadap perbedaan dan isu SARA?

12. Bagaimanakah cara atau mekanisme yang dikembangkan untuk meredakan atau menetralsir konflik yang timbul? Siapa pihak yang berperan dalam negosiasi konflik?

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional \_\_\_\_\_

13. Apa yang berkembang di masyarakat setelah terjadi konflik yang sifatnya terbuka? Apakah konflik yang terjadi melahirkan dendam yang terpendam atau malah mendewasakan sikap masyarakat dalam menerima perbedaan?

14. Sejuahmana keserasian sosial berkembang di masyarakat, dan forum apakah yang biasanya menjadi titik temu untuk menetralsir adanya perbedaan atau potensi konflik yang ada di masyarakat?

15. Bagaimanakah peran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan berbagai lembaga sosial yang ada dalam mengembangkan hubungan keserasian sosial dan penanganan konflik di masyarakat?

**BIO DATA PENELITI**

1. Nama : Karnaji, S.sos, M.Si.
2. NIP : 132 162 037
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat/Tanggal lahir : Jombang, 21 April 1968
5. Alamat : Wisata Bukit Mas 2  
Zona Palais Du Luxembourg E1A Nomor 22  
Surabaya  
(031) 711 95 469, Hp. 08123564069  
Email: karnaji\_fisipua@yahoo.com
6. Agama : Islam
7. Pendidikan : S1 Sosiologi Universitas Airlangga  
S2 Ilmu Ilmu Sosial Universitas Airlangga
8. Pekerjaan : Dosen Tetap FISIP Unair

**KARIER DI BIDANG KEAHLIAN**

1995 – sekarang : Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Unair

1999 Penceramah Sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA di 6 (enam) kabupaten

**Karya Tulis Buku**

Karnaji,, "GKG Jalan Di Tempat" dalam: Bambang Parianom & A. Masyhur Effendi (ed.), 1998. **GKD: Paradigma, Strategi dan Langkah Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan**. Surabaya: Lembaga Studi Kewirausahaan Bekerjasama dengan Penerbit Alumni.

Mustain, Bagong Suyanto dan Karnaji 1998. **Studi Kualitatif Pekerja Anak di Jawa Timur**. Surabaya: Airlangga University Press Bekerjasama dengan UNICEF.

Bagong Suyanto dan Karnaji, 2000. **Pengkajian dan Pengembangan Implementasi GERDU TASKIN Di Desa Pantai dan Rural di Jawa Timur**. Surabaya: Lutfansa..

Bagong Suyanto dan Karnaji dkk., 2000. **Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak..** Surabaya: Lutfansa

Sri Sanituti Hariadi dan Karnaji.. " Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan" dalam: Bagong Suyanto, 2000 **Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penangannya..** Surabaya: Lutfansa

Sri Sanituti Hariadi , Bagong Suyanto dan Karnaji,. **Kejahatan dan Aksi Kekerasan Kolektif**. Lutfansa, 2000

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional \_\_\_\_\_

- Karnaji dan Bagong Suyanto dkk., 2001. ***Pengentasan Kemiskinan di Kota Surabaya..*** Surabaya: Lutfansa
- Bagong Suyanto dan Karnaji (ed), 2002. ***Menata PKL dan Bangunan Liar.*** Surabaya: Lutfansa
- Bagong Suyanto dan Karnaji (ed), 2002. ***Menakar Peran Serta Masyarakat Dalam memajukan Pendidikan di Kabupaten Jombang.*** Surabaya: Lutfansa.
- Bagong Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003. ***Penyusunan Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Tugu Pahlawan.*** Surabaya: Lutfansa.
- Bagong Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003. ***Rencana Induk Program Pengendalian Pengendalian Urbanisasi dan Penanganan PMKS di Propinsi Jawa Timur.*** Surabaya: Lutfansa.
- Bagong Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003. ***Pendataan Masalah Sosial (Anak Jalanan di Kota Surabaya: Isu Prioritas dan Program Penanganannya).*** Surabaya: Lutfansa.
- Bagong Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003. ***Kesenjangan Masalah Sosial yang Timbul dan Upaya Peanggulangannya.*** Surabaya: Lutfansa.
- Bagong Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003. ***Studi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro.*** Surabaya: Lutfansa.
- Bagong Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003. ***Profil dan Dinamika Sosial Penduduk Kecamatan Bulak.***
- Sri Sanituti Hariadi dan Karnaji,. " Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan" dalam: Bagong Suyanto, 2000 ***Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya.*** Surabaya: Lutfansah
- Mustain, Bagong Suyanto dan Karnaji 1998. ***Studi Kualitatif Pekerja Anak di Jawa Timur.*** Surabaya: Airlangga University Press Bekerjasama dengan UNICEF.
- Bagong Suyanto dan Karnaji, 2000. ***Pengkajiaan dan Pengembangan Implementasi GERDU TASKIN Di Desa Pantai dan Rural di Jawa Timur.*** Surabaya: Lutfansa..
- Bagong Suyanto dan Karnaji dkk., 2000. ***Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak.*** Surabaya: Lutfansa
- Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, 2000. ***Pekerja Anak di Sektor Berbahaya.*** Surabaya: Lutfansa dan Ford Foundation.
- Bagong Suyanto & Karnaji, 2002. ***Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kota Surabaya.*** Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Bagong Suyanto & Karnaji, 2003. ***Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya.*** Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga \_\_\_\_\_

120

Bagong Suyanto & Kamaji, 2004. *Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Suyanto, Bagong & Kamaji (eds.), 2004. *Life Dynamics Basic Training Bagi Kelompok Anak Jalanan dan Anak Nakal di Kota Surabaya*. Surabaya: Airlangga University Press.

Suyanto, Bagong & Kamaji, 2005. **KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin**. Surabaya: Airlangga University Press.

Suyanto, Bagong & Kamaji, 2005. **Pendataan PMKS Di Surabaya pemetaan Problema Dan Pengembangan Program Penanganan Lansia Di Kota Surabaya**. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Suyanto, Bagong & Kamaji, 2005. **Penelitian Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Peran Serta Masyarakat Mampu Di Provinsi Jawa Timur**. Surabaya: Lutfansah Mediatama

## Jurnal

Kamaji, 1999. *Anak Jalanan dan Upaya Penanganannya*. Surabaya: Jurnal Hakiki

Kamaji, 2001. *Model Pembinaan dan Pemberdayaan Anak jalanan*. Surabaya: Jurnal Penelitian Dinamika Sosial.

Kamaji, 2002. *Anatomi Anak Jalanan Di Kota Surabaya*. Surabaya: Jurnal Hakiki.

Kamaji, 2002. *Penataan Kota, Kemiskinan dan Eksistensi PKL*. Surabaya: Jurnal Kesra.

Kamaji, 2002. *Potensi dan Eksistensi PKL: Kasus Surabaya*. Surabaya: Jurnal Soroboyo.

Kamaji, 2003. *Kota Surabaya Dalam Jaringan Era Global*. Surabaya: Jurnal Soroboyo.

Kamaji, 2005. *Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan*. Surabaya: Jurnal Sosiologi Dialektika FISIP Universitas Airlangga.

Kamaji, 2003. *Konflik Tanah Perkebunan di Malang Selatan*. Surabaya: Jurnal Masyarakat kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga.

Kamaji, 2003. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Surabaya: Jurnal Masyarakat kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga

Kamaji, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan peluang*. Surabaya: Jurnal Masyarakat kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga

Kamaji, 2005. *Kalangan Marjinal Di Perkotaan Studi Perlawanan Ex. Pedagang Kaki Lima Taman Surya Surabaya*. Surabaya: Jurnal Masyarakat kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional

Karnaji, 2005. *Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenaikan BBM*. Surabaya: Jurnal Masyarakat kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga

### Pengalaman Penelitian

No	Judul	Sumber Dana	Tahun
1.	Mata Rantai Pemasaran Tembakau Virginia	Dikti	1995
2.	Community Support System Wanita Bekerja	BKKBN Pusat	1996
3.	Pengkajian Daerah yang Mendapat IDT di Propinsi Jawa Timur	Bappeda Tk I Jatim	1996
4.	Evaluasi dan Monitoring Kesiapan Daerah Tingkat II dalam Pelaksanaan GKD	Bappeda Tk I Jatim	1996
5.	Peranan Bidan Desa Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera di Pedesaan	BKKBN Pusat	1996
6.	Pemetaan Produk Unggulan Propinsi Jawa Timur Dalam Rangka GKD	Bappeda Tk I. Jatim	1996
7.	Evaluasi dan Penyusunan Model Pengembangan Pilot Project Produk Unggulan di Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1996
8.	Perawatan Kesehatan dan Pola Kematian Bayi di Kalangan Penduduk Pra-Sejahtera dan Sejahtera I di Kecamatan Miskin	BBI	1996
9.	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Bappeda Tk. I Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1996
10.	Evaluasi dan Kendala Pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Lamongan	Bappeda Tk II. Lamongan	1996
11.	Studi Kesiapan dan Penyusunan Model Pemasarakatan Gagasan Honey Years dan Ide Satu Keluarga Satu Balita di Kalangan Generasi Baby Boomers di Jawa Timur	BKKBN Jatim	1997
12.	Studi Pengembangan Model Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Wanita di Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1997
13.	Studi Pengembangan Pendapatan Nelayan di Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1997
14.	Pemetaan Produk Unggulan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	Bappeda Tk II Banyuwangi	1997
15.	Pemetaan dan Penyusunan Program Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Tk. II Blitar	Bappeda Tk II. Blitar	1997
16.	Profil Pendidikan di Desa IDT dan Penyusunan Rencana Pembinaan Pelajar Putus Sekolah di Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1997
17.	Penyusunan Rencana Jangka Menengah Program Pengembangan Wilayah Terpadu di Kecamatan Bancar, Jatirogo, Kenduruhan dan Senori	Bappeda Tk II. Tuban	1997
18.	Studi Evaluasi dan Penyusunan Program Penghapusan Kemiskinan di Propinsi Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1998

## Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional

19.	Penyusunan Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Potensial di Kotamadya Surabaya	Bappeda Tk II Kodya Surabaya	1998
20.	Studi Kualitatif Pekerja Anak di Jawa Timur	UNICEF	1998
21.	Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar di Jawa Timur	UNICEF	1998
22.	Perencanaan Fasilitas Kesehatan di Kotamadya Surabaya	Bappeda Tk II Kodya Surabaya	1999
23.	Evaluasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1999
24.	Gerakan Terpadu (GERDU) Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur	Balitbang da Jatim	1999
25.	Pemetaan Anak Jalanan di Kota Surabaya	Depsos Pusat	1999
26.	Eksplorasi Pekerja Anak Di Sektor Perkebunan Komersial	Mandiri	1999
27.	Pekerja Anak di Sektor Berbahaya Di Jawa Timur	UNICEF	2000
28.	Pengkajian dan Pengembangan Implementasi Program GERDU TASKIN di Desa Pantai dan Rural di Jawa Timur	Balitbang da Jatim	2000
29.	Pengembangan Masyarakat di Sekitar Pertambangan GAS di Pulau Pangerungan Besar Kecamatan Sapeken Sumenep Madura	Atlantic Richfield Bali North Inc (BP) Indonesia	2000
30.	Studi Tentang Pola, Latar Belakang dan Implikasi Sosial Terjadinya Tindak Kekerasan Kolektif Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan di Jawa Timur	Mapolda Jatim	2000
31.	Penelitian Penyusunan Mekanime Penyaluran dan Pola Pemanfaatan KUT yang Berorientasi pada Pemberdayaan Petani Kecil	Balitbangda Jatim	2001
32.	Penelitian dan Pengkajian BUMN-BUMN yang Memiliki Nilai Strategis	Balitbangda Jatim	2001
33.	Studi Penyusunan Model Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan	Ditjen Dikti	2001
34.	Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Surabaya	Bapeko Surabaya	2001
35.	Program Penanganan Pekerja Anak Di Sektor Berbahaya Di Jawa Timur	Bappeprov Tk I	2001
36.	Rencana Implementasi Pengembangan Kepulauan Propinsi Jawa Timur	Bappeprov Tk I	2001
37.	Budaya dan Pembangunan; Pemberdayaan Lembaga Adat, Adat-Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat Desa di Propinsi Jawa Timur	Biro Pemerintahan Propinsi Jawa Timur	2001
38.	Penelitian Kinerja Aparat Penegak Hukum Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Keberadaan PKL dan Bangunan Liar	Balitbang kota Surabaya	2002
39.	Identifikasi Potensi dan Kendala yang Menghambat Upaya Pengembangan Peran Pasar Sebagai salah satu Sumber PAD Kabupaten Blitar	Balitbang Blitar	2002



## Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional

40.	Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Blitar 2003-2007	Bappeda Blitar	2002
41.	Evaluasi Program Pengembangan Kecamatan Di Jawa Timur	Bappeprov Tk	2002
42.	Penelitian Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Memajukan Pendidikan Di Kabupaten Jombang	Balitbang Jombang	2002
43.	Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan Di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2002
44.	Kajian Otonomi Perguruan Tinggi: Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Jawa Timur	Balitbang Propinsi Jawa Timur	2002
45.	Pasar di Era Otonomi Daerah: Pemberdayaan Pasar Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Blitar	Balitbangda Blitar	2002
46.	Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Lokal di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2002
47.	Idiologi Feminisme Gerakan Buruh di Kota Surabaya	Dirjen Dikti	2002
48.	Perlindungan Sosial dan Sumbangan Ekonomi Pekerja Anak di Sektor Perkebunan Komersial	Dirjen Dikti	2002
49.	Studi tentang Penyusunan Model Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan	Dirjen Dikti	2002
50.	Menakar Prospek Pengembangann Badan Usaha Milik Desa	Biro Pemeritahan Propinsi Jawa Timur	2002
51.	Kesenjangan Masalah Sosial yang Timbul dan Upaya Penanggulangannya	Dinas Sosial Surabaya	2002
52.	Profil dan Dinamika Sosial Penduduk Kecamatan Bulak	Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	2002
53.	Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
54.	Penyusunan Indeks Kemiskinan Manusia di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
55.	Penyusunan Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Tugu Pahlawan	Bappeko Surabaya	2003
56.	Pengkajian dan Pengembangan Model Binaan Program Gerdu Taskin di Propinsi Jawa Timur	Balitbang Jawa Timur	2003
57.	Kajian Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur	Balitbang Propinsi Jawa Timur	2003
58.	Penyusunan Program Perbaikan Kinerja Birokrasi Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di propinsi Jawa Timur	Bappeprop Jawa Timur	2003

## Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional

59.	Rencana Induk Program Pengendalian Pengendalian Urrbanisasi dan Penanganan PMKS di Propinsi Jawa Timur	Biro Kesra Sekda Propinsi Jawa Timur	2003
60.	Pendataan Masalah Sosial (Anak Jalanan di Kota Surabaya: Isu Prioritas dan Program Penanganannya)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya	2003
61.	Penelitian rencana Penghapusan SPP pada Jenjang Pendidikan dasar di Propinsi Jawa Timut	Balitbang Propinsi Jawa Timur	2003
62.	Penyusunan Proyeksi Kondisi Sosial Ekonomi Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
63.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimam (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Blitar	Balitbang Blitar	2003
64.	Raperda Penataan Biroktasi di Kabupaten Blitar	Balitbang Blitar	2003
65.	Penyusunan Analisa Situasi Ibu dan Anak di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
66.	Studi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro	Bappeda Bojonegoro	2003
67.	Penyusunan Raperda Cagar Budaya di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
68.	Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Propinsi Jawa Timur	Bappeprop Jatim	2004
69.	Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural Pada Masyarakat Nelayan Tradisional Jawa Timur	Balitbang Jatim	2004
70.	Pemetaan Dan Pengembangan Program Penanganan Pelacuran Di Kota Surabaya	Dinsos Surabaya	2004
71.	Anak Jalanana dan Anak Nakal di Kota Surabaya	Dinsos Surabaya	2004
72.	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Blitar	Balitbangda Blitar	2004
73.	Kajian Eksploratif Terhadap Penyandang Masalah dan Potensi Kesejahteraan Sosial Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Dalam Menangani Masalah Sosial di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2004
74.	Studi di Teluk Bintuni Papua	BP Indonesia	2005
75.	Analisis Peran Perempuan Dalam Kewirausahaan Guna Mendukung Kegiatan Eksplorasi Migas Di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2005
76.	Penelitian Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Peran Serta Masyarakat Mampu Di Provinsi Jawa Timur	Balitbang Jatim	2005
77.	Pengembangan Pengelolaan Wisata Alam Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2005
78.	Visi Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja)	Balitbang Kota Surabaya	2005

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional

79.	Pendataan PMKS Di Surabaya Pemetaan Problema Dan Pengembangan Program Penanganan Lansia Di Kota Surabaya	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya	2005
80.	Penyusunan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro	Bappeda Bojonegoro	2005
81.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Sumenep 2006-2011	Bappeda Sumenep	2005
82.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Blitar 2006-2011	Bappeda Blitar	2006
83.			
84.	Pemetaan Keberadaan dan Keadaan Kelompok Masyarakat yang Berhak Mendapatkan Subsidi Pemerintah Dalam Rangka Penerapan Sistem Target Subsidi (Targeting Subsidi) di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2006
85.	Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkadal) di Kabupaten Blitar	Balitbangda Blitar	2006
86.	Analisis Prioritas Program-Program Kemiskinan di Jawa Timur	Bappeprop Jatim	2006
87.	Penyusunan Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah di Kabupaten Probolinggo	Bappeda Probolinggo	2006
88.	Kajian Tentang Bentuk-Bentuk Tekanan Kemiskinan dan Mekanisme Survival Keluarga Miskin	Bappeda Jatim	2006
89.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Blitar 2008-2015	Bappeda Pamekasan	2007
90.	Rasa Aman, Mekanisme Adaptasi masyarakat dan Ekskalasi TindakKejahatan di Propinsi Jawa Timur	Polda Jatim	2007
91.	Pemberdayaan Nelayan Melalui Diversifikasi Usaha di Pantai Prigi, Trenggalek	Balitbang Jatim	2007
92.	Penelitian Kemiskinan di Perkotaan dan Alternatif Kebijakannya	Balitbang Jatim	2007
93.	Penyusunan Program dan Evaluasi Antisipasi Urbanisasi Berlebih di Kota-Kota di Provinsi Jawa Timur	Bappeprop Jatim	2007
94.	Penyusunan Kebijakan dan Program Pemberdayaan UKM di Kabupaten Sumenep	Bappeda Pamekasan	2007

Surabaya, 23 Maret 2009

Karnaji, S.sos. M.Si  
Nip. 132 162 037

## BIO DATA PENELITI

1. Nama : Dr. Subagyo Adam, Drs., MS
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat/Tanggal lahir : Kediri, 26 Januari 1953
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Staf Pengajar Program Studi Sosiologi Universitas Airlangga
6. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala-IVA
7. NIP : 131287532

### Pendidikan

1. 1960-1965 : SD Negeri di Kediri
2. 1966-1968 : SMP Negeri di Kediri
3. 1969-1971 : SMA Negeri di Madiun
4. 1972-1979 : S1, Studi Kependudukan di UGM Jogja
5. 1989-1991 : S2, Studi Kependudukan di UGM Jogja
6. 1992-2002 : S3, Studi Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana di Unair Surabaya

### Pengalaman

1. Penelitian Kajian Dinamika Sosial Memasuki Milenium Ketiga, Suatu Studi Tentang Integritas dan Wacana Pluralitas dalam Masyarakat Tradisional. Surabaya: Laboratorium Masalah-Masalah Pembangunan. Jurusan Sosiologi. FISIP Universitas Airlangga, 2000
2. Evaluasi Mobilitas Penduduk di Propinsi Jawa Timur. Kerjasama penelitian antara Propinsi Jawa Timur dan Universitas Airlangga, 2000.
3. Determinan Utama dalam Penerimaan Tubektomi di Kotamadya Surabaya. Universitas Airlangga: Lembaga Penelitian, 2001.
4. Peran KKBS-RT dalam Praktik Keluarga Berencana di Propinsi Jawa Timur. Kerjasama penelitian antara BKKBN Jatim dan Universitas Airlangga, 2001.
5. Makna Konstruksional Tubektomi dalam Perspektif Gender. Disertasi Doktor. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2002.
6. Penelitian Operasional. Peningkatan Pengetahuan Orang Tua dalam Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja. Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta bekerjasama dengan BKKBN Jatim., 2002.

### Publikasi

1. Teori Ekonomi Fertilitas: Suatu Tinjauan. Berkala Ilmiah KEPENDUDUKAN. *Scientific Journal of Population*, vol 2, No. 1. Surabaya: Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan Universitas Airlangga, 2000.
2. Analisa Data Kependudukan di Propinsi Jawa Timur. Buletin Kependudukan Triwulanan. Surabaya: Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur, 2000.

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional

---

3. **Manajemen Data Kependudukan Lintas Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan. Buletin Kependudukan Triwulanan. Surabaya: Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur, 2001.**
4. **Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU No. 10 Tahun 1992); Implementasinya dalam Pemerintahan Daerah. Buletin Kependudukan Triwulanan. Surabaya: Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur, 2001.**
5. **Makna Konstruksional Tubektomi dalam Perspektif Gender. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Tahun XVI, Nomor 1. Surabaya: FISIP Universitas Airlangga, 2002.**

Surabaya, 20 Maret 2009

Dr. Subagyo Adam, Drs., MS

## **BIO DATA ANGGOTA PENELITI**

1. Nama lengkap : Siti Mas'udah, S.Sos., MSi
2. NIP : 132 323 337
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 5 Agustus 1979
5. Alamat : Pratama Estate B-4 Surabaya.  
Telpon (031) 72799299/08123185488
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Dosen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga
8. Alamat kantor : Jl. Airlangga 4-6 Surabaya  
Telpon (031)5034015

### **Pendidikan Formal:**

1. Sekolah Dasar Tamat : 1991
2. Sekolah Menengah Pertama Tamat : 1994
3. Sekolah Menengah Atas Tamat : 1998
4. Perguruan Tinggi Universitas Airlangga (Sosiologi) Tamat : 2002
5. Pendidikan Magister di Universitas Airlangga (Ilmu Sosial) Tamat : 2006

**Karier di Bidang Keahlian**

- 2003 - 2006 : Dosen Mata Kuliah Umum Universitas Airlangga  
 2007 – sekarang : Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Unair

**Pengalaman Penelitian**

Judul	Sumber Dana	Tahun
Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
Penyusunan Indeks Kemiskinan Manusia di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
Pengkajian dan Pengembangan Model Binaan Program Gerdu Taskin di Propinsi Jawa Timur	Balitbang Jawa Timur	2003
Kajian Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur	Balitbang Propinsi Jawa Timur	2003
Penyusunan Program Perbaikan Kinerja Birokrasi Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di propinsi Jawa Timur	Bappeprop Jawa Timur	2003
Rencana Induk Program Pengendalian Pengendalian Urrbanisasi dan Penanganan PMKS di Propinsi Jawa Timur	Biro Kesra Sekda Propinsi Jawa Timur	2003
Penyusunan Proyeksi Kondisi Sosial Ekonomi Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
Penyusunan Standar Pelayanan Minimam (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Blitar	Balitbang Blitar	2003
Raperda Penataan Biroktasi di Kabupaten Blitar	Balitbang Blitar	2003
Penyusunan Analisa Situasi Ibu dan Anak di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
Studi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro	Bappeda Bojonegoro	2003
Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Propinsi Jawa Timur	Bappeprop Jatim	2004
Pemetaan Dan Pengembangan Program Penanganan Pelacuran Di Kota Surabaya	Dinsos Surabaya	2004
Anak Jalanana dan Anak Nakal di Kota Surabaya	Dinsos Surabaya	2004
Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Blitar	Balitbangda Blitar	2004

Kajian Eksploratif Terhadap Penyandang Masalah dan Potensi Kesejahteraan Sosial Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Dalam Menangani Masalah Sosial di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2004
Studi di Teluk Bintuni Papua	BP Indonesia	2005
Analisis Peran Perempuan Dalam Kewirausahaan Guna Mendukung Kegiatan Eksplorasi Migas Di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2005
Penelitian Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Peran Serta Masyarakat Mampu Di Provinsi Jawa Timur	Balitbang Jatim	2005
Pengembangan Pengelolaan Wisata Alam Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2005
Visi Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja)	Balitbang Kota Surabaya	2005
Pendataan PMKS Di Surabaya Pemetaan Problema Dan Pengembangan Program Penanganan Lansia Di Kota Surabaya	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya	2005
Penyusunan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro	Bappeda Bojonegoro	2005
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Sumenep 2006-2011	Bappeda Sumenep	2005
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Blitar 2006-2011	Bappeda Blitar	2006
Pemetaan Keberadaan dan Keadaan Kelompok Masyarakat yang Berhak Mendapatkan Subsidi Pemerintah Dalam Rangka Penerapan Sistem Target Subsidi (Targeting Subsidi) di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2006
Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkadal) di Kabupaten Blitar	Balitbangda Blitar	2006
Analisis Prioritas Program-Program Kemiskinan di Jawa Timur	Bappeprop Jatim	2006
Penyusunan Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah di Kabupaten Probolinggo	Bappeda Probolinggo	2006
Pemetaan Keberadaan Dan Keadaan Kelompok	Balitbang Jatim	2006



Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Subsidi Pemerintah Dalam Rangka Penerapan Sistem Target Subsidi (*Targeting Subsidi*) Di Jawa Timur

Kajian Upaya Penanggulangan Pengangguran di Kabupaten Malang	Bappeprov Jawa Timur	2007
Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Blitar	Bappekab Blitar	2008
Penyusunan Kebijakan dan Program Penanganan Pengangguran di Kabupaten Sumenep	Bappekab Sumenep	2008
Dampak Krisis Pangan dan Kenaikan Harga BBM Terhadap Kelangsungan Keluarga Miskin di Surabaya	Wahana Visi Indonesia	2008
Usulan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep 2008-2028	Bappekab Sumenep	2008
Penyelenggaraan Monev Penyusunan Up-dating Data Kemiskinan Kabupaten Blitar	Bappekab Blitar	2008
Penyusunan Kebijakan Partnership And Development dalam Pemanfaatan Dana BUMN Untuk Pengembangan UKM	Bappeprov Jawa Timur	2008
<i>Grand Design</i> Pariwisata Jawa Timur	Bappeprov Jawa Timur	2008
Model Pengembangan Terpadu Industri Berorientasi Ekspor	Bappeprov Jawa Timur	2008
Kajian Konsep Pembangunan <i>Trading House</i> Bagi UKM Jawa Timur	Dinas Koperasi Jawa Timur	2008

Curriculum vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Surabaya, 29 Oktober 2009

Siti Mas'udah, S.Sos., M.Si.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
(Curriculum Vitae)**

1. Nama	Drs. Septi Ariadi, MA.
2. NIP	131836626
3. Jenis Kelamin	Laki-laki
4. Tempat/Tgl lahir	Probolinggo; 23 September 1963
5. Pekerjaan	Staf Pengajar Universitas Airlangga
6. Jurusan/ pocalas	Sosiologi/ pocalas Ilmu pocal dan Ilmu Politik
7. Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga
8. Alamat Kantor	Jl. Darmawangsa Dalam Surabaya (031) 5034015, Faks (031) 5012442
9. Alamat tempat tinggal	PERUM. Bumi Marina Emas Blok F 116 Surabaya Telp. (031) 5952 552; HP : 0818525387
10. Email	septi_ariadi@yahoo.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

No.	Macam Pendidikan	Tempat	Tahun	Bidang	Gelar
1.	S-1 FISIP Unair	Surabaya	1988	Sosiologi	Drs. MA.
2.	S-2 Institute For Population and Social Research (IPSR), Mahidol University, Bangkok, Thailand	Bangkok Thailand	1996	Riset Sosial, Family Planning dan Kesehatan Reproduksi	

**KURSUS DAN PENDIDIKAN TAMBAHAN:**

- 1). Kursus Metode Penelitian Sosial di Universitas Indonesia, Tahun 1990
- 2). Kursus Statistik dan Komputer di Universitas Airlangga, Tahun 1992
- 3). Kursus Pengajaran Applied Approach, Tahun 1998
- 4). Kursus Integrated Bahan Ajar (Kewirausahaan), Tahun 1999

**PENGALAMAN PEKERJAAN**

1. Staf pengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Surabaya sampai tahun 2000
2. Tim peneliti untuk kegiatan riset bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah propinsi Jawa Timur
3. Penceramah Sosialisasi Tentang Konvensi Hak Anak (KHA) di 6 kabupaten di Jawa Timur (kerjasama dengan UNICEF)
4. Konsultan dalam penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) di UNICEF pada tahun 2001
5. Sebagai Konsultan di UNICEF dalam rangka monitoring dan evaluasi program pembangunan sumber daya dini di beberapa kabulaten di propinsi Jawa Timur tahun 2002

6.	Sebagai Konsultan di UNICEF dalam rangka riset tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di propinsi Jawa Timur dan Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2006
7.	Narasumber pelatihan tentang metodologi penelitian dan analisis data (statistik) di berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah/ swasta
8.	Sekretaris Departemen Sosiologi FISIP Unair sampai sekarang
9.	Staf Pengajar di FISIP Universitas Airlangga sampai sekarang

**PENGALAMAN PENELITIAN SEJAK TAHUN 2000 - 2008**

- 1). Kajian Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Tentang Dampak Pembangunan Pabrik Semen di Kawasan Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Tahun 2000
- 2.) Kajian Tentang Aksi Demonstrasi di Jawa Timur, Tahun 2000
- 3). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pelayanan Publik, Tahun 2000
- 4). Mengidentifikasi Penyebab Kematian Ibu dan Merumuskan Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) Pada Masyarakat Nelayan, Tahun 2000
- 5). Kajian Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas (Migas) di Kawasan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik Jawa Timur Kerjasama dengan Premier Oil Co. London, tahun 2000
- 6). Penelitian Tentang Faktor Pendorong dan Penghambat Penyalahgunaan NAPZA, tahun 2001
- 7). Studi tentang Pekerja Anak Di Sektor Berbahaya, Tahun 2001
- 8). Kajian Tentang Mekanisme Penyaluran dan Pola Pemanfaatan Kredit Usaha Tani (KUT) di daerah Pedesaan di Jawa Timur, tahun 2001
- 9). Studi tentang Upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan di Propinsi Jawa Timur, tahun 2001
- 10). Penelitian tentang Pekerja Anak di Sektor Berbahaya di Jawa Timur, tahun 2001
- 11). Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) beberapa 6 Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, Tahun 2001
- 12). Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Dini di 6 kabupaten di Jawa Timur, Tahun 2002
- 13). Studi Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sekitar Industri Kabupaten Tuban, Tahun 2002
- 14). Perencanaan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Lokal di Kota Surabaya, tahun 2002
- 15). Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak di Kota Surabaya, tahun 2003
- 16). Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu (PPM) SLTP Jawa Timur, tahun 2003
- 17). Penyusunan Raperda Pendidikan di Kota Surabaya, Tahun 2003
- 18). Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di kabupaten Blitar, tahun 2004
- 19). Pengembangan Pengelolaan Wisata Alam Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Di Jawa Timur, Tahun 2005
- 20). Penyusunan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Daerah Indusri Migas di Jawa Timur; tahun 2006
- 21). Penyusunan Kebijakan dan Program Penanganan Masalah Pengangguran Di Jawa Timur; tahun 2006

- 22). Pengetahuan, Sikap dan Praktek Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB; Kerja sama dengan UNICEF, 2006
- 23). Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban; Tahun 2007
- 24). Studi Pengembangan Usaha Ekonomi Mikro di kabupaten Mojokerto; Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, tahun 2007
- 25). Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Blitar, kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2007
- 26). Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Tenaga Kerja di kabupaten Blitar; Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Sumenep; tahun 2008
- 27). Penyusunan Kebijakan dan Program Penanggulangan Masalah Pengangguran di Jawa Timur; 2006; Kerjasama LPPM Unair dengan Bappeprov Jawa Timur; 2006
- 28). Penyusunan Kebijakan dan Program Pemberdayaan UKM di kabupaten Sumenep; Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Sumenep tahun 2007

**Publikasi / Penerbitan Buku :**

- 1) Sebagai kontributor penulisan buku berjudul : Wanita dan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Paramawidya, Tahun 1993.
- 2) Sebagai tim penulis dalam penulisan buku berjudul Studi Kualitatif Tentang Pekerja Anak di Jawa Timur, Penerbit : Airlangga University Press, Tahun 1999
- 3) Sebagai tim penulis dalam penulisan buku tentang Kekerasan Terhadap Anak yang diterbitkan oleh Airlangga University Press, Tahun 1999
- 4) Sebagai penulis dan editor dalam penulisan buku Studi Analisis Situasi HIV/AIDS dan Dampaknya Terhadap Anak-Anak, Wanita dan Keluarga di Propinsi Jawa Timur, Kerjasama FISIP Universitas Airlangga dengan UNICEF, 1999.
- 5) Sebagai anggota Tim penulis buku Tentang Kredit Usaha Tani di Propinsi Jawa Timur, Kerjasama FISIP Unair dengan Balitbang Propinsi Jawa Timur, Tahun 2001
- 6) Sebagai Tim penulis buku Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan di Propinsi Jawa Timur, tahun 2001:
- 8) Sebagai anggota tim penulis buku tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Propinsi Jawa Timur tahun 2002
- 9) Penulis buku tentang Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Industri di wilayah kabupaten Tuban, Jawa Timur tahun 2002
- 11). Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak di Kota Surabaya, tahun 2003
- 12). Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu (PPM) SLTP Jawa Timur, tahun 2003
- 13). Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di kabupaten Blitar, tahun 2004
- 14). Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya, tahun 2004
- 15). Analisis Peran Perempuan Dalam Kewirausahaan Guna Mendukung Kegiatan Eksplorasi Migas di Jawa Timur, Tahun 2005
- 16). Penyusunan Kebijakan dan Program Penanggulangan Masalah Pengangguran di Jawa Timur; 2006; Kerjasama LPPM Unair dengan Bappeprov Jawa Timur; 2006

Surabaya, Pebruari 2009

(Drs. Septi Ariadi, MA)